



Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Darurat Kemanusiaan

Berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam masa darurat

September 2005



Panduan

Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (GBV)

Masa Kondisi Darurat Kemanusiaan

Berfokus pada pencegahan dan penanganan
Kekerasan seksual dalam masa darurat

September 2005

Ucapan Terimakasih

Tim pelaksana Panitia Kerja Antar Agensi (Inter-Agency Standing Committee) untuk Penanganan Masalah Gender dan Kemanusiaan berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama menyusun panduan ini. Mereka telah menyumbangkan banyak waktu dan pengalaman mereka.

Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Keadaan Kedaruratan Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual akan diuji coba pada 2005-2006 dan versi paripurna dari panduan ini akan disusun dan diabsahkan oleh IASC pada akhir 2006.

INTER-AGENCY STANDING COMMITTEE

Food and Agriculture Organisation (FAO)
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
United Nations Children's Fund (UNICEF)
United Nations Development Programme (UNDP)
United Nations Population Fund (UNFPA)
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
World Food Programme (WFP)
World Health Organisation (WHO)

Penyusun tamu

InterAction
International Committee of the Red Cross (ICRC)
International Council of Voluntary Agencies (ICVA)
International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
International Organisation for Migration (IOM)
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Representative of the Secretary-General on Human Rights of IDPs
Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR)
World Bank

Kontribusi penting dalam penyusunan panduan ini diberikan oleh UNIFEM dan rekan-rekan kerja: para anggota Reproductive Health Response in Conflict Consortium; Médecins sans Frontières; Oxfam; International Medical Corps; Christian Children's Fund. Institusi akademi berikut turut memberi sumbangan yang berarti: The International Centre for Reproductive Health of the Ghent University and the University of Grenoble.

The Inter-Agency Standing Committee (IASC) terbentuk pada 1992 berdasarkan Resolusi Majelis Umum 46/182 yang menghendaki adanya penguatan koordinasi untuk masalah-masalah kemanusiaan. Resolusi tersebut merancang IASC sebagai mekanisme utama untuk memudahkan pengambilan keputusan dari badan terkait dalam penanganan masalah-masalah pelik dan bencana alam. IASC dibentuk oleh perwakilan PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan non-PBB.

Untuk informasi lebih jauh mengenai IASC, silakan mengunjungi website IASC www.humanitarianinfo.org/iasc.

Inter-Agency Standing Committee (2005)

Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Keadaan Kedaruratan Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Versi Uji Coba)

Geneva: Inter-Agency Standing Committee

Kata Pengantar

The Inter-Agency Standing Committee telah menerbitkan Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Darurat Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di masa darurat ini untuk memenuhi kebutuhan akan satu pendekatan yang mendasar dan partisipatif untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender. Panduan ini adalah alat bagi pekerja di lapangan untuk membangun pendekatan multisektoral dalam penyusunan program pencegahan kekerasan seksual di kondisi rawan.

Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata adalah kejahatan kemanusiaan dan digunakan sebagai alat perang untuk menyakiti dan menanamkan rasa takut kepada masyarakat sipil, terutama wanita dan anak-anak perempuan.

Kelompok-kelompok masyarakat yang peduli kepada kemanusiaan harus bersatu dan bersama-sama mengambil tindakan untuk menegakkan sistem yang mampu mencegah agar kekerasan tidak terjadi dan ketika kekerasan terjadi, merangkul korban.

Panduan ini memuat petunjuk praktis tentang bagaimana memastikan bahwa program-program perlindungan dan penanganan masalah-masalah kemanusiaan adalah aman dan tidak – langsung maupun tidak langsung – memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual atas wanita dan anak-anak perempuan.

Panduan ini juga merinci bentuk-bentuk pelayanan yang harus ada untuk menangani para korban kekerasan seksual.

Saya berharap semua pihak terlibat dalam penyediaan perlindungan dan bantuan-bantuan kemanusiaan untuk menggunakan Panduan ini dan bekerja sama untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender. Kita membutuhkan kesatuan upaya untuk menghentikan kekejaman dari kekerasan seksual dan sungguh-sungguh secara efektif menolong para korban.

Jan Egeland

Koordinator Bantuan bagi Keadaan Darurat dan Under-Secretary-General untuk Masalah-masalah Kemanusiaan

Daftar Isi

Terimakasih	i
Kata pengantar	iii
Bab 1. Pendahuluan	1
Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Darurat	2
Tujuan	2
Sasaran	2
Cara Menggunakan Panduan	2
Sifat dasar dan Tingkatan Kekerasan Berbasis Gender	3
Bab 2. Istilah dan Penjelasan	7
Bab 3. Pencegahan kekerasan berbasis gender dalam masa darurat kemanusiaan	9
Bab 4. Lembar Tindakan untuk Pencegahan dan Penanganan Minimum	15
1. Koordinasi	16
2. Penilaian dan Pemantauan	24
3. Perlindungan	30
4. Sumber Daya Manusia	38
5. Air dan Sanitasi	46
6. Ketersediaan Makanan dan Gizi	49
7. Tempat Penampungan dan Perencanaan Lokasi dan Barang-barang Kebutuhan Selain Makanan	53
8. Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat	62
9. Pendidikan	72
10. Informasi, Pendidikan, Komunikasi	75
Lampiran 1	82
Penanganan kekerasan berbasis gender dalam situasi rawan : Kesepakatan IASC	
Lampiran 2	85
Contoh Bentuk Pemantauan, Penerapan Pencegahan dan Penanganan Minimum	
Lampiran 3	87
Contoh Bentuk Laporan Kasus	
Lampiran 4	89
Singkatan	

Bab 1. Pendahuluan

Seluruh pekerja kemanusiaan harus mengambil tindakan, mulai dari tahap awal keadaan darurat, untuk mencegah kekerasan seksual dan menyediakan bantuan selayaknya kepada para korban.

Kekerasan gender, dan khususnya kekerasan seksual, adalah masalah serius yang mengancam jiwa perempuan dan anak-anak perempuan. Dalam banyak kasus, kekerasan berbasis gender adalah masalah internasional, berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia dan bahwa pencegahan dan penanganan menyeluruh tidak pernah ditemukan di hampir seluruh negara di seluruh dunia.¹¹ Kekerasan gender merupakan persoalan khusus dalam konteks keadaan darurat

yang pelik dan bencana alam, dimana perempuan dan anak-anak seringkali menjadi sasaran kekerasan, dan sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan dan kesewenang-wenangan karena jenis kelamin, usia dan status mereka dalam masyarakat. (Lihat “Sifat Dasar dan Tingkat Kekerasan Berbasis Gender dalam Kondisi Darurat Kemanusiaan”, hlm. 3.)

Kekerasan gender adalah pelanggaran hak asasi manusia universal yang dilindungi oleh konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional, termasuk hak seseorang untuk merasa aman, hak untuk mencapai tingkat tertinggi kesehatan fisik dan mental, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau melecehkan, dan hak untuk hidup.

Fokus dari Kekerasan Seksual

Dalam setiap kasus darurat, banyak bentuk Kekerasan Berbasis Gender yang terjadi. Pada tahap awal – ketika kehidupan masyarakat terganggu dengan terjadinya perpindahan penduduk, dan sistem perlindungan tidak sepenuhnya berjalan – sebagian besar Kekerasan Berbasis Gender yang dilaporkan adalah kekerasan seksual yang melibatkan korban perempuan dan pelaku laki-laki. Kekerasan seksual adalah bentuk Kekerasan Berbasis Gender yang paling sering terjadi dan paling berbahaya yang terjadi dalam masa darurat yang parah. Kemudian – dalam tahap yang lebih stabil dan selama masa pemulihan dan pembangunan – bentuk lain Kekerasan Berbasis Gender muncul dan/atau semakin sering dilaporkan. Bentuk-bentuk kekerasan ini termasuk, antara lain, kebiasaan-kebiasaan tradisi yang berbahaya (mutilasi alat kelamin perempuan, pernikahan usia muda, pembunuhan untuk balas dendam, dll.) dan kekerasan dalam rumah tangga.

Walau pencegahan dalam tahap awal keadaan darurat seharusnya berfokus pada kekerasan seksual, setiap situasi adalah unik dan bentuk lain Kekerasan Berbasis Gender sebaiknya tidak diabaikan. Sebagai contoh, tingkat keparahan dan jumlah kasus rumah tangga seringkali meningkat sesudah bencana alam (lihat contoh statistik di bawah) dan karena itu membutuhkan campur tangan dari aktor kemanusiaan. Analisis situasi yang terkoordinasi (dijelaskan dalam Lembar Tindakan 2.1, Analisis mengenai tindakan dalam situasi cepat terkoordinasi) dapat memberikan informasi mengenai bentuk Kekerasan Berbasis Gender yang lain yang mungkin terjadi, termasuk frekuensi, risiko, dan seberapa mematikan. Bentuk-bentuk lain Kekerasan Berbasis Gender tersebut tidaklah secara eksplisit dijelaskan dalam panduan ini tetapi dimasukkan ke dalam bahan-bahan sumber dan ringkasan rekomendasi bagi kesiapan dan tahap-tahap pencegahan dan tindakan yang menyeluruh.

Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dalam Keadaan Darurat

Semasa krisis, seperti saat konflik bersenjata atau bencana alam, institusi-institusi dan sistem-sistem untuk melindungi masyarakat secara fisik dan sosial dapat menjadi lemah atau hancur. Polisi, hukum, kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial seringkali tidak berjalan dengan baik, banyak orang yang meninggalkan rumah, dan mereka yang bertahan tinggal bisa saja tidak lagi memiliki kemampuan atau peralatan untuk bekerja. Keluarga dan masyarakat tercerai-berai, yang berakibat semakin hancurnya sistem dukungan masyarakat dan mekanisme perlindungan.

Untuk menyelamatkan jiwa dan meningkatkan perlindungan, ada tindakan-tindakan minimum yang harus segera dilaksanakan secara terkoordinasi untuk mencegah dan menangani Kekerasan Berbasis Gender dari tahap awal keadaan darurat. Para korban Kekerasan Berbasis Gender membutuhkan bantuan untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang mengancam keselamatan mereka. Mereka membutuhkan perawatan kesehatan, dukungan psikologi dan sosial, keamanan dan perlindungan hukum. Pada saat yang sama, tindakan-tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mengenali penyebab dan faktor-faktor pendukung terjadinya Kekerasan Berbasis Gender dalam keadaan tertentu. Mereka yang menyediakan pelayanan tersebut haruslah memiliki pengetahuan luas, trampil, dan bersungguh-sungguh menolong korban, dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang efektif. Pencegahan dan penanganan atas Kekerasan Berbasis Gender mensyaratkan tindakan terkoordinasi dari para pekerja di banyak sektor dan badan-badan.

Tujuan

Tujuan utama dari panduan ini adalah supaya pekerja kemanusiaan dan masyarakat dapat merancang, membangun, dan berkoordinasi untuk mengambil tindakan-tindakan intervensi minimum secara multisektoral untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual selama tahap awal dari masa darurat.

Sementara panduan ini memusatkan perhatian pada tahap awal dari masa darurat, panduan ini juga bertujuan untuk menginformasikan dan membuat masyarakat sadar akan adanya Kekerasan Berbasis Gender selama keadaan darurat, bahwa hal itu adalah masalah serius dan mengancam keselamatan jiwa, dan menawarkan strategi konkret pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan pertimbangan-pertimbangan dalam perencanaan kesiapan keadaan darurat dan selama tahap-tahap sesudah masa darurat.

Rangkaian kegiatan yang tercantum di dalam panduan ini:

1. Mengenali tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan dalam tahap persiapan.
2. Melaksanakan semua tindakan pencegahan dan penanganan minimum selama tahap awal keadaan darurat; dan
3. Mengenali tindakan-tindakan komprehensif yang dapat diambil pada tahap-tahap lebih stabil dan selama proses pemulihan dan rehabilitasi.

Panduan ini dapat diterapkan dalam keadaan darurat apapun, tanpa memperhitungkan apakah prevalensi “yang diketahui” mengenai kekerasan seksual tinggi atau rendah. Penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual jarang dilaporkan bahkan di negara-negara maju, dan akan sulit bahkan tidak mungkin untuk memperoleh ukuran yang akurat seberapa besar jumlah kasus dalam keadaan darurat. Semua pekerja kemanusiaan, dengan demikian, harus berasumsi dan meyakini bahwa Kekerasan Berbasis Gender, dan khususnya kekerasan seksual, sedang terjadi dan bahwa itu adalah masalah serius dan mengancam keselamatan jiwa, terlepas dari ada atau tidaknya bukti yang lengkap dan terpercaya.

Sasaran

Panduan ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan, termasuk badan-badan PBB, lembaga swadaya masyarakat, organisasi berbasis masyarakat, dan badan-badan pemerintah yang menangani keadaan-keadaan darurat pada tingkat internasional, nasional dan lokal.

Panduan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari pemerintah lokal dan masyarakat, pada khususnya kepemimpinan dan peran serta perempuan dan anak-anak dalam setiap kegiatan. Peran serta ini mutlak demi kesuksesan tindakan-tindakan terkoordinasi, dan akan memperkuat kapasitas lokal dan meningkatkan kesinambungan.

Cara Menggunakan Panduan

Panduan ini harus tersedia dan dimiliki oleh para pekerja kemanusiaan. Panduan ini merekomendasikan tindakan-tindakan kunci dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender saat keadaan darurat kemanusiaan. Matriks pada Bab 3 memperkenalkan tindakan-tindakan kunci yang direkomendasikan bagi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dibagi dalam tiga tahap umum keadaan darurat:

- Persiapan penanganan masalah selama masa darurat

- Tahap Awal (Pencegahan dan Penanganan Minimum)
- Tahap Pemulihan (Pencegahan dan Penanganan Menyeluruh)

Semasa Tahap Persiapan Penanganan Masalah Selama Masa Darurat, sejumlah tindakan harus diambil untuk mempercepat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada tahap awal keadaan darurat. Walaupun kesiapan ini terbatas oleh banyak faktor, tindakan-tindakan awal dapat dilakukan. Kolom kiri pada matriks di Bab 3 mencantumkan ringkasan informasi mengenai tindakan-tindakan kunci yang direkomendasikan untuk persiapan menghadapi keadaan darurat.

Pelaksanaan rinci dalam tahap ini tidak termasuk di dalam panduan, tetapi bahan-bahan acuan yang digunakan dalam panduan ini dan termasuk dalam sisipan CD-ROM dapat menjadi sumber untuk informasi lebih banyak.

Intervensi pada tahap awal, Pencegahan dan Penanganan Minimum, dijelaskan dalam kolom tengah matriks pada Bab 3. Setiap tindakan pada tahap ini, rinciannya ada di dalam Lembar Tindakan pada Bab 4. Arahkan dalam Lembar Tindakan termasuk tindakan penting yang harus diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan sumber-sumber penting yang dapat mendukung pelaksanaan dari tindakan penting tersebut. Intervensi minimum dan rinci pelaksanaannya adalah focus dari panduan ini.

Dalam tahap lanjutan dari keadaan darurat, setelah krisis awal dan sebelum memasuki tahap perbaikan dan rehabilitasi, Pencegahan dan Penanganan Komprehensif dibutuhkan. Hal ini meliputi wilayah intervensi yang lebih besar untuk penanganan bentuk-bentuk lain Kekerasan Berbasis Gender yang muncul dalam tahap ini. Kolom kanan dalam matriks pada Bab 3 memuat ringkasan intervensi penting pada tahap ini. Rincian pelaksanaan tersedia dalam dokumen-dokumen acuan panduan ini, sebagian besar termuat di dalam CD-ROM sisipan.

Lembar Tindakan untuk Pencegahan dan Penanganan Minimum

Lembar Tindakan disusun oleh sektor-sektor dan fungsi-fungsi lintas sektor. Ada lima fungsi-fungsi lintas sektor yang mensyaratkan tindakan dari berbagai organisasi dan sektor-sektor. Fungsi-fungsi lintas sektor adalah sebagai berikut

- Koordinasi
- Penilaian dan Pemantauan
- Perlindungan
- Sumber Daya Manusia
- Informasi, Pendidikan dan Komunikasi

Sebagai tambahan bagi fungsi-fungsi lintas sektor tersebut, ada intervensi khusus yang diselenggarakan oleh sektor-sektor. (Perhatikan bahwa perlindungan adalah tugas fungsi-fungsi lintas sektor dan sektor dalam panduan ini).

- Perlindungan
- Air dan Sanitasi
- Ketersediaan Makanan dan Gizi
- Tempat Penampungan dan Perencanaan Tempat serta Barang-barang Kebutuhan Selain Makanan
- Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat
- Pendidikan

Panduan ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi dari multisektor dan keterlibatan masyarakat, dan arahan untuk memaksimalkan keterlibatan multisektor dalam fungsi-fungsi lintas sektor. Harus ada koordinasi inter dan antara sektor dalam pelaksanaan intervensi minimum. Untuk tujuan ini, setiap tindakan-tindakan dihubungkan, ditandai dengan huruf ungu, dengan Lembar Tindakan terkait untuk sektor-sektor dan fungsi-fungsi lain.

Bahan-bahan Acuan

Panduan ini berdasarkan banyak panduan, alat, standar, penelitian dan bahan-bahan latar belakang, dan sumber-sumber lain yang dibuat oleh PBB, LSM, dan sumber-sumber akademis. Bahan-bahan ini dapat memberikan informasi tambahan untuk membantu pekerja lapangan dalam melaksanakan intervensi pada setiap tahap masa darurat. Bagi setiap fungsi lintas sektor dan sektor, tersedia serangkaian sumber-sumber acuan penting di dalam Lembar Tindakan. CD-ROM sisipan dalam panduan ini memuat sebagian besar dari sumber-sumber acuan tersebut.

Sifat Dasar dan Tingkatan Kekerasan Berbasis Gender dalam Masa Darurat Kemanusiaan

Setidaknya sepertiga dari populasi perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual pada satu waktu dalam hidupnya.²² Walaupun hanya sedikit penelitian yang dilakukan oleh banyak negara mengenai masalah ini, data yang tersedia menunjukkan bahwa di beberapa negara hampir satu dari empat perempuan menderita kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan, dan sepertiga remaja perempuan melaporkan pengalaman seksual pertama mereka dilakukan dalam keadaan terpaksa.³³ Dalam konteks konflik bersenjata dan pengungsian, kekerasan seksual, termasuk eksploitasi dan penganiayaan, sering terjadi dan merupakan masalah berisiko tinggi. Kekerasan seksual sering digunakan sebagai alat perang, dengan perempuan dan anak-anak sebagai sasaran.

- Sekitar 50,000 dan 64,000 pengungsi perempuan di Sierra Leone melaporkan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak bersenjata. Setengah dari pengungsi perempuan yang berhadapan langsung dengan pihak bersenjata melaporkan terjadinya kekerasan seksual.⁴⁴
- Sebanyak 25 persen perempuan Azerbaijan yang disurvei pada 2000 oleh Pusat Pengawasan Penyakit Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka dipaksa untuk melakukan hubungan seks; mereka yang memiliki risiko terbesar adalah populasi pengungsi Azerbaijan.⁵⁵
- Menurut survei pemerintah pada 1999, 37 persen dari pekerja seks Sierra Leone di bawah 15 tahun, 80 persen diantara mereka adalah anak-anak tidak di bawah pengawasan atau anak-anak pengungsi karena perang.⁶⁶
- Sebagian besar perempuan Tutsi semasa pembunuhan massa di Rwanda pada 1994 berisiko mengalami beberapa bentuk Kekerasan Berbasis Gender; dari jumlah tersebut, sekira antara 250,000 dan 500,000 orang menjadi korban pemerkosaan.⁷⁷
- Diperkirakan antara 20,000 dan 50,000 perempuan diperkosa selama perang Bosnia dan Herzegovina pada awal 1990-an.⁸⁸
- Sesudah bencana alam, laporan dari lapangan memperlihatkan adanya dampak sosial termasuk kekerasan, seperti yang terungkap dalam banjir di Australia: "Hubungan antar manusia begitu telanjang dan kekuatan maupun kelemahan dalam hubungan tersebut semakin menjadi perhatian. Dengan begitu, perempuan yang terisolasi secara sosial menjadi semakin terisolasi, kekerasan domestik meningkat, dan akar dari hubungan antar anggota keluarga, teman, dan pasangan terungkap." Peningkatan kekerasan terhadap perempuan juga dilaporkan di Filipina setelah meletusnya Gunung Pinatubo, Amerika Tengah dan Utara setelah Badai Mitch; dan di beberapa negara setelah tsunami di 2004.⁹⁹

Kekerasan Berbasis Gender, termasuk kekerasan seksual, utamanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak perempuan. Laki-laki dewasa dan anak-anak lelaki juga rentan terhadap kekerasan seksual, terutama ketika mereka menjadi korban penyiksaan dan/atau penahanan. Walau demikian, mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan.

Laporan tidak lengkap

Salah satu ciri dari kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual, adalah laporan yang tidak lengkap. Korban pada umumnya tidak akan mengungkapkan kekerasan yang mereka alami sebab beberapa alasan, termasuk perasaan menyalahkan diri sendiri, takut

akan pembalasan, ketidakpercayaan kepada pemerintah, dan risiko/takut menjadi korban berulang kali. Tindakan Kekerasan Berbasis Gender menimbulkan perasaan malu, perasaan bersalah, stigma sosial, dan bahkan penolakan oleh keluarga korban dan masyarakat. Stigma dan penolakan khususnya memberatkan ketika si korban berbicara tentang atau melaporkan peristiwa tersebut. Data yang tersedia, dalam seluruh kondisi, tentang laporan Kekerasan Berbasis Gender dari polisi, badan hukum, pos kesehatan, atau sumber lain hanya mewakili sejumlah kecil dari angka sesungguhnya peristiwa Kekerasan Berbasis Gender.

Konsekuensi

Korban Kekerasan Berbasis Gender berada dalam risiko tinggi mengidap masalah kesehatan yang parah dan pulih dalam waktu lama, termasuk kematian karena luka-luka yang mereka derita atau tindakan bunuh diri. Konsekuensi kesehatan juga termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, pengguguran kandungan sendiri dengan cara yang tidak aman, pembunuhan bayi, dan infeksi penyakit yang menular melalui hubungan seks, termasuk HIV/AIDS. Trauma psikologis, begitu juga stigma sosial dan penolakan, juga sering ditemukan. Kebanyakan anggota masyarakat cenderung menyalahkan si korban dalam kasus-kasus kekerasan seksual, yang memperbesar luka psikologis. Sifat dasar sesungguhnya dan parahnya trauma fisik dan emosi sangat bervariasi di antara korban; tidak seluruhnya pelayanan pertolongan yang tersedia diinginkan atau dibutuhkan oleh korban. Penanganan terhadap Kekerasan Berbasis Gender harus, bagaimanapun juga, menyertakan serangkaian pelayanan untuk mengurangi konsekuensi yang mengancam keselamatan jiwa dan mencegah korban lebih terluka atau tersakiti.

Anak-anak dan Remaja

Anak-anak dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas sementara tidak dalam posisi untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Tergantung dari tingkat perkembangan mereka, anak-anak tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri.¹¹⁰ Perempuan remaja dan wanita muda bisa menjadi target kekerasan seksual selama konflik bersenjata atau kesulitan ekonomi.

Penyebab dan Faktor-faktor Risiko dalam Keadaan Darurat

Ketidaksetaraan Gender dan diskriminasi adalah penyebab utama Kekerasan Berbasis Gender, tetapi faktor-faktor berbeda menentukan tipe dan tingkatan kekerasan di setiap keadaan. Dalam keadaan-keadaan

darurat, norma-norma yang mengatur perilaku sosial menjadi lemah dan sistem-sistem sosial tradisional seringkali hancur. Perempuan dan anak-anak dapat terpisah dari keluarga dan perlindungan masyarakat, membuat mereka semakin rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi yang terjadi karena gender mereka, umur, dan ketergantungan kepada orang lain untuk mendapat pertolongan dan perlindungan. Semasa konflik bersenjata, kekerasan seksual seringkali digunakan sebagai senjata perang, dengan perempuan dan anak-anak sebagai target. Kekerasan seksual yang berkaitan dengan perang seringkali mencakup penculikan dan perbudakan seks.

Catatan

1. Heise, L., Pitanguy, L., Germain, A. Violence Against Women: The Hidden Health Burden. World Bank Discussion Paper 255, 1004. World Report on Violence and Health, World Health Organisation, 2002.
2. Heise, L., Ellsberg M., and Gottemoeller, M. Ending Violence Against Women. Population Reports. Series L. No. 11. Baltimore, Maryland: Population Information Program, Johns Hopkins School of Public Health. 1999.
3. World Report on Violence and Health. WHO, 2002, page 149.
4. Physicians for Human Rights, War-related Sexual Violence in Sierra Leone: A Population-based Assessment, Boston, 2002.
5. J. Kerimova et al, Factors Associated with Self-reported Forced Sex Among Azerbaijani Women, unpublished abstract presented at the Reproductive Health Response in Conflict Consortium Conference, Washington, D.C., 2000.
6. Government of Sierra Leone, Situation Analysis of Women and Children in Sierra Leone, Freetown, 1999.
7. Association of Widows of the Genocide (Avega), Survey on Violence Against Women in Rwanda, Kigali, 1999.
8. M. Olujic and V. Nikolic-Ristanovic, cited in Jeanne Ward, If Not Now, When? Addressing Gender-based Violence in Refugee, Internally Displaced, and Post-Conflict Settings. A Global Overview. RHRC Consortium, 2002.
9. Violence Against Women in Disasters Fact Sheet http://online.northumbria.ac.uk/geography_research/gdn/resources/violence-against-women-in-disasters.doc
10. Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response, UNHCR, 2003. Chapter 5. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/PR_UNHCRguide.pdf

Bab 2. Istilah-istilah dan Definisi

Berikut ini adalah istilah-istilah dan definisi yang digunakan dalam panduan ini dan dicantumkan di sini untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini. Istilah-istilah dan definisi yang digunakan di sini bukanlah istilah hukum dan tidak dimaksudkan demikian.

Aktor mengacu pada orang-orang, kelompok, organisasi dan institusi terlibat dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender. Aktor bisa berarti pengungsi/IDP, masyarakat lokal, atau sukarelawan badan-badan PBB, LSM, institusi pemerintahan lokal, penyumbang, atau anggota masyarakat internasional lainnya.¹¹

Anak-anak atau Orang di Bawah Umur 18 tahun, menurut Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak. Orang di bawah umur dianggap tidak mampu untuk memberi penilaian dan memahami konsekuensi dari pilihan mereka dan memberi persetujuan sendiri, terutama mengenai tindakan-tindakan seksual.

Komunitas adalah istilah yang digunakan dalam panduan ini mengacu kepada populasi yang mengalami keadaan darurat. Dalam konteks individu, “komunitas” dapat diartikan sebagai pengungsi, orang-orang yang meninggalkan rumah mereka, korban bencana alam, atau istilah lain.

Badan-badan koordinator Organisasi-organisasi (biasanya dua organisasi yang saling bekerjasama) yang memimpin kelompok kerja pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan memastikan bahwa intervensi pencegahan dan penanganan minimum telah dilakukan. Badan-badan koordinator dipilih oleh kelompok kerja pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan diabsahkan oleh unit PBB terbesar di satu negara (misalnya Humanitarian Coordinator, SRSG).

Focal point/focal point kekerasan seksual mengacu kepada staf yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu yang mewakili organisasi mereka dan/atau sektor dan berpartisipasi di dalam kelompok kerja pencegahan Kekerasan Berbasis Gender.

Kelompok kerja pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Sekelompok aktor multisektoral dan antar-organisasi yang bertemu secara regular untuk merancang, membangun, berkoordinasi, memantau dan mengevaluasi tindakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Harus ada satu kelompok kerja pada tingkat nasional dan kelompok kerja lain pada tingkat lokal. Kelompok-kelompok kerja harus mencakup aktor multisektor dari komunitas, pemerintah, PBB, LSM/organisasi

berbasis masyarakat tingkat internasional dan nasional, penyumbang dana dan lainnya. Setidaknya, kelompok kerja harus mencakup focal point sektoral seperti yang tercantum pada Lembar Tindakan.

Gender mengacu kepada perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan, dan walaupun berakar kuat pada setiap kebudayaan, dapat berubah seiring waktu, dan memiliki variasi luas baik di dalam maupun antar kebudayaan. “Gender” menentukan pembagian peran, tanggung jawab, kesempatan, hak istimewa, pengharapan dan pembatasan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap kebudayaan.

Kekerasan Berbasis Gender ada istilah umum bagi setiap tindakan yang berbahaya yang dilakukan di luar keinginan seseorang, dan bahwa hal ini berdasarkan perbedaan (Gender) antara laki-laki dan perempuan.

Kekerasan Berbasis Gender melanggar sejumlah hak asasi manusia universal yang dilindungi oleh berbagai peraturan dan konvensi internasional. Banyak – tetapi tidak semua – bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender adalah ilegal dan merupakan tindakan kriminal seperti yang diatur dalam hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan satu negara.

Di seluruh dunia, Kekerasan Berbasis Gender lebih banyak terjadi kepada perempuan dan anak-anak perempuan daripada laki-laki dan anak lelaki. Istilah “kekerasan gender” seringkali dipergunakan senapas dengan “kekerasan terhadap perempuan”. Istilah “kekerasan gender” menyoroti dimensi gender dalam bentuk-bentuk tindakan ini, atau dalam kata lain, terjadi karena status perempuan sebagai kelas kedua di dalam masyarakat dan karena mereka sangat rentan terhadap kekerasan. Penting untuk diingat bahwa laki-laki dan anak-anak lelaki bisa menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender, khususnya kekerasan seksual.

Sifat dasar dan tingkat tipe-tipe spesifik Kekerasan Berbasis Gender bervariasi menurut kebudayaan, negara, dan wilayah.

Contoh:

- Kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual/penganiayaan seksual dan pelacuran karena terpaksa
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Penjualan manusia
- Pernikahan paksa/usia muda
- Praktik-praktik berbahaya seperti mutilasi alat kelamin perempuan, pembunuhan balas dendam, warisan janda, dan lainnya

Aktor kemanusiaan²² termasuk semua pekerja untuk badan-badan kemanusiaan, baik direkrut secara internasional maupun nasional, atau secara formal maupun informal dipekerjakan di dalam komunitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari badan tersebut.

Pelaku Orang, kelompok atau institusi yang secara langsung mengakibatkan atau mendukung terjadinya kekerasan atau bentuk kekerasan lainnya terhadap baik perempuan maupun laki-laki di luar keinginan mereka.

Perkosaan/Percobaan perkosaan³³ adalah hubungan seksual yang tidak disetujui bersama. Hal ini termasuk penyerangan terhadap bagian tubuh manapun dengan menggunakan alat kelamin dan/atau penyerangan terhadap alat kelamin atau lubang dubur dengan benda apapun atau bagian tubuh apapun. Perkosaan dan percobaan perkosaan mengandung unsur kekuasaan, ancaman, dan/atau paksaan. Penetrasi dalam bentuk apapun adalah perkosaan. Upaya untuk memperkosa seseorang tetapi tanpa penetrasi adalah percobaan perkosaan.

Perkosaan terhadap perempuan dan laki-laki seringkali digunakan sebagai senjata perang, sebagai bentuk penyerangan terhadap musuh, sebagai perlambangan sang pemenang dan degradasi kaum perempuan atau pejuang laki-laki yang ditawan. Perkosaan bisa juga dipakai sebagai hukuman atas perempuan karena melanggar nilai-nilai sosial atau moral, misalnya, mereka yang melarang perzinahan atau mabuk di tempat publik. Perempuan dan laki-laki juga dapat mengalami perkosaan di dalam tahanan polisi atau di penjara.⁴⁴

Perkosaan/percobaan perkosaan termasuk:

- Perkosaan terhadap perempuan dewasa
- Perkosaan terhadap anak-anak (perempuan atau laki-laki), termasuk juga hubungan sedarah
- Perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku
- Perkosaan marital, antara suami dan istri
- Perkosaan terhadap laki-laki, terkadang dikenal sebagai sodomi

Penganiayaan seksual⁵⁵ adalah bentuk nyata atau ancaman fisik secara seksual, baik dengan menggunakan kekerasan atau di bawah ketidaksetaraan atau kondisi pemaksaan. (Lihat “eksploitasi seksual”.)

Eksplorasi seksual⁶⁶ adalah bentuk nyata atau percobaan penganiayaan yang mengandung unsur kerentanan, perbedaan kekuasaan, atau kepercayaan, untuk tujuan-tujuan seksual, termasuk untuk, tetapi tidak membatasi, keuntungan moneter, secara sosial atau politik dengan mengeksploitasi seseorang secara seksual. (Lihat “kekerasan seksual”.)

Kekerasan seksual Sesuai dengan tujuan panduan

ini, kekerasan seksual termasuk, setidaknya, perkosaan/percobaan perkosaan, kejahatan seksual, dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual adalah “tindakan seksual apapun, percobaan untuk melakukan kegiatan seksual, kata-kata atau cumbuan seksual yang tidak diinginkan, atau perdagangan seksualitas seseorang, menggunakan paksaan, ancaman atau paksaan fisik, oleh siapapun apapun hubungannya dengan si korban, di mana pun, termasuk tetapi tidak hanya di rumah atau di tempat kerja”. Kekerasan seksual terjadi dalam banyak bentuk, termasuk perkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan, kehamilan yang dipaksakan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penganiayaan, dan pengguguran kandungan yang dipaksakan.

Korban Orang yang telah mengalami Kekerasan Berbasis Gender. Istilah “korban” dan “orang yang selamat” dapat dipergunakan secara bergantian. “Korban” adalah istilah yang seringkali digunakan untuk sektor hukum dan medis. “Orang yang selamat” adalah istilah umum yang lebih disukai oleh sektor yang memberikan pelayanan dukungan psikologi dan sosial karena istilah ini mengandung unsur kekuatan untuk bertahan.

Kelompok rentan Dalam setiap keadaan darurat, ada kelompok-kelompok individu yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual daripada anggota populasi lainnya. Mereka umumnya adalah perempuan yang kurang mampu melindungi diri mereka sendiri dari gangguan, lebih tergantung kepada orang lain untuk bertahan hidup, tidak memiliki kekuasaan, dan lebih tidak diperhatikan. Kelompok-kelompok individu yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual termasuk, tetapi bukan hanya, perempuan lajang, keluarga yang dikepalai perempuan, anak-anak yang terpisah/atau tidak di bawah pengawasan, anak yatim piatu, perempuan cacat dan/atau tua.

Catatan

- 1 Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response. UNHCR: Geneva, 2003. Pg. 6.
- 2 From Inter-Agency Standing Committee, Report of the Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse in Humanitarian Crises. June 2002.
- 3 “Rape/attempted rape” adapted from Tanzania inter-agency GBV protocols and Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for Prevention and Response. UNHCR, May 2003.
- 4 This paragraph from World Report on Violence and Health. WHO, 2002. Pg. 149.
- 5 “Sexual abuse,” “sexual exploitation” from Secretary-General’s Bulletin Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse. October 2003.
- 6 Ibid.
- 7 World Report on Violence and Health. WHO, 2002.

Bab 3. Intervensi GBV dalam masa darurat kemanusiaan

Matriks dalam Bab 3 adalah pengenalan dari intervensi penting yang direkomendasikan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual dalam keadaan darurat. Ini adalah alat yang berguna untuk membantu dalam perencanaan dan koordinasi.

Baca “Cara Menggunakan Panduan” pada Bab 1 (halaman ..) untuk keterangan lebih lengkap.

	Fungsi-fungsi dan sektor	Kesiapan Menangani Keadaan Darurat
1	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menegakkan hak asasi manusia dan tanggung jawab • Mengenali dan mendaftar rekan-rekan kerja dan focal point pencegahan kekerasan seksual • Menentukan mekanisme koordinasi dan aturan kerja yang baik sebagai komponen utama untuk persiapan perencanaan dan pelaksanaan proyek • Memberi advokasi untuk pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender pada setiap tingkatan tindakan kemanusiaan • Mengintegrasikan program pencegahan Kekerasan Berbasis Gender ke dalam rencana-rencana persiapan dan kemungkinan-kemungkinan lain • Mengkoordinasi pelatihan pencegahan Kekerasan Berbasis Gender • Memasukkan kegiatan pencegahan Kekerasan Berbasis Gender ke dalam strategi dan pertimbangan antar badan-badan yang terlibat • Mengenali dan mengarahkan sumber daya
2.	Penilaian dan pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau data yang ada tentang sifat dasar, lingkup dan tingkat Kekerasan Berbasis Gender • Melakukan analisa kemampuan dan situasi dan mengenali kebiasaan-kebiasaan baik di dalam masyarakat • Mengembangkan strategi, indikasi-indikasi dan alat untuk pemantauan dan evaluasi
3.	Perlindungan (hukum, sosial dan fisik)	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau hukum nasional, kebijakan dan realita penegakan hukum dalam memberikan perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender • Mengenali prioritas dan mengembangkan strategi untuk keamanan dan pencegahan terjadinya kekerasan • Mendorong adanya ratifikasi, kepatuhan dan pelaksanaan efektif dari keputusan-keputusan internasional • Menegakkan hak asasi manusia, hukum kemanusiaan internasional dan kebiasaan-kebiasaan baik • Membangun mekanisme untuk memantau, pelaporan dan mencari ganti rugi untuk Kekerasan Berbasis Gender dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya • Melatih seluruh staf menurut standar internasional

Pencegahan dan Penanganan Minimum (dilakukan saat keadaan darurat)	Pencegahan dan Penanganan Menyeluruh (Tahap stabilisasi)
1.1 Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada rekan-rekan kerja 1.2 Memberikan advokasi dan menggalang dana 1.3 Memastikan bahwa standar-standar Sphere tersebar luas dan dipatuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Meneruskan penggalangan dana • Menyerahkan koordinasi kepada mitra lokal • Mengintegrasikan kegiatan pencegahan kekerasan gender yang menyeluruh ke dalam program-program nasional • Memperkuat jaringan • Meningkatkan pertukaran informasi • Membangun kemampuan (sumber daya manusia) • Mengikutsertakan pemerintah dan badan-badan bukan pemerintah di dalam mekanisme koordinasi • Melibatkan komunitas di dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender.
2.1 Melakukan analisa situasi cepat (rapid situation analysis) yang terkoordinasi 2.2 Memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan database rahasia yang menyeluruh • Melakukan analisa situasi yang menyeluruh • Memantau dan mengevaluasi program-program pencegahan Kekerasan Berbasis Gender, mempekerjakan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang seimbang, menerapkan Kode Etik • Meninjau data mengenai tindakan-tindakan pencegahan, kasus-kasus, kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan, keputusan hukum dan struktur sosial pendukung • Menilai dan menggunakan data untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan
3.1 Membuat penilaian tentang keamanan dan mendefinisikan strategi perlindungan 3.2 Mempersiapkan keamanan sesuai kebutuhan 3.3 Mengadvokasi untuk pelaksanaan dan kepatuhan kepada keputusan-keputusan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas cakupan kerja pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender • Mengadakan bantuan teknik bagi sistem peradilan dan pengadilan kriminal menuju reformasi dan penerapan efektif hukum sesuai dengan standar internasional • Memperkuat kapasitas nasional untuk memantau dan mencari ganti rugi untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia/hukum kemanusiaan internasional • Mendorong ratifikasi keputusan-keputusan internasional dan mengadvokasi untuk penerapan penuh dan efektif • Memastikan bahwa Kekerasan Berbasis Gender ditangani dalam mekanisme yang terpercaya • Memastikan bahwa program-program demobilisasi, reintegrasi dan rehabilitasi juga mengikutsertakan perempuan dan anak-anak dari pihak-pihak yang sedang bertikai • Memastikan bahwa program-program reintegrasi dan rehabilitasi mengikutsertakan orang yang selamat dari Kekerasan Berbasis Gender dan anak-anak yang lahir dari kasus perkosaan • Mengadakan pelatihan untuk sektor-sektor yang berkaitan termasuk pasukan bersenjata, hakim dan pengacara, petugas kesehatan dan penyedia pelayanan

	Fungsi-fungsi dan sektor	Kesiapan dalam Menghadapi Keadaan Darurat
4.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa Buletin SG dibagikan kepada seluruh staf dan mitra kerja untuk mendapat pelatihan yang dibutuhkan • Memberi pelatihan kepada staf mengenai masalah-masalah kesetaraan Gender, Kekerasan Berbasis Gender dan prinsip-prinsip acuan, dan standar hukum internasional • Membangun mekanisme pengaduan dan strategi penyelidikan • Memperkecil risiko eksploitasi seksual dan penganiayaan (SEA) terhadap komunitas yang dituju oleh pekerja kemanusiaan dan pasukan perdamaian
5.	Air dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi pelatihan kepada staf dan komisi-komisi WATSAN komunitas mengenai penyediaan air dan fasilitas kebersihan lingkungan
6.	Ketersediaan Makanan dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi pelatihan kepada staf dan panitia pengadaan makanan komunitas mengenai prosedur distribusi makanan • Melakukan perencanaan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan lain (contingency planning) • Merancang pengadaan
7.	Tempat penampungan dan Perencanaan Tempat dan Barang-barang Kebutuhan bukan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi pelatihan kepada staf dan kelompok-kelompok masyarakat mengenai prosedur distribusi tempat penampungan/perencanaan tempat dan barang-barang bukan makanan • Memastikan keamanan dari tempat-tempat tersebut dan lokasi-lokasi sensitif di dalam area tersebut • Merencanakan pembagian fasilitas tempat penampungan kepada orang yang selamat/korban Kekerasan Berbasis Gender
8.	Kesehatan dan Pelayanan Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan pelayanan yang ada dan kebiasaan-kebiasaan • Menyesuaikan/mengembangkan/menyebarkan kebijakan-kebijakan dan protocol-protocol • Merancang dan mengadakan suplai obat-obatan dan RH • Memberi pelatihan kepada staf mengenai perawatan kesehatan untuk Kekerasan Berbasis Gender, konsultasi, mekanisme yang tersedia dan mengenai hak asasi manusia • Memasukkan program-program pencegahan Kekerasan Berbasis Gender ke dalam perencanaan darurat kesehatan dan pelayanan komunitas
9.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan pilihan pendidikan bagi anak-anak lelaki dan perempuan • Mengenali dan melatih guru-guru mengenai Kekerasan Berbasis Gender
10.	Informasi, Pendidikan, Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyertakan perempuan, orang muda dan laki-laki dalam penyampaian pesan-pesan yang sesuai dengan budaya setempat menggunakan bahasa lokal • Memastikan penggunaan alat komunikasi yang sesuai dalam kampanye untuk memberi penyadaran adanya Kekerasan Berbasis Gender

Pencegahan dan Penanganan Minimum (dilakukan saat keadaan darurat)	Pencegahan dan Penanganan Menyeluruh (Tahap stabilisasi)
4.1 Merekrut staf dengan cara yang dapat menghindari terjadinya SEA 4.2 Menyebarkan dan memberitahu semua mitra kerja tentang adanya kode etik 4.3 Menerapkan mekanisme pengaduan yang rahasia 4.4 Menerapkan jaringan grup pekerja SEA	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau seberapa efektif mekanisme pengaduan dan melakukan perubahan bila perlu • Melembagakan pelatihan mengenai SEA untuk semua staf, termasuk pasukan penjaga perdamaian
5.1 Menerapkan program-program pengadaan air/ kebersihan lingkungan (water and sanitation/WATSAN) yang aman	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penilaian untuk melihat masalah-masalah terkait dengan gender yang berhubungan dengan pengadaan air dan kebersihan lingkungan • Memastikan keterwakilan perempuan di panitia-panitia WATSAN
6.1 Menerapkan program-program ketersediaan makanan dan gizi yang aman	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan tingkat gizi untuk melihat masalah-masalah terkait dengan gender yang berhubungan dengan ketersediaan makanan dan gizi
7.1 Menerapkan program-program aman untuk penentuan lokasi dan tempat penampungan 7.2 Memastikan bahwa orang yang selamat/korban kekerasan seksual mendapat tempat penampungan yang aman 7.3 Menerapkan strategi yang aman untuk penyimpanan bahan bakar 7.4 Menyediakan perlengkapan sanitasi untuk perempuan dan anak-anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan untuk melihat adanya masalah-masalah terkait dengan gender berhubungan dengan tempat penampungan dan lokasi tempat desain
8.1 Memastikan ketersediaan akses bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 8.2 Menyediakan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kekerasan seksual 8.3 Menyediakan dukungan psikologis dan sosial berbasis komunitas untuk orang yang selamat/korban	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengobatan dan perawatan kesehatan bagi orang yang selamat/korban • Membangun atau memperbaiki protokol-protokol untuk pengumpulan bukti kedokteran hukum • Mengintegrasikan manajemen kesehatan pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dengan struktur sistem kesehatan yang ada, kebijakan-kebijakan nasional, program-program dan kurikulum • Melanjutkan pelatihan dan dukungan kepada staf kesehatan • Melakukan penilaian secara berkala mengenai kualitas perawatan kesehatan • Memberi dukungan kepada upaya-upaya berbasis komunitas yang mendukung orang yang selamat/korban dan anak-anak mereka • Secara aktif mengikutsertakan laki-laki dalam upaya untuk mencegah Kekerasan Berbasis Gender • Menargetkan program-program yang mendatangkan penghasilan bagi perempuan dan anak-anak perempuan
9.1 Memastikan ketersediaan akses anak-anak perempuan dan lelaki kepada pendidikan yang aman	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan Kekerasan Berbasis Gender ke dalam pelatihan mengenai ketrampilan hidup kepada para guru, anak-anak perempuan dan lelaki dalam konteks pendidikan • Membangun mekanisme pencegahan dan penanganan SEA dalam konteks pendidikan
10.1 Memberi pengetahuan mengenai kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan kepada komunitas 10.2 Menyebarkan informasi mengenai Hukum Kemanusiaan Internasional kepada pihak bersenjata	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan IEC melalui saluran yang berbeda • Mendukung kelompok perempuan dan partisipasi laki-laki untuk memperkuat program-program penjangkauan • Menerapkan program-program komunikasi perubahan perilaku

Bab 4. Lembar Tindakan untuk Pencegahan dan Penanganan Minimum

1. Koordinasi

Fungsi lintas sektor

Intervensi Pencegahan dan Penanganan Minimum

- 1.1 Membangun mekanisme koordinasi dan mengorientasi mitra
- 1.2 Memberi advokasi dan menggalang dana
- 1.3 Memastikan standar-standar setempat (sphere standards) tersebarluaskan dan dipatuhi

LEMBAR TINDAKAN

1.1 Membangun mekanisme koordinasi dan mengorientasi mitra

Fungsi : Koordinasi

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Pencegahan dan penanganan efektif terhadap kekerasan seksual mensyaratkan tindakan terkoordinasi multisektoral di antara, setidaknya, pekerja kesehatan dan pelayanan sosial, hukum, hak asasi manusia, dan sektor keamanan dan komunitas. Tanggung jawab koordinasi umum dari pendekatan multisektoral meliputi

- Perencanaan strategi
- Pengumpulan data dan menyusun informasi
- Mengerahkan sumber daya manusia dan memastikan pembagian tanggung jawab
- Menyusun divisi pekerjaan yang fungsional
- Menyusun dan mempertahankan tindakan efektif untuk pencegahan maupun penanganan
- Memastikan adanya kepemimpinan

Kegiatan koordinasi secara khusus termasuk

- Pertukaran informasi mengenai sumber-sumber, panduan dan bahan-bahan lain
- Pertukaran data tentang kasus-kasus kekerasan seksual tanpa mengidentifikasi korban
- Mendiskusikan dan mencari penyelesaian masalah tentang kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan
- Berkolaborasi memantau dan mengadakan evaluasi
- Melanjutkan program-program dan pembangunan kebijakan

Membangun mekanisme koordinasi untuk kekerasan seksual dalam keadaan darurat akan membantu untuk memastikan adanya tindakan yang lebih bertanggung jawab dan responsif mulai dari tahap awal keadaan darurat sampai ke tahap lebih stabil dan seterusnya. Tujuan dasar dari pengkoordinasian tindakan adalah untuk menyediakan pelayanan yang dapat diperoleh semua orang, cepat, rahasia dan layak bagi orang yang selamat/korban sesuai dengan prinsip-prinsip acuan dan agar mekanisme-mekanisme berjalan dengan baik untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Dalam setiap situasi kemanusiaan, sejumlah kelompok-kelompok kerja diciptakan untuk memastikan bahwa semua pekerja untuk sektor tertentu bekerja di bawah koordinasi dan juga agar standar-standar internasional diikuti. Karena pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melibatkan aktor mewakili berbagai sektor, kelompok-kelompok kerja multisektoral antar-organisasi untuk pencegahan kekerasan berbasis gender harus diciptakan pada tingkat lokal, wilayah dan nasional, yang bertemu secara berkala. Kelompok-kelompok kerja ini harus melibatkan

aktor multisektoral dari komunitas, pemerintah, PBB, LSM internasional dan nasional, penyumbang, dan/atau lainnya. Partisipasi aktif komunitas – perempuan dan laki-laki – harus ada dalam setiap tingkatan koordinasi.

Badan koordinator harus ditunjuk untuk pembuatan program pencegahan Kekerasan Berbasis Gender. Pengaturan kerjasama koordinasi diantara dua organisasi (misalnya, PBB dan LSM internasional atau lokal) direkomendasikan, dan harus dibentuk pada tahap awal keadaan darurat. Badan koordinator bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi dalam kelompok kerja pencegahan Kekerasan Berbasis Gender, memimpin rapat-rapat berkala, dan mendorong penggunaan metode lain untuk koordinasi dan pertukaran informasi di antara aktor lainnya. Idealnya badan koordinator memiliki keahlian mengenai pembuatan program pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan dapat menunjuk staf senior untuk mengawasi koordinasi dalam program-program pencegahan Kekerasan Berbasis Gender. Acuan kerja untuk badan koordinator harus dengan jelas didefinisikan dan disetujui oleh seluruh anggota kelompok kerja. Harus dicatat bahwa dalam situasi ideal, badan pemerintah akan menjadi badan koordinator. Begitupun, dalam tahap awal keadaan darurat kemanusiaan banyak pemerintahan tidak memiliki kemampuan untuk secara cepat dan efektif mengkoordinasi tindakan dengan skala yang begitu luas.

Tindakan-tindakan utama

Dalam setiap keadaan darurat, ada sekelompok organisasi yang bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan kemanusiaan, biasanya dengan menunjuk satu organisasi atau individu untuk melakukan koordinasi menyeluruh dan memimpin. Kelompok koordinator ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan berikut terlaksana dengan baik.

1. Membentuk kelompok kerja multisektoral antar-organisasi untuk pencegahan Kekerasan Berbasis Gender pada tingkat nasional, wilayah dan lokal
 - Kelompok-kelompok kerja harus terdiri dari focal points (lihat di bawah) dan aktor multisektoral kunci lainnya baik dari komunitas, pemerintah, PBB, LSM internasional dan nasional, penyumbang, dan lainnya yang terlibat.
 - Kelompok-kelompok kerja harus inklusif, tetapi juga harus cukup kecil agar pertukaran informasi, rencana, dan pengambilan tindakan koordinasi secara cepat dapat efektif

- Anggota harus dapat mewakili kegiatan-kegiatan sektor mereka dan/atau organisasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan ikut serta sebagai anggota aktif kelompok kerja.
- Dalam keadaan darurat, staf jangka-pendek atau “pembuka jalan” adalah jumlah yang paling besar di lapangan dan bisa menjadi anggota awal dari kelompok-kelompok kerja pencegahan kekerasan seksual. Dalam situasi seperti ini, kelompok-kelompok kerja harus memberi perhatian untuk memaksimalkan kesinambungan dan sistem pertukaran informasi ketika staf jangka-pendek keluar dan staf baru tiba.

2. Kelompok kerja pencegahan Kekerasan Berbasis Gender tingkat nasional harus memilih badan koordinator, disarankan dua organisasi yang saling bekerja sama. Organisasi-organisasi tersebut bisa PBB, LSM internasional atau nasional, atau badan perwakilan lainnya yang memiliki otoritas.

- Membangun aturan kerja yang jelas untuk badan koordinator yang disetujui oleh seluruh anggota kelompok kerja
- Aturan kerja diabsahkan oleh pimpinan PBB di satu negara (misalnya Koordinator Kemanusiaan, SRSG).

3. Badan koordinator, bekerja sama dengan kelompok-kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang termuat dalam Daftar Tindakan ini terlaksana.

4. Kelompok-kelompok kerja di tingkat nasional, wilayah dan lokal harus membangun metode komunikasi dan koordinasi antara dan inter mereka. Seluruh kelompok-kelompok kerja membuat catatan rapat berisi informasi tanpa mengungkap identitas (tanpa rincian mengenai orang yang selamat/korban) dan membagikan salinannya kepada seluruh kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender. Secara garis besar:

- Kelompok-kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender lokal mendiskusikan rincian dari koordinasi dan pelaksanaan, mengenali masalah dan kebutuhan, penyelesaian masalah, dan menyerahkan masalah kebijakan tingkat nasional kepada kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender tingkat nasional.
- Kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender nasional mendiskusikan pelaksanaan dan koordinasi dari sudut pandang nasional, memberi dukungan, penyelesaian masalah dan kebijakan untuk kelompok-kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender tingkat lokal.

5. Setiap sektor (misalnya kesehatan, pelayanan masyarakat, perlindungan, manajemen markas, hak asasi manusia, hukum/peradilan, keamanan/polisi, dll) mendefinisikan tanggung jawab mereka masing-masing sehubungan dengan pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual, dan bagaimana mereka akan terhubung dengan kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender dan badan koordinator – gunakan panduan sebagai alat.

- Setiap sektor dan organisasi secara berhati-hati dan sadar menentukan focal point yang akan mewakili organisasi dan/atau sektor tersebut dalam mengambil tindakan bagi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (“GBV focal points”).
- Tanggung jawab dari GBV focal points dijelaskan dalam Daftar Tindakan untuk setiap sektor. GBV focal points mewakili sektor-sektor yang berperan aktif dalam kelompok-kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender.

6. Mengembangkan rencana tindakan untuk koordinasi, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Seluruh anggota kelompok-kelompok kerja/organisasi yang berpartisipasi urun saran membuat rencana tindakan, dan semua harus turut berperan aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan mempertahankan semua aktor yang berperan.

- Sumber-sumber utama yang terdaftar pada bagian akhir daftar tindakan ini termasuk informasi rinci mengenai cara membuat rencana tindakan
- Rencana tersebut harus dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh melalui analisa situasi (lihat Daftar Tindakan 2.1, Melakukan analisa situasi cepat terkoordinasi), dan dengan keterlibatan aktif kaum perempuan dalam komunitas tersebut. Rencana tersebut harus meliputi, setidaknya:
 - (1) Membangun “jalan masuk” rahasia dimana orang yang selamat/korban dan komunitas dapat mencari pertolongan sesudah kejadian kekerasan seksual dan/atau membuat laporan kasus.
 - (2) Membuat mekanisme rahasia pengalihan antara dan inter aktor/sektor untuk mempermudah tindakan multisektoral sebagaimana dibutuhkan oleh orang yang selamat/korban.

7. Seluruh aktor sepakat untuk mematuhi prinsip-prinsip acuan untuk meminimalkan gangguan kepada orang yang selamat/korban dan memaksimalkan efisiensi intervensi pencegahan dan penanganan. Prinsip-prinsip acuan tercakup di dalam setiap elemen rencana tindakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan harus meliputi, setidaknya:

- Memastikan keselamatan fisik orang yang selamat/korban dan mereka yang menolongnya
- Menjamin kerahasiaan
- Menghormati keinginan, hak-hak, dan harga diri dari orang yang selamat/korban, dan dipedomani oleh kepolosan seorang anak
- Memastikan tidak adanya diskriminasi

8. Memberikan orientasi kepada seluruh aktor tentang pendekatan multisektoral dan pentingnya koordinasi

dengan mendistribusikan sumber-sumber penting dan bahan-bahan pelatihan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.

- Memastikan bahwa bahan-bahan yang relevan dibagikan kepada komunitas (lihat Daftar Tindakan 10.1, Memberitahu komunitas tentang kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan)
- Setiap aktor yang berperan harus memiliki salinan dari panduan ini dan memahami, setidaknya, Daftar Tindakan 8.3, Menyediakan dukungan psikologis dan sosial berbasis komunitas untuk orang yang selamat/korban. Aktor-aktor ini termasuk perwakilan dari setiap sektor/organisasi yang bisa berhadapan langsung dengan orang yang selamat/korban kekerasan seksual dan/atau terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual tetapi tanggung jawab dan tindakan mereka tidak secara khusus dijelaskan dalam panduan ini.

9. Menyusun daftar-daftar organisasi, focal points, dan pelayanan bagi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Bagikan ke seluruh aktor, termasuk komunitas, dan secara berkala diperbaharui.

10. Membangun rencana pemantauan dan evaluasi. (Lihat Daftar Tindakan 2.2, Kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi).

- Memuat sistem untuk menerima dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan seksual menggunakan formulir laporan kasus yang disepakati. Contoh formulir kasus yang dapat segera digunakan terlampir dalam Panduan SGBV UNHCR, tercantum berikut ini.
- Memastikan bahwa rencana pemantauan dan evaluasi memungkinkan adanya pengumpulan data kasus tanpa identifikasi, tindakan yang dilakukan, dan hasil-hasil dari setiap sektor.
- Semua aktor secara rutin menyerahkan data tanpa nama kepada badan koordinator, yang bertanggung jawab untuk menyatukan data tersebut dan membagikan informasi kepada seluruh aktor.

Bahan-bahan acuan utama

1. Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response. UNHCR, May 2003.
[http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/+4wwBmeMUIECnwwwFqA72ZR0gRfZNtFqr72ZR0gRzFqmRbZAFqA72ZR0gRfZNDzmxwww1FqmRbZ/](http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/+4wwBmeMUIECnwwwFqA72ZR0gRfZNtFqr72ZR0gRzFqmRbZAFqA72ZR0gRfZNDzmxwww1FqmRbZ/.opendoc.pdf) or
http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03.pdf
 - These guidelines are accompanied by a CD-ROM which includes a wide variety of resources.
 - Includes a chapter describing how to establish reporting and referral system.
2. How-To Guide: Monitoring and Evaluating Sexual Gender Violence Programs. UNHCR 2000.
<http://www.rhrc.org/resources/gbv/index.html>
 - Step by step description of establishing inter-organisational reporting and referral procedures.
3. Gender-based Violence: Emerging Issues in Programs Serving Displaced Populations. RHRC, 2002.
<http://www.rhrc.org/resources/gbv/> (available in English, French, Portuguese)
 - Detailed information in text and Lampiran about establishing multisectoral coordination mechanisms including reporting and referral mechanisms.
4. Gender-based violence in populations affected by conflict: A field guide for displaced settings. RHRC, 2005.
<http://www.rhrc.org/pdf/Fact%20Sheet%20for%20the%20Field.pdf>
5. Checklist for Action: Prevention & Response to Gender-based Violence in Displaced Settings. RHRC, 2004.
<http://www.rhrc.org/pdf/Checklist.pdf>
6. Gender-based Violence Tools Manual for Assessment and Program Design, Monitoring, and Evaluation. RHRC, 2004. <http://www.rhrc.org/resources/gbv/>
7. Training Manual, Facilitator's Guide: Multisectoral and Interagency Prevention and Response to Gender-based Violence in Populations Affected by Armed Conflict. RHRC, 2004. <http://www.rhrc.org/resources/gbv/>

LEMBAR TINDAKAN

1.1 Memberikan advokasi dan menggalang dana

Fungsi : Koordinasi

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Pemberian advokasi termasuk berbicara dan menarik perhatian orang terhadap masalah penting, dan mengarahkan para pengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Advokasi kemanusiaan mengurangi penderitaan manusia dengan memberikan kesempatan kepada orang yang selamat/korban, meningkatkan kesadaran tentang masalah tersebut, mendorong dipatuhinya prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum kemanusiaan internasional (IHL), dan mencetuskan tindakan-tindakan kemanusiaan.

Komunitas pekerja kemanusiaan bertanggung jawab untuk memberikan advokasi atas nama komunitas sipil untuk perlindungan mereka dari kekerasan seksual. Kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender memiliki tugas untuk memahami sifat dasar dan tingkatan kekerasan seksual, masalah-masalah dan pengaruh lingkungan yang menyumbang terhadap masalah tersebut, dan pelayanan yang dapat dan/atau tersedia di daerah tersebut. Kelompok-kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada aktor kemanusiaan dan penyumbang dan memastikan mereka berperan aktif dalam upaya advokasi.

Tindakan-tindakan penting

Badan koordinator pencegahan kekerasan berbasis gender, bersama dengan anggota kelompok-kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender, bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan-tindakan berikut ini. Dalam beberapa situasi, adalah layak dan perlu untuk mendirikan sub-panitia untuk advokasi dan penggalangan dana.

1. Turut serta dalam proses pertimbangan bersama PBB (CAP) dan memasukkan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender multisektoral yang menyeluruh ke dalam dokumen CAP.

2. Memberikan advokasi dimasukkannya kekerasan seksual sebagai salah satu agenda diskusi dalam rapat-rapat kelompok sektor, kelompok-kelompok kerja, kelompok-kelompok manajemen, rapat-rapat pengambilan keputusan, pertemuan para penyumbang, dan rapat-rapat perencanaan dan koordinasi lainnya.

3. Mengenali dan mengklarifikasi sifat dasar dan tingkat kekerasan seksual dan pelayanan yang tersedia di daerah tersebut dengan melakukan analisa situasi. (Lihat Daftar Tindakan 2.1, Melakukan analisa situasi cepat yang terkoordinasi).

4. Mengembangkan rencana tindakan advokasi yang merinci kegiatan-kegiatan khusus yang akan dilakukan, kerangka waktu untuk setiap kegiatan dan organisasi atau mitra mana yang akan bertanggung jawab untuk melakukan satu kegiatan tertentu.

- Menyepakati masalah-masalah penting dalam memberikan advokasi, menggunakan analisa situasi dan informasi lain mengenai kekerasan seksual dalam keadaan darurat sebagai acuan (lihat Bab 1). Merumuskan masalah-masalah penting secara jelas dan singkat. Mengenali perubahan-perubahan yang jelas terlihat. Beberapa contoh pemberian advokasi:
 - Pendanaan untuk program-program kekerasan seksual
 - Memberi perhatian kepada masalah kekerasan seksual (dan oleh siapa)
 - Memperkuat penerapan Kode Etik sehubungan dengan eksploitasi dan penganiayaan seksual
 - Penghentian kekerasan
 - Meningkatkan perlindungan terhadap kaum sipil
 - Kepatuhan kepada IHL
- Menunjuk pihak-pihak yang terlibat
 - Individu-individu dan/atau kelompok dalam komunitas yang bisa memberikan sumbangan langsung kepada intervensi advokasi
 - Organisasi-organisasi yang memiliki pandangan yang sama mengenai masalah-masalah tersebut dan menyatakan diri untuk bergabung dalam satu koalisi untuk memerangi akar masalah. Kenali mitra-mitra ini dan sumbangan khusus mereka yang dapat digunakan dalam kegiatan advokasi.
 - Individu-individu pengambil keputusan atau kelompok-kelompok dengan kekuatan atau kekuasaan untuk membuat perubahan, seperti kelompok-kelompok sektor, kelompok-kelompok kerja, kelompok-kelompok manajemen, rapat-rapat pengambilan keputusan, rapat para penyumbang, dan rapat-rapat koordinasi dan perencanaan lainnya.
- Memilih bentuk pesan yang akan disampaikan kepada setiap pihak yang terlibat. Sesuaikan bentuk pesan untuk tipe-tipe/kelompok-kelompok yang berbeda.
- Kenali metode-metode yang akan digunakan untuk menyampaikan komunikasi kepada tipe-tipe atau kelompok-kelompok yang berbeda. Beberapa contoh:
 - Memberi informasi kepada para pihak (kawan maupun lawan) mengenai masalah tersebut

dengan menyebarkan laporan analisis situasi kekerasan seksual, memberikan pengarahan dan rapat-rapat informasi lainnya. (Lihat Daftar Tindakan 10.1, Memberikan informasi kepada komunitas mengenai kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan).

- Membangun kemitraan/koalisi, memobilisasi mitra untuk mendukung tujuan dan mengambil tindakan
- Melakukan dialog dan negosiasi dengan pihak berlawanan mengenai masalah ini
- Membuat petisi dan melobi pimpinan politik dan pembuat kebijakan
- Memberikan informasi dan bekerjasama dengan media
- Membuat Web page sentral untuk menyebarluaskan informasi, hal-hal baru, pesan-pesan, dll.

5. Menyebarkan laporan secara berkala kepada setiap pihak yang terlibat agar mereka tetap mendapat informasi tentang sifat dasar dan tingkat kekerasan seksual dan bagaimana hal itu ditangani melalui tindakan-tindakan kemanusiaan. (Lihat Daftar Tindakan 2.2, Kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi).

Bahan-bahan acuan utama

1. Technical Guidelines for the Consolidated Appeals Process. www.reliefweb.int/lcap or <http://www.humanitarianinfo.org/iasc/CAtchguide.doc>
Page 21

LEMBAR TINDAKAN

1.1 Memastikan standar-standar setempat (sphere standards) tersebarluaskan dan dipatuhi

Fungsi : Koordinasi

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Piagam Proyek Kemanusiaan Setempat dan Standar Minimum dalam Penanganan Bencana menawarkan acuan bagi badan-badan kemanusiaan untuk meningkatkan keefektifan dan kualitas bantuan kemanusiaan. Batu penjurunya, Piagam Kemanusiaan, menyebutkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan kemanusiaan dan menegakkan hak-hak masyarakat terkena bencana untuk mendapat perlindungan dan bantuan dengan cara yang mendukung mereka tetap hidup dengan harga diri.

Ratusan aktor kemanusiaan, badan-badan internasional, LSM dan lembaga-lembaga donor telah melibatkan diri mereka dalam pelaksanaan perlindungan kemanusiaan dan bantuan menurut standar Sphere. Proyek Sphere menentukan standar bagi sektor-sektor berikut: Persediaan air, Sanitasi, dan Pemeliharaan Higienitas, Ketersediaan Makanan, Gizi, dan Bantuan Makanan, Tempat Penampungan, Perumahan, dan Barang-barang bukan makanan, dan Pelayanan Kesehatan.

Bab 1 dari Sphere menyebutkan bahwa standar pembuatan program adalah penting untuk memberikan bantuan kemanusiaan dengan cara yang menjaga harga diri penerima bantuan. Hal ini termasuk peran serta, penilaian, reaksi, penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, dan kewenangan staf dan manajemen. Sebagai tambahan, tujuh isu pendukung – anak-anak, orang tua, orang cacat, gender, perlindungan, HIV/AIDS, dan lingkungan hidup – dengan relevansi semua sektor telah dilibatkan.

Dalam standar Sphere untuk pelayanan kesehatan adalah “pengawasan atas penyakit tidak menular” standar 2: Kesehatan Reproduksi – masyarakat memiliki akses kepada Paket Pelayanan Awal Minimum (MISP) untuk menangani kebutuhan kesehatan reproduksi mereka. Berdiri sejak 1995 oleh kelompok kerja antar-badan untuk kesehatan reproduksi pengungsi, MISP memiliki lima komponen. Komponen kedua MISP adalah “langkah-langkah yang diambil badan kesehatan untuk mencegah dan mengatasi konsekuensi-konsekuensi dari kekerasan berbasis gender, dalam koordinasi dengan sektor-sektor relevan lainnya, terutama pelayanan pemberian perlindungan dan pelayanan komunitas.” (Lihat Daftar Tindakan 8.1, Memastikan akses bagi kaum perempuan untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar).

Dalam catatan acuan untuk pengawasan penyakit tidak menular standar 2 Sphere:

Pencegahan dan manajemen kekerasan berbasis gender mensyaratkan kolaborasi dan kerjasama antara anggota komunitas dan antara badan-badan. Pelayanan kesehatan harus termasuk manajemen medis untuk korban penganiayaan seksual, konsultasi rahasia, dan pengalihan untuk perawatan yang lebih layak. Pengaturan pemukiman, distribusi barang-barang kebutuhan utama, dan akses ke pelayanan kesehatan dan program-program lain harus dirancang untuk mengurangi potensi kekerasan berbasis gender. Eksploitasi seksual terhadap masyarakat terkena bencana, terutama atas anak-anak dan orang muda, oleh staf badan penyelamat bencana, personel militer, dan lainnya yang memiliki posisi berpengaruh harus secara aktif dicegah dan diatasi. Kode etik harus dibangun dan langkah-langkah disiplin harus dibangun untuk menangani setiap pelanggaran. (Lihat standar kewenangan dan tanggung jawab pekerja kemanusiaan.)

Tindakan-tindakan utama

1. Kelompok-kelompok kerja kekerasan berbasis gender harus menyebarkan informasi mengenai Bab 1 Sphere dan pengawasan penyakit tidak menular standar 2. (Lihat Daftar 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra dan Daftar Tindakan 10.1, Memberikan informasi kepada komunitas mengenai kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan.)

- Dalam konsultasi dengan masyarakat terkena bencana, membangun/menyesuaikan bahan-bahan ke dalam bahasa yang relevan dan tingkat kemampuan baca untuk menyampaikan informasi yang disebut di atas.
- Menyediakan akses untuk memperoleh bahan-bahan informasi tersebut kepada seluruh pihak yang terlibat dan kepada komunitas kemanusiaan yang lebih luas melalui berbagai cara, seperti selebaran, CD, Internet, dlsb.
- Mengadakan sesi pemberian orientasi untuk setiap pihak (aktor kemanusiaan, pasukan perdamaian, anggota komunitas, dsb.) mengenai informasi ini.
- Mempublikasikan informasi yang relevan.

2. Kelompok kerja kekerasan berbasis gender harus memantau kepatuhan kepada standar Sphere mengenai kekerasan seksual, termasuk penganiayaan

dan eksploitasi seksual. Pemantauan ini harus terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi kekerasan seksual. (Lihat Daftar Tindakan 2.2, Kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi dan Daftar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberi orientasi kepada mitra.)

- Menjaga jadwal kerja semua organisasi yang terlibat yang menunjukkan pihak yang telah menerapkan kebijakan-kebijakan sumber daya manusia yang menangani kekerasan dan eksploitasi seksual.
- Menjaga jadwal kerja dari organisasi yang menyediakan pelayanan kesehatan yang menunjukan protokol-protokol dan staf terlatih bekerja untuk menangani kekerasan seksual.
- Menjaga jadwal kerja dari organisasi yang menyediakan pelayanan-pelayanan psikologi bagi orang yang selamat dari kekerasan seksual.

Bahan-bahan acuan utama

1. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. The Sphere Project, Geneva 2004. www.sphereproject.org
2. Inter-agency Field Manual. Reproductive health in refugee situations. UNHCR/WHO/UNFPA. Geneva, 1999. Chapter 2. http://www.rhrc.org/resources/general/5Fieldtools/iafm_menu.htm
3. MISP Fact Sheet. RHRC Consortium, 2003. http://www.rhrc.org/pdf/fs_misp.pdf and checklist

1. Penilaian dan Pemantauan

Fungsi lintas sektor

Intervensi Pencegahan dan Penanganan Minimum

2.1 Melakukan analisa situasi cepat terkoordinasi

2.2 Kegiatan pemantauan dan evaluasi

LEMBAR TINDAKAN

2.1 Melakukan analisa situasi cepat yang terkoordinasi

Fungsi : Penilaian dan pemantauan

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Tantangan terbesar dalam menangani kekerasan seksual adalah ketiadaan data mengenai sifat dasar dan tingkat masalah. Kekerasan seksual biasanya tidak seluruhnya dilaporkan bahkan di situasi yang aman dan stabil. Selama keadaan darurat, hampir tidak mungkin tersedianya data yang terpercaya mengenai kekerasan seksual. Dampak dari kekerasan senjata dan skala kejahatan hak asasi manusia, termasuk penggunaan perkosaan di masa perang, seringkali dimanipulasi untuk tujuan politik oleh berbagai pihak yang terlibat di dalam konflik. Dalam beberapa kasus, bisa ditemukan data terpercaya dari organisasi-organisasi hak asasi manusia. Tetapi dalam banyak kasus, perencanaan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan bukti-bukti yang terkumpulkan dari cerita-cerita banyak orang.

Analisa situasi adalah kesempatan untuk mengumpulkan informasi mengenai tipe-tipe dan tingkat kekerasan seksual yang dialami oleh komunitas. Analisis ini juga dapat membantu untuk mengenali kebijakan-kebijakan, perilaku, dan tindakan-tindakan dari aktor-aktor kunci sektor kesehatan, psikologis, keamanan, hak asasi manusia dan peradilan di dalam komunitas. Analisa situasi dapat menjadi bentuk intervensi, karena dapat memulai diskusi publik mengenai kekerasan seksual, menumbuhkan kesadaran, dan membuka dialog antara aktor-aktor kunci dan di dalam komunitas.

Selama tahap awal dari keadaan darurat, bahkan ketika masyarakat sedang bergerak dan daerah tersebut sedang tidak aman, informasi dasar tentang sifat dasar dan tingkat kekerasan informasi dapat dikumpulkan. Sebagai tambahan, harus ada inventori pelayanan yang ada dan identifikasi kesenjangan pelayanan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Selama masa darurat, banyak penilaian dilakukan oleh organisasi kemanusiaan, para penyumbang, dan badan-badan pemerintahan. Penilaian-penilaian tersebut harus memasukkan informasi mengenai kekerasan seksual, terlepas dari kepentingan sektor atau organisasi, dan harus dibagi dengan kelompok-kelompok kerja kekerasan berbasis gender. Ini bisa mencegah duplikasi penilaian dan wawancara berulang dengan komunitas.

Disarankan penilaian periodik dilakukan di kemudian hari, menggunakan alat dan metode yang sama, untuk mengenali perubahan-perubahan dalam lingkungan dan menyesuaikan tindakan-tindakan.

Tindakan-tindakan utama

1. Kelompok kerja kekerasan berbasis gender harus memastikan bahwa analisa situasi mengenai kekerasan seksual dilakukan.

- Memasukkan masalah-masalah berkaitan dengan kekerasan seksual ke dalam setiap penilaian dilakukan oleh seluruh organisasi yang terlibat.
- Membuat informasi yang relevan dari penilaian mengenai kebutuhan yang telah dilakukan, terlepas dari apakah informasi tersebut secara khusus mencakup kekerasan seksual.

2. Menggunakan alat analisa yang telah purna dan telah teruji di lapangan sebagai panduan (lihat bahan-bahan acuan di bawah), kumpulkan dan susun informasi berhubungan dengan sifat dasar dan tingkat kekerasan seksual; kebijakan-kebijakan, perilaku, dan kegiatan aktor multisektoral; dan pelayanan pencegahan/penanganan yang ada serta kesenjangannya. Informasi harus meliputi:

- Informasi demografis, termasuk data kelompok umur dan kelamin
- Penjelasan tentang pergerakan masyarakat (untuk memahami risiko kekerasan seksual)
- Penjelasan tentang wilayah, organisasi yang ada, dan tipe-tipe pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung
- Pengenalan tentang kekerasan seksual (masyarakat yang berada di bawah risiko yang lebih tinggi, data yang tersedia mengenai kasus-kasus kekerasan seksual)
- Keamanan nasional dan badan-badan hukum (hukum, definisi legal, prosedur polisi, prosedur peradilan, prosedur sipil)
- Sistem-sistem komunitas bagi peradilan tradisional atau hukum adat
- Tindakan pencegahan dan penanganan multisektor yang ada (koordinasi, mekanisme pengalihan, psikososial, kesehatan, keamanan/polisi, perlindungan/keadilan hukum)

3. Mengumpulkan informasi sesuai prinsip-prinsip panduan untuk keselamatan, kerahasiaan, penghormatan dan non-diskriminasi (lihat Daftar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra), dan ingat bahwa sifat sensitif dari masalah ini di dalam komunitas dan di antara penyedia pelayanan (Bab 1).

- Metode untuk mengumpulkan informasi harus melibatkan komunitas dan dapat memasukkan wawancara semistruktur, kunjungan lapangan, dan observasi lingkungan.
- Sumber kedua informasi yang berguna termasuk penilaian kebutuhan-kebutuhan yang ada, laporan-laporan dan data yang tersedia

- berhubungan dengan kekerasan seksual.
 - Menggunakan teknik-teknik yang menguntungkan daripada kepercayaan komunitas yang terasing dan individu, memadukan sensitivitas budaya dan sangat berhati-hati dalam mendiskusikan topik yang sensitif.
 - Memastikan ketiadaan nama dan keselamatan dari sumber informasi.
 - Menugaskan pewawancara dan penerjemah berkelamin sama
 - Pengumpulan informasi secara ideal dilakukan oleh tim multidisipliner.
4. Dokumentasikan temuan-temuan analisis situasi di dalam laporan dan disebarluaskan kepada seluruh aktor, termasuk komunitas dan para penyumbang. Menggunakan laporan analisis situasi sebagai sumber dan panduan bagi pembentukan kerangka kerja dan rencana tindakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. (Lihat Daftar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberi orientasi kepada mitra dan 1.2, Pemberian advokasi dan penggalangan dana).

Bahan-bahan acuan utama

1. Gender-Based Violence Tools Manual for Assessment & Program Design, Monitoring & Evaluation. RHRC Consortium, 2004. Situation Analysis Guidelines, pages 19-50.
<http://www.rhrc.org/resources/gbv/index.html>
2. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004. Initial Assessment, pages 29-33. The Sphere project.
<http://www.sphereproject.org/handbook/index.html>
3. Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons. Guidelines for Prevention and Response. UNHCR, May 2003.
http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03.pdf
4. According to Need? Needs Assessment and Decision-Making in the Humanitarian Sector. Humanitarian Policy Group (HPG), 2003.
<http://www.odi.org.uk/hpg/papers/hpgreport15.pdf>
5. Reproductive Health During Conflict and Displacement. A guide for programme managers. WHO, 2000.
<http://www.who.int/reproductivehealth/publications>
6. Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict. An ICRC Guidance Document. ICRC, 2004.
<http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList74/888F718CF7575CB4C1256E4B004D0576>

LEMBAR TINDAKAN

2.2 Kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi

Fungsi : Penilaian dan pemantauan

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Pemantauan dan evaluasi adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berhubungan diperlukan untuk meninjau dan menganalisis keefektifan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pemantauan adalah peninjauan yang dilakukan secara konsisten terhadap tindakan-tindakan pencegahan dan penanganan untuk melihat apakah telah berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi adalah analisis mengenai relevansi, keefektifan dan efisiensi dari strategi-strategi pencegahan dan penanganan multisektoral. Proses pemantauan dan evaluasi (M&E) dapat memberi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah kita melakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan? Apakah kita mencapai apa yang kita katakan akan kita capai? Apakah disain intervensi kita baik? Bagaimana memperbaikinya? Apakah konsekuensi yang tidak diperhitungkan? Apakah program kita menghasilkan perubahan-perubahan yang terlihat/diinginkan?

M&E harus diintegrasikan ke dalam rencana tindakan yang dibuat oleh kelompok kerja kekerasan berbasis gender. (Lihat Daftar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra.) Selama tahap awal keadaan darurat, M&E dari tindakan kekerasan seksual harus mencakup, setidaknya, pemantauan penerapan dari tindakan pencegahan dan penanganan minimum seperti yang tercantum dalam Panduan GBV. Ini melibatkan pembentukan indikator dan sistem demi konsistensi pemantauan, peninjauan dan analisis indikator tersebut.

Kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender harus berperan aktif dalam kegiatan M&E, memastikan bahwa kedua hal tersebut ada dan informasi dari kegiatan pemantauan tersebut tersusun, teranalisa, dan digunakan untuk memperkuat tindakan pencegahan dan penanganan. Badan koordinator GBV bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengumpulan secara berkala dan pelaporan data kasus kekerasan seksual dan bahwa laporan tersebut didiskusikan dan dianalisis oleh kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender dan disebarluaskan kepada aktor-aktor kunci, termasuk komunitas dan pemerintahan lokal. Dengan tetap menjaga kerahasiaan, setiap dan seluruh informasi yang dapat diidentifikasi dari orang yang selamat/korban dan keluarga atau pelaku harus dikeluarkan dari laporan publik.

Dampak yang diinginkan dari intervensi kekerasan seksual adalah untuk mengurangi jumlah kasus

kekerasan seksual. Ini adalah tujuan jangka panjang (dapat diobservasi setelah beberapa tahun pembuatan program) yang terukur bila pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dibuat pada tahap awal pembuatan program. Pemantauan data dari awal akan menjadi informasi dasar yang kemudian dapat digunakan sebagai pembandingan dalam evaluasi keefektifan dan, pada akhirnya, dampak.

Tindakan-tindakan utama

1. Memantau pelaksanaan dari tindakan-tindakan utama dalam pencegahan dan penanganan minimum kekerasan seksual untuk 10 fungsi/sektor yang tercantum dalam Daftar Tindakan Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender ini. Kelompok kerja GBV harus sepakat tentang kekerapan dan metode dalam pemantauan dan pendokumentasian kemajuan pelaksanaan program.

- Dalam tahap paling awal keadaan darurat ketika tindakan pencegahan dan penanganan minimum akan dimulai, harus ada pemantauan kemajuan setiap minggu atau lebih sering untuk memastikan pekerjaan cepat dimulai dan memusatkan pada kendala atau penundaan. Ketika tindakan-tindakan minimum telah berlangsung, kemajuan dapat dipantau setiap bulan, tetap memusatkan pada kendala atau penundaan, dan tetap demikian sehingga seluruh tindakan utama telah dilaksanakan.
- Lihat Lampiran 2 sebagai contoh format laporan sederhana yang dapat digunakan.

2. Membuat indikator untuk memantau setiap dari 10 fungsi/sektor.

- Indikator dan sistem untuk pemantauan yang konsisten harus dibuat bersama-sama dengan tindakan utama. Dengan kata lain, pemantauan harus terintegrasi dengan tindakan utama seperti yang dijelaskan dalam Panduan GBV ini.
- Harus ada setidaknya satu indikator untuk setiap fungsi/sektor.
- Indikator dapat diambil dari contoh berikut dan/atau dari contoh-contoh dalam bahan-bahan acuan utama (links below).

CONTOH-CONTOH INDIKATOR	
Fungsi/sektor	Contoh indikator
Koordinasi	Prosedur-prosedur multisektoral dan antarbahan, kegiatan-kegiatan, dan bentuk-bentuk laporan tertulis dan disetujui oleh semua aktor
	Perimbangan dari jumlah aktor utama yang berperan dalam rapat-rapat berkala kelompok kerja GBV
Penilaian dan Pemantauan	Laporan-laporan kasus kekerasan seksual yang dikumpulkan setiap bulan (data tanpa nama), dianalisa dan dibagi dengan semua pihak terkait
Perlindungan	Mekanisme keamanan dilembagakan berdasarkan tempat dimana kasus-kasus muncul, dan memantau keefektifannya
	Perimbangan dari kasus-kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dimana orang yang selamat/korban (atau orangtua dalam kasus anak) memilih jalan hukum
Sumber Daya Manusia	Perimbangan kasus SEA yang dilaporkan yang berujung pada penuntutan dan/atau dipecatnya seorang staf kemanusiaan
Air dan Sanitasi	Perimbangan aktor-aktor yang membuat kode etik Jumlah kamar kecil yang dibangun untuk laki-laki dan perempuan dan memiliki kunci (standar Sphere)
Ketersediaan Makanan dan Gizi	Perimbangan makanan yang dibagi untuk perempuan
	Perimbangan perempuan terlibat dalam panitia pembagian makanan
Tempat penampungan & perencanaan tempat & barang-barang bukan makanan	Perencanaan berbasis komunitas untuk penyediaan tempat penampungan yang aman bagi orang yang selamat/korban terselenggarakan dan digunakan secara efektif Jumlah benda-benda sanitary yang cukup untuk perempuan dan anak-anak perempuan
Kesehatan dan Pelayanan Komunitas	Orang yang selamat/korban kekerasan seksual menerima perawatan kesehatan tepat pada waktunya dan layak sesuai dengan protokol kesehatan yang disepakati
	Perimbangan staf kesehatan yang terlatih di bidang kekerasan seksual, manajemen kesehatan dan dukungan
	Perimbangan pekerja berasal dari komunitas yang telah dilatih mengenai dukungan psikososial untuk korban kekerasan seksual
Pendidikan	Persentase guru-guru yang menandatangani kode etik
IEC	Jumlah salinan daftar sumber-sumber dalam bahasa (-bahasa) lokal dibagikan ke komunitas
	Perimbangan bahan-bahan IEC menggunakan pesan-pesan verbal atau visual (agar dapat dipahami orang yang buta huruf)

3. Menggabungkan data mengenai kasus kekerasan seksual yang dilaporkan (lihat Lembar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra) ke dalam laporan, sehingga laporan tersebut tidak mencantumkan informasi tentang identitas orang yang selamat/korban atau pelaku.

- Menggabung laporan secara berkala dan konsisten
- Meninjau dan membuat analisis data kasus di dalam rapat-rapat kelompok kerja GBV, dan menggunakan informasi tersebut untuk memperkuat tindakan-tindakan pencegahan dan penanganan. Bandingkan setiap informasi secara berkala, menemukan gejala, masalah, pokok persoalan, keberhasilan, dll.
- Membagikan laporan kepada pihak-pihak terkait yang penting, termasuk komunitas dan pemerintah lokal.
- Menggagas rapat-rapat komunitas untuk mendiskusikan informasi dan strategi untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan; memastikan input dan peran serta aktif perempuan dan anak-anak perempuan.

Bahan-bahan acuan utama

1. Gender-based Violence Tools Manual For Assessment & Program Design, Monitoring & Evaluation in Conflict-affected Settings. RHRC Consortium, 2003.
<http://www.rhrc.org/resources/gbv/> Sample indicators on pages 177-178.

2. Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response. UNHCR, 2003.
Sample monitoring tools in Chapter 7.

3. Inter-agency field manual. Reproductive health in refugee situations. UNHCR/WHO/UNFPA, 1999.
<http://www.unfpa.org/emergencies/manual/>
Sample indicators in Chapters 2, 4, and 9.

3. Perlindungan

Fungsi pendukung dan kegiatan-kegiatan sektor

Intervensi pencegahan dan penanganan minimum

- 3.1 Penilaian keamanan dan menentukan strategi perlindungan
- 3.2 Menyediakan keamanan sesuai kebutuhan
- 3.3 Memberikan advokasi agar instrumen internasional dipatuhi dan diterapkan

LEMBAR TINDAKAN

3.1 Penilaian keamanan dan menentukan strategi perlindungan

Sektor/Fungsi: Perlindungan

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Perlindungan secara umum diartikan sebagai konsep yang mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghormatan penuh atas hak-hak individu menurut isi dan jiwa dari hukum tentang hak asasi manusia, pengungsi dan hukum kemanusiaan. Perlindungan bisa berarti mengeluarkan individu-individu atau kelompok dari risiko, ancaman, atau situasi kekerasan yang dapat secara negatif mempengaruhi hak dasar manusia dan kebebasan, atau mempengaruhi sumber kekerasan agar mengurangi atau menghentikan kekerasan. Hal ini dapat dicapai melalui pemeliharaan dan menyumbang kepada terbentuknya suatu lingkungan – politik, sosial, budaya, kelembagaan, dan hukum – yang kondusif untuk penerapan dan penghormatan kepada kemerdekaan dan hak asasi manusia yang mendasar secara berkesinambungan.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan mendapat perhatian tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui penciptaan kesetaraan gender dan pengakuan terhadap kapasitas perempuan, hak mereka untuk berperan dalam pengambilan keputusan, dan sumbangan mereka terhadap manajemen dan perubahan bentuk konflik. Pada akhirnya keputusan tentang pilihan perlindungan terbaik harus berada di tangan orang/kelompok yang terancam, menurut pertimbangan konsultatif mengenai situasi mereka yang dilakukan secara hati-hati dan partisipatif. Pendekatan ini adalah unsur utama dari setiap strategi perlindungan.

Strategi perlindungan harus mengakui bahwa tanggung jawab utama untuk melindungi kaum sipil terletak pada negara. Namun, dalam beberapa situasi, negara-negara diketahui melakukan, atau terlibat dalam, kekerasan seksual terhadap kaum sipil. Membuat dan memaksa negara-negara dan aktor lain bertanggung jawab atas pelaksanaan beberapa instrumen hak asasi manusia, pengungsi dan instrumen kemanusiaan, adalah aspek penting dari strategi perlindungan. Rencana advokasi yang matang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan dari strategi perlindungan. (Lihat Lembar Tindakan 1.2, Memberikan advokasi dan menggalang dana dan 10.2, Menyebarkan informasi mengenai IHL kepada pihak bersenjata). Namun, penting untuk diingat bahwa penunjukan pemegang tanggung jawab utama untuk perlindungan tidak serta merta menghilangkan peran kritis dari pekerja kemanusiaan.

Tindakan-tindakan utama

Berikut ini adalah tindakan perlindungan pendukung yang dapat diterapkan ke dalam sektor perlindungan dan organisasi kemanusiaan lainnya. Kelompok kerja GBV menunjuk focal points agar terlibat secara aktif dalam mengambil tindakan-tindakan berikut dan melaporkan hasilnya.

1. Mengenali pokok persoalan perlindungan dan keamanan sehubungan dengan kekerasan seksual; ikut serta dalam analisis situasi terkoordinasi seperti tercantum dalam Lembar Tindakan 2.1, Melakukan analisis situasi cepat terkoordinasi.
 - Mengenali area dengan risiko tinggi, misalnya dimana kasus-kasus kekerasan seksual terjadi, dimana perempuan dan anak-anak perempuan merasa aman dan risiko keamanan, dlsb.
 - Mengenali faktor-faktor yang membuat perempuan dan anak-anak berisiko lebih tinggi terhadap gangguan; misalnya tidak adanya hukum dan keteraturan, kesulitan ekonomi, terpisahnya anggota keluarga dan kelompok-kelompok sosial.
 - Mengenali individu-individu yang mungkin menjadi target kekerasan; misalnya anak-anak tidak di bawah pengawasan, rumah tangga yang dikepalai perempuan, perempuan cacat, suku minoritas, dlsb.
 - Menilai penanganan keamanan yang ada dan tindak lanjut hukum dengan segera ketika orang yang selamat/korban melaporkan kasus kepada polisi dan menuntut keadilan hukum, misalnya kehadiran polisi/pasukan pengaman, termasuk personel keamanan perempuan, aksesibilitas kepada tindakan keamanan, kemampuan terlepas dari hukum, dlsb.
 - Mengenali hukum nasional dan kebijakan yang relevan.
 - Mengenali sistem tradisional dalam komunitas untuk pemecahan masalah dan/atau keadilan.
 - Mengenali ketersediaan pelayanan bantuan hukum bagi orang yang selamat/korban.
 - Mengenali aset dan sumber-sumber dalam komunitas, seperti keahlian, pengalaman sebelumnya, penemuan baru, keberanian, dan kepemimpinan efektif, yang dapat memberi sumbangan kepada pengadaan perlindungan/pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
 - Menentukan maksud dari aktor-aktor politik dan militer untuk mengikuti standar hukum internasional (lihat Lembar Tindakan 3.3, Memberikan advokasi kepada pelaksanaan dan kepatuhan terhadap instrumen-instrumen internasional

- dan 10.2, Menyebarluaskan informasi mengenai IHL kepada pihak bersenjata) dan menilai kemungkinan mereka dapat dipengaruhi.
2. Membangun aliansi dan jaringan kontak dalam negeri dengan orang-orang, organisasi, lembaga dan kelompok-kelompok yang dapat memberi sumbangan kepada perlindungan dari kekerasan seksual.
 - Memperluas kontak dalam kelompok kerja GBV
 - Mengikutsertakan polisi, pasukan bersenjata, lembaga hukum, pemimpin-pemimpin tradisional, pemimpin-pemimpin perempuan, dukun tradisional, para diplomat, penyumbang dana, pasukan perdamaian, dlsb.
 3. Bekerjasama dengan pemerintah dan kelompok kerja GBV untuk membangun strategi untuk menghilangkan atau mengurangi kendala dilakukannya penahanan dan penuntutan. Pertimbangan seperti berikut ini:
 - Polisi/keamanan kurang informasi tentang hukum dan prosedur yang relevan.
 - Tidak adanya pelaporan (kepada polisi) oleh orang yang selamat/korban (lihat Bab 1), termasuk kurangnya saksi.
 - Kendala dalam penuntutan, seperti kurangnya hakim, jarak yang jauh ke gedung pengadilan, tidak adanya transportasi dan/atau akomodasi untuk menginap bagi saksi-saksi, dlsb.
 - Kehadiran pasukan perdamaian bisa menjadi kesempatan untuk membangun dan melatih kapasitas dengan pemerintahan lokal.
 4. Membangun sistem untuk menggabung data kasus tanpa nama sehingga kecenderungan-kecenderungan dan pokok-pokok persoalan perlindungan dapat diidentifikasi dan ditangani.
 - Ikut serta dalam tindakan-tindakan dijelaskan dalam Lembar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra, termasuk sistem pelaporan dan pengalihan dan prinsip-prinsip acuan bagi semua aktor.
 - Lembar Tindakan 2.2, Kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi menjelaskan penggabungan dan analisis data tentang kasus kekerasan seksual.
4. Protection Into Practice. Oxfam, 2005. <http://www.womenwarpeace.org/issues/displacement/protectionintopractice.pdf>
 5. Camp Management Toolkit. Norwegian Refugee Project, 2004. http://www.nrc.no/camp/cmt_complete.pdf
 6. Operational Protection Reference Guide. UNHCR, 2005.
 7. Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action. International Alert and Women Waging Peace, 2004.

Bahan-bahan acuan utama

1. Glossary of Humanitarian Terms in Relation to the Protection of Civilians in Armed Conflict. UNOCHA, 2003. <http://ochaonline.un.org/DocView.asp?DocID=572>
2. Aide Mémoire for the Consideration of Issues Pertaining to the Protection of Civilians. UNOCHA, 2004. <http://ochaonline.un.org/DocView.asp?DocID=1327>
3. Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons. UNHCR, 2003. http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03.pdf

LEMBAR TINDAKAN

3.2 Menyediakan keamanan sesuai dengan kebutuhan

Sektor/Fungsi: Perlindungan

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Banyak keadaan darurat diperburuk oleh konflik bersenjata dan kekacauan dan/atau penjarahan dan ketiadaan hukum; perempuan dan anak-anak sipil dalam risiko tinggi mengalami kekerasan, dan dalam beberapa kasus, akses kepada pengungsi tidak diberikan dan staf kemanusiaan diserang. Komunitas internasional memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan bagi komunitas selama masa darurat (termasuk pengungsian), dan bagi personel kemanusiaan. Komunitas internasional juga berkewajiban untuk memastikan ketersediaan tempat bagi komunitas sipil dan kemanusiaan. Pengiriman pasukan perdamaian, pengamat hak asasi manusia, dan lainnya pada umumnya dilakukan untuk meningkatkan keamanan.

Perempuan dan anak-anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan seksual, termasuk langkah-langkah perlindungan dan keamanan dua-arah untuk:

- Mengurangi risiko
- Menangani akar permasalahan dan faktor pendukung lainnya, termasuk pemberian kekebalan hukum

Sangat penting untuk terus menerus menganalisa faktor-faktor risiko dan konsekuensi kekerasan seksual pada setiap kondisi. Jika ketidaksetaraan gender dan diskriminasi adalah akar penyebab kekerasan seksual, berbagai faktor lainnya menentukan tipe dan tingkat kekerasan seksual. Sangat penting untuk memahami faktor-faktor tersebut untuk merancang strategi yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual dan untuk memastikan adanya langkah-langkah perlindungan dan keamanan yang layak untuk menangani kasus-kasus yang dilaporkan dan membantu orang yang selamat.

Pencegahan dan penanganan efektif untuk kekerasan seksual harus melibatkan tindakan multisektoral dan terkoordinasi. Lembar Tindakan 1. Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra, menjelaskan pembuatan kerangka kerja dan rencana, termasuk mekanisme koordinasi dan prinsip-prinsip acuan untuk semua aktor. Tugas khusus, tanggung jawab, dan tindakan-tindakan bagi aktor-aktor keamanan dan perlindungan dijelaskan berikut ini.

Harus diketahui bahwa hanya sedikit orang yang selamat/korban bersedia menerima bantuan dan/atau tindakan dari polisi, pihak keamanan atau personel perlindungan. Aktor-aktor lain bekerja dengan orang

yang selamat/korban (biasanya staf kesehatan atau psikososial) menjadi tidak dapat memperoleh rincian kejadian demi kerahasiaan dan penghormatan kepada pilihan yang diambil orang yang selamat/korban (lihat paragraf berikut yang memuat pengecualian). Hal ini seringkali berakibat pada ketegangan di antara anggota kelompok kerja GBV. Walau demikian, ada beberapa cara untuk menggabungkan data kasus tanpa nama yang tidak mengungkapkan informasi tentang identitas dan data yang menyediakan informasi cukup mengenai kasus-kasus agar personel keamanan dan perlindungan dapat menganalisa informasi dan memperkuat langkah-langkah keamanan.

Hukum nasional di beberapa negara memberikan mandat kepada petugas kesehatan untuk melaporkan kejahatan serius tertentu kepada badan penegak hukum. Dalam beberapa negara, ini berarti bahwa dokter/perawat harus melapor kepada polisi mengenai dugaan kasus perkosaan dilihat dari kacamata medis. Situasi seperti ini merupakan tantangan etis, hukum dan praktis yang harus secara jelas dipahami dan didiskusikan oleh kelompok-kelompok kerja GBV. (Lihat Lembar Tindakan 1.1)

Tindakan-tindakan utama

Tindakan-tindakan berikut ini diterapkan pada sektor keamanan, yaitu, organisasi-organisasi yang bertugas menerapkan program-program keamanan (dalam beberapa kasus, perlindungan). Sektor keamanan mengenali focal point yang secara berkala ikut serta dalam kelompok kerja GBV dan memberikan laporan tentang perkembangan tindakan-tindakan utama dari sektor keamanan. Focal point untuk sektor keamanan berperan dalam fungsi lintas sektor yang dipimpin oleh badan koordinator GBV dan kelompok-kelompok kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Lembar Tindakan untuk Koordinasi, Penilaian dan Pemantauan, Sumber Daya Manusia, dan Informasi pendidikan komunikasi.

1. Mendorong pemerintah untuk memperkuat keamanan, begitu juga hukum dan pengaturan ketertiban di daerah terkena bencana.

- Memastikan bahwa jumlah polisi dan personel keamanan terlatih yang bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan mereka cukup,
- Perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas mereka.

2. Menentukan tujuan keamanan jangka-pendek dan indikator bagi pencegahan dan penanganan minimum bagi kekerasan seksual seperti dijelaskan dalam

Lembar Tindakan 2.2, Kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi.

3. Membuat strategi untuk memperbaiki keamanan, menggabungkan strategi pemantauan terpusat, proaktif di sekitar “titik api” dengan strategi pemantauan yang tidak terus menerus, lebih luas dan berpindah-pindah sehingga memberikan kesan kepada orang-orang yang dilindungi dan orang yang berpotensi melakukan pelanggaran akan kehadiran aktor internasional, seperti seseorang “selalu ada di sekitar kita”. Pertimbangkan strategi berikut ini:

- Program ronda oleh komunitas dan/atau kelompok-kelompok keamanan, sebaiknya mengikutkan anggota masyarakat perempuan dan laki-laki yang dipercaya. Sadari kebutuhan akan pelatihan dan pemantauan untuk menghindari penganiayaan oleh anggota team.
- Patroli keamanan.
- Pusat kegiatan komunitas/perempuan. (Lihat Lembar Tindakan 7.1, Mengadakan perencanaan tempat aman dan program-program penampungan dan 7.2, Memastikan orang yang selamat/korban kekerasan seksual mendapat penampungan yang aman.)
- Kehadiran staf perlindungan internasional secara berkala dan sering di dalam komunitas (penampungan, desa-desa).

4. Bekerja sama dengan polisi/pasukan keamanan dan upayakan tumbuhnya rasa saling percaya antara polisi/pasukan keamanan dengan komunitas.

Beberapa contoh:

- Meningkatkan jumlah polisi perempuan
- Mengadakan pertemuan dan pembagian informasi antara polisi dan komunitas.
- Pemberian informasi mengenai hukum dan perlindungan dari polisi kepada perempuan dan anak-anak perempuan dalam komunitas.
- Hubungan dan komunikasi secara berkala dengan pemerintahan lokal.

5. Berkoordinasi dengan mitra yang sesuai untuk menyebarkan informasi tentang ketersediaan dan pentingnya pelayanan penanganan kekerasan seksual. (Lihat Lembar Tindakan 10.1, Memberikan informasi kepada komunitas mengenai kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan.) Berikan informasi kepada komunitas, terutama kepada perempuan dan anak-anak perempuan tentang:

- Kekerasan seksual
- Potensi konsekuensi
- Bahwa orang yang selamat/korban membutuhkan pertolongan, dukungan, dan keamanan, bukan dipersalahkan atau stigma sosial
- Bagaimana dan di mana orang yang selamat/korban dapat pergi untuk mendapatkan pertolongan dan bahwa pertolongan tersebut bersifat rahasia.

6. Menyediakan keamanan ketika orang yang selamat/korban melaporkan kasus kepada polisi dan/atau staf keamanan.

Selalu menghormati kerahasiaan, hak-hak, pilihan, dan harga diri orang yang selamat/korban, pastikan bahwa dia terlibat dalam setiap keputusan/tindakan yang akan diambil demi keselamatan atau perlindungan dirinya. Dalam kasus yang menimpa anak, sebaiknya didampingi oleh orang yang dipercaya oleh si anak.

- Semua wawancara dengan orang yang selamat/korban harus dilakukan dalam tempat pribadi, dan sebaiknya oleh staf perempuan.
- Beberapa orang yang selamat/korban mungkin menginginkan atau membutuhkan tempat aman untuk tinggal baik untuk sementara atau waktu yang lama. Lihat Lembar Tindakan 7.2 untuk pertimbangan-pertimbangan dan perencanaan.
- Bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin adat, pemerintah dan kelompok-kelompok perempuan untuk mematahkan persepsi bahwa orang yang selamat/korban adalah bersalah.

7. Membangun mekanisme untuk memaksimalkan untuk orang yang selamat/korban, termasuk staf kemanusiaan dan anggota masyarakat.

8. Memantau keamanan untuk mengenali area berisiko tinggi dan pokok-pokok persoalan keamanan, yang muncul pada saat lemahnya keamanan.

- Secara konsisten meninjau data kekerasan seksual.
- Secara berkala bertemu dengan jaringan penghubung untuk berbagi informasi dan berkoordinasi untuk perbaikan keamanan.
- Berkonsultasi dengan anggota komunitas, mencari kebenaran dan memperbaharui informasi, memastikan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan sepenuhnya dilibatkan dan memperoleh tempat yang pribadi dan terpisah untuk konsultasi.

9. Menyediakan panduan untuk kelompok kerja GBV tentang bagaimana mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang. Hal ini mensyaratkan pemantauan dan analisa keamanan melalui jaringan penghubung, informasi dari mulut ke mulut, dan data gabungan mengenai kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.

- Mengevaluasi kasus dan tindakan penanganan, mengenali pola dan sifat dasar dari kekerasan, misalnya, ciri umum dari orang yang selamat/korban (kelompok umur, suku) dan tersangka pelaku, di mana kasus itu terjadi, dan kapan terjadinya.
 - (a) Beri penilaian, khususnya, bagaimana terjadinya apakah merupakan acts of commission (hal yang dilakukan oleh orang lain) atau acts of omission (hal yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilakukan), atau keduanya.
 - (b) Cari tahu apakah ada pola tertentu, penentuan waktu, jadwal, alasan, atau perlambatan yang berhubungan dengan kekerasan dan

- jika dengan begitu dapat diperkirakan, dan terukur bila ada faktor-faktor (fisik, sosial, tempat, ekonomi dan tempat tinggal) yang membuat orang mendapat risiko lebih tinggi.
- (c) Jelaskan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran ini, apa kekuasaan mereka, dan sumber-sumber apa yang mereka gunakan. Pahami dengan baik bagaimana, kapan, dimana dan mengapa mereka melakukan penganiayaan.
 - (d) Kenali faktor-faktor kritis yang mempermudah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, seperti perbedaan tingkat kekuasaan (misalnya murid-guru, orang bersenjata-masyarakat sipil) dan dipergunakannya senjata api kecil dan senjata ringan.
 - Pelajari siapa yang menggerakkan, mendukung, memperbolehkan dan bersekongkol dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut, sebagai pemberi ide, pembuat strategi, dan pendukung aktif. Kenali mereka yang “menutup mata” terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut atau menggagas strategi penyangkalan.
 - Coba untuk mengantisipasi atau memperkirakan langkah berikut dari pelaku. Ada kemungkinan mereka akan mengubah strategi untuk menghindari upaya-upaya yang diambil untuk menghentikan mereka.

Bahan-bahan acuan utama

1. Sexual and Gender-based Violence Against Refugees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response. UNHCR, 2003.
http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03.pdf
2. Action for the Rights of Children (ARC) Foundations: Standards (UNHCR, OHCHR, UNICEF, Save the Children). <http://www.unhcr.ch/cgi-bin/taxis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3e37e5ba7>
3. UNHCR Resettlement Handbook. UNHCR, 2002. <http://www.unhcr.ch/cgi-bin/taxis/vtx/protect?id=3d4545984>
4. Adolescent Development. UNHCR, OHCHR, UNICEF, 2001.
5. Refugee Children: Guidelines on Protection and Care. UNHCR, 1994. <http://www.unhcr.ch/cgi-bin/taxis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b84c6c67>
6. Convention on the Rights of the Child. 1989. <http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/k2crc.html>

LEMBAR TINDAKAN

3.3 Pemberian Advokasi untuk kepatuhan dan penerapan instrumen-instrumen internasional

Sektor/Fungsi: Perlindungan

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Kekerasan seksual adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia universal yang dilindungi oleh konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional, seperti hak untuk rasa aman, hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan fisik dan mental, hak untuk bebas dari penyiksaan atau kekejaman, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan, dan hak untuk hidup. Beberapa instrumen internasional secara khusus membahas kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan (lihat Bahan-bahan acuan utama di bawah).

Kekerasan seksual semasa keadaan darurat, terutama dalam keadaan konflik, secara langsung berhubungan dengan tidak adanya perlindungan sosial dan hukum yang, pada akhirnya, mendukung budaya kekebalan hukum bagi pelaku dan membuat orang yang selamat semakin enggan untuk melapor. Tanggung jawab utama dalam penyediaan perlindungan bagi korban kekerasan seksual termasuk 1) mencegah kekerasan berikutnya dan 2) memastikan peradilan dan hukuman sosial untuk kasus-kasus yang telah terjadi.

Komponen penting untuk pencegahan terjadinya kekerasan berikutnya maupun hukuman bagi kejahatan kekerasan seksual adalah memastikan penerapan dan kepatuhan terhadap hukum yang mendukung hak-hak komunitas untuk bebas dari kekerasan seksual. Walaupun negara memegang tanggung jawab utama untuk melindungi warga dari kekerasan seksual, seringkali terjadi pada kasus dalam keadaan darurat negara-negara tidak cukup sumber daya untuk menegakkan hukum. Dalam beberapa kasus keadaan darurat, negara melakukan, atau terlibat, dalam kekerasan seksual. Untuk itu, “PBB, badan-badan hak asasi manusia dan kemanusiaan berbagi tanggung jawab dengan negara-negara untuk memastikan bahwa hak asasi manusia terlindungi”^{*}.

Dalam tahap awal keadaan darurat, tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan ini termasuk memberikan advokasi tentang hak-hak korban kekerasan seksual dan menekan negara-negara untuk mengikuti standar internasional yang melindungi manusia dari kekerasan seksual. Ada tiga strategi utama untuk menekan negara yang dapat digunakan oleh komunitas kemanusiaan untuk memperbaiki perlindungan oleh negara sehubungan dengan kekerasan seksual: 1)Mengecam, menekan

pemerintah melalui publikasi agar memenuhi kewajibannya dan melindungi mereka yang rentan terhadap kekerasan; 2)Persuasi, meyakinkan pemerintah melalui dialog terbatas untuk memenuhi kewajibannya dan melindungi mereka yang rentan terhadap kekerasan; dan 3)Mobilisasi, secara diam-diam berbagi informasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemerintah agar memenuhi kewajibannya dan melindungi mereka yang rentan terhadap kekerasan. (Lihat juga Lembar Tindakan 1.2, Memberikan advokasi dan menggalang dana dan Lembar Tindakan 10.2, Memberikan informasi kepada komunitas mengenai kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan).

Memastikan hukuman atas kekerasan seksual juga berarti menyediakan pelayanan hukum secara langsung kepada orang yang selamat, atau memberdayakan dan/atau membangun kapasitas dari struktur hukum dan peradilan lokal/tradisional yang ada melalui proyek-proyek bantuan agar mereka dapat melaksanakan fungsi mereka. Walau tidak mungkin untuk menerapkan program hukum/peradilan langsung secara menyeluruh semasa tahap awal keadaan darurat, harus ditunjuk orang-orang bekerja untuk PBB dan/atau lembaga kemanusiaan untuk memberikan nasihat hukum kepada negara maupun menyediakan bantuan hukum langsung kepada orang yang selamat.

Kesuksesan tuntutan hukum atas kejahatan kekerasan seksual sangat tergantung pada peran serta aktif orang yang selamat/korban dan saksi-saksi. Penting untuk selalu diingat bahwa kejahatan kekerasan seksual jarang dilaporkan dalam setiap kondisi dan sedikit orang yang selamat/korban menuntut kompensasi hukum. Maka dari itu sangat penting adanya pelayanan penanganan minimum yang rahasia dan terkoordinasi baik dari aktor-aktor multisektoral (terutama perawatan kesehatan, dukungan psikologis/sosial dan advokasi, dan nasihat dan dukungan hukum) untuk menolong dan mendukung korban/orang yang selamat menjalani setiap proses hukum yang dia inginkan. Dengan adanya pelayanan penanganan yang layak, sungguh-sungguh dan penuh penghormatan, orang yang selamat cenderung menempuh jalur hukum dan mengikuti setiap tindakan yang dibutuhkan. Tanpa dukungan-dukungan tersebut, sebagian besar orang yang selamat/korban takut, bingung, dan akan menghindari dari polisi atau tindakan hukum.

^{*}) Sexual and Gender-based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Protection and Response. UNHCR, 2003. Pg. 9.

Tindakan-tindakan utama

Tindakan berikut diterapkan untuk sektor perlindungan, yaitu organisasi-organisasi yang menerapkan program-program perlindungan. Sektor perlindungan menentukan focal point yang secara berkala berperan serta dalam kelompok kerja GBV dan melaporkan kemajuan dari tindakan-tindakan utama yang diambil untuk sektor perlindungan. Focal point untuk sektor perlindungan berperan dalam fungsi-fungsi lintas sektor yang dipimpin oleh badan koordinator GBV dan kelompok-kelompok kerja, seperti dijelaskan dalam Lembar Tindakan untuk Koordinasi, penilaian dan pemantauan, Sumber Daya Manusia dan Informasi pendidikan komunikasi.

1. Turut serta dalam analisis situasi terkoordinasi seperti dijelaskan dalam Lembar Tindakan 2.1 dan menggabungkan informasi relevan dengan tuntutan hukum untuk kekerasan seksual (misalnya hukum nasional, prosedur dan pelaksanaan hukum bagi kejahatan kekerasan seksual, jumlah dan hal-hal di luar suksesnya tuntutan hukum, dllb).
2. Membina sub-kelompok kerja di dalam kelompok kerja GBV untuk menangani tuntutan hukum bagi kekerasan seksual. Pastikan keterwakilan masyarakat lokal, termasuk perempuan, dalam sub-kelompok kerja.
3. Menunjuk personel PBB dan/atau lembaga kemanusiaan untuk menyediakan nasihat hukum kepada negara dan juga bantuan hukum langsung kepada orang yang selamat/korban yang ingin mencari keadilan hukum atas kejahatan kekerasan seksual. Pastikan personel ini ikut serta dalam sub-kelompok kerja.
4. Menunjuk anggota-anggota di dalam sub-kelompok kerja memegang tanggung jawab untuk memantau penyelidikan yang dilakukan oleh negara sudah sejauh mana dan bentuk-bentuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual.
5. Membangun jaringan dengan hakim, jaksa, polisi dan sistem tradisional untuk memastikan bahwa hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual ditegakkan.
6. Bila perlu, bentuk tindakan terkoordinasi untuk menekan pemerintah agar meratifikasi dan/atau menerapkan Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan instrumen lain serta lebih efektif melakukan penyelidikan dan menuntut kejahatan kekerasan seksual.
7. Menunjuk anggota-anggota sub-kelompok kerja untuk memberikan pelatihan tentang hak asasi manusia dan instrumen internasional yang melarang

perkosaan dan bentuk lain kekerasan seksual kepada komunitas, polisi, pengadilan nasional dan adat, serta aktor-aktor kemanusiaan nasional maupun internasional, termasuk pasukan penjaga perdamaian.

Bahan-bahan acuan utama

1. UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), December 1979. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>
2. UN General Assembly, Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, A/RES/54/4, December 2000. <http://www.un.org/women-watch/daw/cedaw/protocol/>
3. ICRC, The Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols of 8 June 1977. <http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/genevaconventions>
4. United Nations, Rome Statutes of the International Criminal Court, July 1998.
5. International Human Rights—Basic Reference Guide for NGOs, International Human Rights, www.hshr.org.
6. Legal Framework for Service Providers Addressing GBV, International Planned Parenthood Foundation, http://www.ippfwhr.org/publications/download/monographs/gbv_tools_files/gbv_legalguide_e.pdf.
7. Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict, ICRC Guidance Document 2004 [http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0840/\\$File/ICRC_002_0840.PDF?Open](http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0840/$File/ICRC_002_0840.PDF?Open)
8. Women Facing War, ICRC, 2001, <http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList138/8A9A66C7DB7E128DC1256C5B0024AB36>
9. Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons, UNHCR, May 2003.
10. Gender Equality and Humanitarian Assistance: A guide to the issues, Woroniuk, Beth, Canadian International Development Agency (CIDA), November 2003. [http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUIImages/Africa/\\$file/Guide-Gender.pdf](http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUIImages/Africa/$file/Guide-Gender.pdf)
11. Gender-based Violence Web-based Annotated Bibliography, www.rhrc.org/resources/gby

1. Sumber Daya Manusia

Fungsi pendukung

Intervensi Pencegahan dan Penanganan Minimum

- 4.1 Merekrut staf dengan cara yang akan mengurangi eksploitasi dan kejahatan seksual (SEA)
- 4.2 Menyebarkan dan memberikan informasi kepada seluruh mitra mengenai kode etik
- 4.3 Menerapkan mekanisme pengaduan rahasia
- 4.4 Menerapkan jaringan focal group SEA

LEMBAR TINDAKAN

4.1 Merekrut staf dengan cara yang akan mengurangi eksploitasi dan kejahatan seksual

Fungsi : Sumber Daya Manusia

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Perempuan dan anak-anak perempuan dalam keadaan darurat sangat rentan terhadap segala bentuk kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual, oleh orang-orang yang karena posisinya memiliki kekuasaan, termasuk pekerja kemanusiaan dan pasukan penjaga perdamaian.

Pencegahan kekerasan seksual termasuk pencegahan/penghentian eksploitasi dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh personel kemanusiaan dan pasukan penjaga perdamaian. Perekrutan, seleksi dan mempekerjakan personel secara hati-hati adalah kegiatan pencegahan yang penting.

Sejak kontak pertama dengan calon anggota staf, organisasi harus memberi perhatian besar kepada tindak-tanduknya dan bagaimana organisasi tersebut berinteraksi dengan individu tersebut. Organisasi dapat menunjukkan seberapa besar komitmen dan tanggung jawabnya untuk mencegah eksploitasi dan kejahatan seksual dengan berhati-hati dalam mempekerjakan staf. Staf yang memahami dan meyakini komitmen dari organisasi mengenai masalah itu cenderung mematuhi standar perilaku sebagaimana diatur dalam kode etik.

Tindakan-tindakan utama

Setiap organisasi pada setiap sektor bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini. Kelompok kerja GBV dapat meminta seorang focal point untuk menangani masalah-masalah sumber daya manusia pada rapat-rapat kelompok kerja GBV dan memberikan laporan perkembangan dari penerapan tindakan-tindakan utama tersebut.

1. Menunjuk personel yang terlatih, berpengetahuan luas dan dapat dipercaya untuk memegang tanggung jawab merekrut dan mempekerjakan karyawan dan konsultan. Mereka harus terlatih di bidang sumber daya manusia, memiliki pengetahuan tentang risiko staf melakukan tindakan tidak senonoh yang mengarah kepada kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual, dan harus bertanggung jawab untuk menerapkan standar yang diakui secara internasional dalam mempekerjakan karyawan atau konsultan.

2. Ketika merekrut staf lokal/nasional dan internasional, termasuk konsultan jangka-pendek, pekerja magang, dan sukarelawan, prosedur perekrutan secara hati-hati juga termasuk memeriksa referensi untuk semua kategori karyawan.

- Pemeriksaan referensi khususnya harus memasukkan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi

mengenai hubungan calon karyawan dengan tindakan-tindakan sebelumnya, tindakan-tindakan personel, atau catatan kejahatan.

- Pemeriksaan referensi yang berhati-hati dapat menyaring keluar para calon dengan sejarah perilaku yang eksploitatif, terutama mereka yang berpindah dari satu situasi darurat ke yang berikutnya, atau mereka yang memiliki catatan kejahatan kekerasan seksual.

3. Jangan mempekerjakan orang dengan sejarah pernah melakukan bentuk apapun kekerasan berbasis gender, termasuk eksploitasi seksual, kejahatan seksual, atau kekerasan dalam rumah tangga.

4. Berkoordinasi dengan organisasi lain untuk membangun sistem pembagian informasi mengenai (nama dari) karyawan-karyawan yang dipecat karena terlibat eksploitasi atau kejahatan seksual. Sistem seperti ini harus sesuai dengan hukum yang relevan yang mengatur tentang hubungan majikan dan pekerja.

5. Rekrut lebih banyak pekerja perempuan pada setiap tingkatan.

- Eksploitasi dan kejahatan seksual berasal dari ketidaksetaraan gender, karena itu, kegiatan-kegiatan dalam situasi darurat harus dilakukan dengan cara yang sensitif gender dimana pandangan dan perspektif perempuan dan anak-anak perempuan selayaknya menjadi pertimbangan.
- Sumber Daya Manusia harus meningkatkan jumlah staf perempuan tingkat lokal/nasional dan internasional untuk bekerja dalam keadaan darurat. Ini termasuk perempuan dalam posisi manajemen dan kepemimpinan.
- Mengenali, memahami dan menangani kendala-kendala dalam mempekerjakan perempuan. Perempuan, terutama bila mereka masyarakat lokal/nasional, mungkin memiliki keterbatasan akses dan kemampuan untuk bekerja. Kemungkinan ada tingkat melek huruf yang rendah di antara perempuan dewasa populasi tersebut, atau kepercayaan budaya yang membatasi kesempatan perempuan untuk bekerja. Penerapan strategi dan skema-skema ketenagakerjaan untuk mengakomodasi perempuan dan menghilangkan kendala. Pertimbangkan ide-ide berikut ini, tergantung kepada kondisi di setiap wilayah:
 - Bertemu dengan pemimpin-pemimpin komunitas untuk mendiskusikan pentingnya perempuan bekerja bagi organisasi, dan dapatkan dukungan mereka untuk merekrut dan mempekerjakan perempuan.
 - Berkoordinasi dengan sektor-sektor atau program-program lain (misalnya, pelayanan untuk anak-anak, pelayanan komunitas) dan bina sebuah panti penitipan atau koperasi antara ibu-ibu untuk saling berbagi pengetahuan mengurus anak.
 - Bina pengaturan pembagian kerja.
 - Adakan pengaturan penyediaan makan siang untuk pekerja dan keluarga mereka.

- Daftarkan staf baru untuk mengikuti pelatihan baca, tulis dan angka (bila ada), kaitkan kemajuan mereka dengan menambahkan tanggung jawab kerja dan kompensasi.
 - Pekerjakan tim suami-istri atau saudara lelaki-perempuan untuk posisi yang sama. Mereka dapat mengatur waktu untuk bekerja dan/atau berbagi tugas untuk mengakomodasi tanggung jawab keluarga. Ide ini akan sangat berguna pada budaya dimana perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa didampingi anggota keluarga laki-laki.
6. Memastikan bahwa cara mempekerjakan personel melarang atau mencegah eksploitasi seksual terjadi selama perekrutan.
- Semua personel yang terlibat dalam perekrutan tenaga kerja harus bertanggung jawab atas perilaku dan cara-cara mereka
 - Harus ada pemeriksaan untuk memastikan transparansi dalam penyewaan tenaga kerja dan bahwa para staf tidak menyalahgunakan posisi mereka yang memberi mereka kekuasaan dalam proses tersebut.
7. Choose With Care. ECPAT Australia, 2001. www.ecpat.org
8. Training of Trainers: Gender-based Violence Focusing on Sexual Exploitation and Abuse, UNICEF. <http://www.reliefweb.int/w/rwt.nsf/WebPubDocs/37ACC35E7F3EFF23C1256E08004BD41B?OpenDocument>
9. Facilitator's Guide: Understanding Humanitarian Aid Worker Responsibilities: Sexual Exploitation and Abuse Prevention. Coordination Committee for the Prevention of Sexual Exploitation and Abuse in Sierra Leone, 2003. <http://www.reliefweb.int/w/rwt.nsf/WebPubDocs/08968B910604DA6FC1256E430040BD4E?OpenDocument>

Bahan-bahan acuan utama

1. Firstcheck: a step by step guide for organisations to safeguard children, NSPCC, 2002. www.nspcc.org.uk/html/home/informationresources/firstcheck.htm
2. Aid agencies — a target for paedophiles? British Overseas Aid Group Report of Seminar, Save the Children, 2000.
3. Sexual and Gender-based Violence Against Refugees, Returnees and IDPs: Guidelines for Prevention and Response, http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03.pdf
4. "Building Safer Organisations," Jane Warburton, Refugee Quarterly 2004; 23: 20-29. <http://rsq.oxford-journals.org/cgi/content/abstract/23/2/20>
5. Caring for young people and the vulnerable?: Guidance for preventing abuse of trust. Home Office, September 1999. www.tdo-directions.freemove.co.uk/safeguarding.htm
6. Setting The Standard: A Common Approach to Child Protection for INGOs. UK INGO consortium, 2003. <http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Topics/Child%20Protection%20Policy.pdf>

LEMBAR TINDAKAN

4.2 Menyebarluaskan dan memberikan informasi kepada semua mitra tentang kode etik

Fungsi : Sumber Daya Manusia

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Buletin Langkah-langkah khusus untuk Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dan Kejahatan Seksual (SGB 2003/13) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral mewajibkan standar minimum untuk tindakan kejahatan seksual dan eksploitasi seksual yang dilakukan staf termuat dalam Peraturan dan Aturan-aturan Staf PBB, dan menyediakan panduan bagi penerapannya.

Buletin tersebut diterapkan kepada seluruh staf PBB, termasuk badan-badan dan program-program di bawah administrasi terpisah, seperti juga semua organisasi atau individu yang masuk kedalam persetujuan kerjasama dengan PBB. Standar yang tercantum dalam Buletin juga berlaku bagi personel pasukan penjaga perdamaian, termasuk polisi sipil dan personel militer. Pelanggaran terhadap standar Buletin tersebut berakibat kepada diambilnya tindakan pendisiplinan sampai kepada pemutusan hubungan kerja sepihak, repatriasi, dan penuntutan criminal, bila perlu.

LSM-LSM memiliki standar sendiri yang sesuai dengan Buletin Sekretaris Jendral. Misalnya, standar tersebut diadopsi sebagai standar Sphere (lihat Lembar Tindakan 1.3, Memastikan standar Sphere disebarluaskan dan dipatuhi). Banyak negara-negara penyumbang dana telah menerapkan standar tersebut, mewajibkan organisasi penerima dana untuk mematuhi standar tersebut.

Enam standar khusus tercantum dalam Buletin Sekretaris Jendral adalah:

(a) Eksploitasi seksual dan kejahatan seksual adalah tindakan tidak senonoh yang serius dan karena itu menjadi alasan diambilnya tindakan-tindakan pendisiplinan, termasuk pemutusan hubungan kerja sepihak.

(b) Kegiatan seksual yang dilakukan dengan anak-anak (orang di bawah 18 tahun) adalah terlarang terlepas dari usia mayoritas populasi atau batas usia yang disetujui oleh masyarakat lokal. Pengetahuan yang salah tentang usia seorang anak bukan alasan.

(c) Pemberian uang, pekerjaan, barang-barang atau pelayanan untuk hubungan seks, termasuk mengajak melakukan hubungan seks atau bentuk lain penghinaan, perendahan atau perilaku eksploitatif, adalah dilarang.

(d) Hubungan seksual antara staf PBB dan penerima bantuan, karena mereka berada pada dinamika

kekuasaan yang tidak setara, menjatuhkan kredibilitas dan integritas dari pekerjaan PBB dan sangat tidak diharapkan.

(e) Bila anggota staf PBB memperhatikan atau mencurigai terjadinya eksploitasi seksual atau kejahatan seksual oleh rekan sekerja, apakah bekerja pada badan yang sama atau tidak dan apakah berada di bawah sistem PBB atau tidak, harus melaporkan hal itu melalui mekanisme pelaporan.

(f) Staf PBB wajib menciptakan dan mempertahankan suasana yang mencegah eksploitasi seksual dan kejahatan seksual. Para manajer di setiap tingkat memiliki tanggung jawab tertentu untuk mendukung dan menumbuhkan sistem yang mempertahankan suasana tersebut.

Standar di atas tidak dirancang untuk menjadi daftar yang panjang. Bentuk lain dari perilaku mengeksploitasi secara seksual atau kejahatan seksual dapat menjadi alasan bagi pengambilan tindakan administratif atau langkah-langkah pendisiplinan, termasuk pemutusan hubungan kerja sepihak.

Tindakan-tindakan utama

Semua kepala organisasi, di bawah koordinasi Koordinator Kemanusiaan atau Koordinator Setempat, bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan-tindakan di bawah ini. Kelompok-kelompok kerja GBV memberikan advokasi sesuai kebutuhan untuk mendorong penerapan penuh.

1. Semua aktor kemanusiaan harus sepakat untuk mematuhi kode etik dan harus menandatangani dokumen untuk menerangkan kesepakatan dan komitmen mereka. Organisasi-organisasi kemanusiaan bertanggung jawab dan bertugas memastikan bahwa semua staf di setiap tingkatan mendapatkannya.

- Anggota staf PBB (lokal/nasional dan internasional). Setiap anggota staf PBB dan pekerja baru harus menerima satu salinan dari Buletin SG dalam bahasa mereka ketika mereka menandatangani kontrak atau dikirim untuk bekerja ke suatu situasi darurat, dan menandatangani komitmen tertulis untuk mematuhi Buletin.
- LSM internasional dan nasional. Setiap organisasi kemanusiaan harus memiliki prosedur untuk menerapkan kode etik yang termaktub di dalam enam prinsip di dalam Buletin SG dan mengikat seluruh staf, konsultan dan pekerja lain.
- Badan-badan dan konsultan pelaksana. Seluruh

- organisasi dan individu yang memasuki kesepakatan kerjasama dengan PBB harus menerima salinan Buletin SG beserta alat-alat kerja dalam daftar “C” di bawah untuk pelaksanaan di lapangan. Mereka harus menandatangani dokumen tertulis bahwa mereka menerima standar di dalam Buletin SG. Organisasi-organisasi ini harus memiliki prosedur, termasuk mekanisme pengaduan untuk pelaksanaan standar Buletin SG dan mengikat seluruh staf, konsultan dan pekerja lain.
- Personel pasukan penjaga perdamaian yang berseragam. Semua personel pasukan penjaga perdamaian yang berseragam (polisi sipil dan personel militer) setiba di tempat harus menerima salinan dari Buletin SG dalam bahasa mereka masing-masing dan menandatangani pernyataan bahwa mereka akan mematuhi standar tersebut. Pasukan penjaga perdamaian dengan status “tenaga ahli” juga harus menandatangani Surat Kerja untuk mematuhi standar-standar di dalam Buletin.
2. Setiap sektor harus membuat sistem pertanggungjawaban bagi anggota komunitas terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan (seperti guru, pembagi makanan, panitia manajemen tempat penampungan, dllsb.). Anggota komunitas tersebut harus memahami dan menyetujui untuk mematuhi kode etik, menandatangani dokumen dan bertanggung jawab atas perilakunya.
3. Memberikan informasi kepada staf baru dan yang akan mulai bekerja mengenai kode etik dan standar perilaku saat pemberian orientasi dan informasi.
- Berikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk berdiskusi dan menjelaskan aspek-aspek dari standar tersebut yang dianggap membingungkan oleh para staf. Sebagai contoh, seorang pekerja tidak tetap mempertanyakan kewajiban untuk melaporkan kecurigaan terjadinya eksploitasi atau kejahatan seksual sebagaimana dicantumkan dalam standar (e) di atas. Tekankan bahwa standar etik tersebut tidak untuk dinegosiasikan dan adanya kebijakan tidak memberikan toleransi apapun untuk yang tidak mematuhi.
 - Kode etik tersebut dan kebijakan atau pernyataan-pernyataan yang mendampinginya harus diterjemahkan ke dalam bahasa lokal sehingga staf lokal/nasional memahami seluruh aspek dari standar-standar ini.
- Terms of Reference for in-country Focal Points on Sexual Exploitation and Abuse. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_FocalPtsTOR.pdf
 - Terms of Reference for in-country Networks on Sexual Exploitation and Abuse. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_NetworksTOR.pdf
 - Model Information Sheet for Local Communities. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_info sheet.pdf
 - Model Complaints Referral Form. <http://www.icva.ch/cgi-bin/browse.pl?doc=doc00001187>
 - Scenarios Covering Prohibited Acts. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_SEAcasestudies.pdf
 - Implementation Guidelines. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_SGbulletin.pdf
2. Activities of the Inter-Agency Standing Committee Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse (this includes links to the Secretary General’s Bulletin and all of the accompanying implementation tools). <http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Page=1423>

Bahan-bahan acuan utama

1. Documents pertaining to the SG’s Bulletin
 - Secretary-General’s Bulletin on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (ST/SGB/2003/13). <http://www.peace-women.org/un/pkwatch/discipline/SGreports/exexpApr2004.pdf>

LEMBAR TINDAKAN

4.3 Menerapkan mekanisme pengaduan rahasia

Fungsi : Sumber Daya Manusia

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Buletin Langkah-langkah khusus untuk Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dan Kejahatan Seksual yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral mewajibkan semua staf untuk melaporkan bila mereka memperhatikan atau mencurigai adanya eksploitasi dan kejahatan seksual. Buletin mewajibkan manajer pada setiap tingkatan untuk mengembangkan dan mendukung sistem yang mempertahankan suasana yang mencegah eksploitasi dan kejahatan seksual. Ini mensyaratkan pembangunan mekanisme-mekanisme yang memungkinkan adanya pengaduan yang dilaporkan secara rahasia, dan penunjukan focal points untuk eksploitasi dan kejahatan seksual di kantor-kantor PBB.

Beberapa LSM atau organisasi (non-PBB) lainnya yang menyediakan bantuan kemanusiaan bisa saja tidak secara formal atau terikat hukum menunjuk focal points dan membangun mekanisme pengaduan rahasia. Walau demikian, semua organisasi kemanusiaan yang bekerja selama masa keadaan darurat memiliki tanggung jawab untuk mencegah kekerasan seksual dengan mengadopsi dan menerapkan kode etik untuk para staf. Penerapan etik ini mensyaratkan adanya mekanisme untuk menerima laporan dan melakukan penyelidikan. Walaupun LSM tidak terikat oleh persyaratan yang sama dengan badan-badan PBB agar membina focal point dan sistem khusus lainnya, mereka (LSM) bertanggung jawab untuk mengambil tindakan-tindakan efektif.

Mekanisme kerahasiaan untuk menerima aduan/laporan mengenai eksploitasi dan kejahatan seksual harus terintegrasi ke dalam sistem pelaporan dan pengalihan yang dibentuk oleh kelompok kerja GBV (lihat Lembar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra), dan tidak sebagai sistem yang paralel atau berlebihan.

Mekanisme aduan yang rahasia, seperti sistem pelaporan lainnya untuk kasus kekerasan seksual, bisa berbeda-beda sesuai konteks tetapi semuanya harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan sensitif terhadap masalah gender dan usia dari pelapor dan orang yang selamat/korban. Mekanisme pengaduan harus terbuka bagi baik staf maupun anggota komunitas lokal untuk melaporkan kejahatan, baik masalah mereka sendiri atau orang lain.

Tindakan-tindakan utama

Kelompok kerja GBV bertanggung jawab untuk memasukkan prosedur khusus untuk menerima dan menangani laporan/aduan rahasia mengenai eksploitasi atau kejahatan seksual dari para staf dan/atau anggota komunitas. Prosedur ini harus menjadi bagian dari mekanisme pelaporan dan pengalihan kasus kekerasan seksual yang dijelaskan pada Lembar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra. Pembangunan prosedur tersebut mencakup penunjukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan-tindakan utama.

1. Membuat prosedur yang jelas dan transparan, termasuk tindak lanjutnya.
 - Prosedur yang jelas dan transparan harus ada untuk menerima dan menindaklanjuti aduan.
 - Keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan dari orang yang selamat/korban adalah prioritas utama.
 - Jangan pernah mengungkapkan identitas pelapor.
 - Pelapor harus diajak berkonsultasi dan tetap diberitahu perkembangan dari penyelidikan dan semua tindakan yang diambil atas dasar laporannya.
 - Pengalihan kepada badan lain untuk memberikan pelayanan pendukung terhadap pelapor dapat diberitahukan. (Lihat Lembar Tindakan 8.3, Menyediakan dukungan psikologis dan sosial berbasis komunitas)
2. Menggunakan protokol standar penyelidikan
 - Setiap penyelidikan harus memperhatikan perlakuan khusus terhadap gender dan umur tertentu seperti juga standar-standar lain tercantum dalam Model Prosedur dan Panduan Pengaduan dan Penyelidikan Sehubungan Kejahatan Seksual dan Eksploitasi Seksual yang disusun oleh IASC.
 - Penyelidikan harus dilakukan oleh profesional yang berpengalaman dan berkualitas dalam soal kekerasan berbasis gender.
3. Pelaku harus dikenai tindakan-tindakan disipliner yang layak.
4. Menunjuk Focal Point dan seorang pengganti (atau Petugas Pelaksana, bila menyangkut DPKO/pasukan penjaga perdamaian) dari para staf untuk eksploitasi dan kejahatan seksual.
 - Para focal point dan manajer harus dilatih mengenai bagaimana menerima, membuat dokumentasi dan menangani aduan eksploitasi

- dan kejahatan seksual.
 - Setidaknya satu dari para focal point adalah perempuan
5. Memberikan informasi kepada semua staf tentang mekanisme pengaduan/pelaporan untuk tuduhan eksploitasi dan kejahatan seksual, termasuk orang penghubung/para focal point.
6. Memberikan informasi kepada komunitas tentang perilaku standar dan mekanisme pengaduan.
- Beritahukan hak mereka untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi dan kejahatan seksual.
 - Beritahukan tentang prosedur pengaduan dan khususnya bagaimana membuat aduan, kepada siapa, dan apa yang dapat mereka harapkan sesudahnya.
 - Beritahukan tentang bantuan yang tersedia kepada orang yang selamat, termasuk kerahasiaan dari pelayanan-pelayanan tersebut.
7. Mengintegrasikan penyimpanan laporan dengan sistem pendokumentasian untuk bentuk lain kekerasan seksual (lihat Lembar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra), walaupun dokumentasi tambahan mungkin dibutuhkan oleh organisasi yang mempekerjakan si anggota staf (misalnya, catatan penyelidikan internal, laporan-laporan ke markas besar).
8. Memastikan diambilnya tindakan-tindakan yang terkoordinasi dalam menangani laporan eksploitasi dan kejahatan seksual.
- Mekanisme pengaduan rahasia harus diterapkan bekerjasama dengan badan-badan lain dan dengan kelompok kerja GBV (lihat Lembar Tindakan 1.1) untuk menghindari kebingungan atau duplikasi dan untuk menyederhanakan proses bagi orang yang selamat/korban.
 - Sangat penting bagi organisasi-organisasi untuk bekerja sama dalam menerima dan menyelidiki aduan. Ingat bahwa beberapa orang yang selamat/korban tidak ingin – atau tidak mampu – menghubungi organisasi di mana si pelaku bekerja. Pilihan bagi mereka untuk melaporkan kejahatan tersebut mungkin hanya melalui organisasi lain yang ada.

Bahan-bahan acuan utama

1. ToR for in-country Networks. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_NetworksTOR.pdf
2. ToR for in-country Focal Points on Sexual Exploitation and Abuse. <http://www.womenwarpeace.org/issues/violence->

[/GBV_nairobi/COC_FocalPtsTOR.pdf](#)

3. Model Information Sheet for Communities <http://www.womenwarpeace.org/issues/violence->
[/GBV_nairobi/COC_infosheet.pdf](#)

4. Model Complaints Referral Form..
<http://www.icva.ch/cgi-bin/browse.pl?doc=doc00001187>

5. Scenarios Covering Prohibited Acts. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_SEAcasesstudies.pdf

6. Implementation Guidelines. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_SGbulletin.pdf

7. IASC Model Complaints and Investigation Procedures and Guidance Related to Sexual Abuse and Sexual Exploitation. <http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Site=sexex>

LEMBAR TINDAKAN

4.4 Menerapkan jaringan focal grup SEA

Fungsi : Sumber Daya Manusia

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Jaringan kerja focal grup eksploitasi dan kejahatan seksual (SEA) termasuk juga perwakilan badan-badan PBB yang ada di negara yang menjadi perhatian, termasuk dari tiap wilayah operasi pasukan penjaga perdamaian, juga perwakilan dari Gerakan Palang Merah/Sabit Merah dan NGO internasional dan nasional.

Jaringan kerja ini harus selalu mengikuti aturan prosedur yang ditetapkan dalam ToR yang mensyaratkan rapat-rapat berkala, kerahasiaan, sistem pengalihan ke badan-badan atau Koordinator Kemanusiaan (HC)/Koordinator Setempat (RC) pokok-pokok persoalan yang khusus, dan pertemuan bilateral bila satu organisasi menerima pengaduan resmi mengenai tindakan yang dituduhkan dilakukan oleh staf organisasi yang lain.

Tindakan-tindakan utama

Jaringan kerja focal point di bawah RC, or HC tergantung wilayah kerja, dan memberikan laporan kepada koordinator. Fungsi-fungsi jaringan ini dijelaskan dalam Terms of Reference untuk Jaringan di dalam negeri untuk Eksploitasi dan Kejahatan Seksual.

1. Ikut serta dalam kelompok kerja GBV.
 - Mengintegrasikan mekanisme pengaduan SEA dengan sistem-sistem untuk mencegah dan menangani semua bentuk kekerasan seksual
 - Ikut serta dalam pendokumentasian, pemantauan dan evaluasi.
2. Mengadakan pertemuan-pertemuan berkala antar jaringan kerja focal point, setidaknya sekali dalam dua bulan.
 - Berbagi informasi tentang apa yang dapat dipelajari dan cara-cara terbaik.
 - Informasi tentang kasus-kasus yang dapat merusak kerahasiaan dari pelapor tidak boleh diungkapkan.
 - Mengkoordinasi kegiatan untuk pencegahan dan penanganan eksploitasi dan kejahatan seksual.
 - Menyediakan bantuan untuk para focal point dan pengganti yang ditunjuk.
3. Peserta jaringan kerja focal point tidak boleh membahas rincian dari kasus-kasus/laporan-laporan yang tidak masuk ke dalam proses penyelidikan atau

pendisiplinan. Informasi ini harus tetap dijaga kerahasiaannya untuk melindungi orang yang selamat/korban, saksi-saksi, dan tersangka pelaku.

4. Membuat, berkoordinasi dan memantau pelatihan, dan membuat komunitas lebih peka melalui kampanye-kampanye bekerja sama dengan yang lain. (Lihat Lembar Tindakan 10.1, Memberikan informasi kepada komunitas tentang kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan.)
5. Melapor ke Markas Besar tentang pencegahan dan keberhasilan.
6. Terlibat dalam peninjauan proses-proses oleh gabungan antar-badan untuk mengukur kesuksesan dan tantangan dalam penerapan Buletin SG.
7. Memastikan ketersediaan dan distribusi bahan-bahan IASC kepada organisasi-organisasi yang ada di daerah tersebut.

Bahan-bahan acuan utama

1. ToR for in-country Networks. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_NetworksTOR.pdf
2. ToR for in-country Focal Points on Sexual Exploitation and Abuse. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_FocalPtsTOR.pdf
3. Model Information Sheet for Communities http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_infosheet.pdf
4. Model Complaints Referral Form.. <http://www.icva.ch/cgi-bin/browse.pl?doc=doc00001187>
5. Scenarios Covering Prohibited Acts. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_SEAcasestudies.pdf
6. Implementation Guidelines. http://www.womenwarpeace.org/issues/violence/GBV_nairobi/COC_SGbulletin.pdf

5. Air dan Sanitasi

Kegiatan sektoral

Intervensi Pencegahan dan Penanganan Minimum

5.1 Melaksanakan program-program ketersediaan air/sanitasi

LEMBAR TINDAKAN

5.1 Melaksanakan program-program ketersediaan air/sanitasi

Sektor : Air dan Sanitasi

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Ketersediaan air minum dan sanitasi dan kebiasaan untuk menjaga higienitas sangat penting agar dapat bertahan hidup dalam setiap tahap keadaan darurat. Dalam banyak keadaan darurat, masyarakat mudah terkena penyakit dan meninggal akibat penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air. Perempuan dan anak-anak khususnya berisiko karena biasanya mereka adalah persentase terbesar kaum miskin dan adalah mayoritas pengungsi; dalam banyak tradisi laki-laki adalah prioritas dalam pendistribusian makanan dan air minum yang jumlahnya terbatas.

Ketika menggunakan fasilitas sumber air umum dan sanitasi, perempuan dan anak-anak perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan seksual. Untuk memperkecil risiko ini, penting untuk melibatkan peran serta perempuan dalam penyediaan air dan pembuatan program-program sanitasi, terutama untuk memilih tempat, dan membangun dan merawat fasilitas tersebut. Pembuatan sistem penyediaan sistem air dan sanitasi, termasuk penyebaran informasi, harus dilakukan setelah memiliki pemahaman tentang komunitas tersebut, termasuk data jumlah penduduk berdasarkan kelamin, analisis gender, dan pertimbangan-pertimbangan keamanan. Langkah-langkah perlindungan dan keamanan seperti penerangan dan patroli keamanan harus selalu tersedia dan juga program-program ketersediaan air dalam jumlah cukup dan fasilitas sanitasi.

Tindakan-tindakan utama

Tindakan-tindakan berikut ini berlaku untuk sektor air/sanitasi, yaitu organisasi yang melaksanakan program-program air/sanitasi. Sektor air/sanitasi menunjuk focal point yang secara berkala ikut serta dalam kelompok kerja GBV dan memberikan laporan tentang pencapaian dari sektor air/sanitasi. Focal point sektor air/sanitasi ikut serta dalam fungsi-fungsi lintas sektor di bawah pimpinan badan koordinator GBV dan kelompok-kelompok kerja seperti dijelaskan dalam Lembar Tindakan untuk Koordinasi, Penilaian dan pemantauan, Sumber Daya Manusia dan Informasi pendidikan komunikasi.

1. Mengenali risiko keselamatan dan keamanan untuk perempuan dan anak-anak perempuan sehubungan dengan sistem air dan sanitasi untuk memastikan bahwa lokasi, rancangan dan program-program perawatannya memaksimalkan keselamatan dan keamanan perempuan dan anak-anak perempuan.
- Ikut serta dalam analisis situasi terkoordinasi

(lihat Lembar Tindakan 2.1, Melakukan analisis situasi cepat terkoordinasi) untuk mengumpulkan informasi relevan mengenai komunitas dan situasi berhubungan dengan kekerasan seksual.

- Perhatian khusus harus diberikan kepada kebutuhan dari kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak perempuan, seperti keluarga yang dipimpin perempuan lajang, remaja, anak-anak perempuan tanpa pengasuhan, dlsb.

2. Mengerahkan perempuan dan laki-laki untuk ikut serta dalam penentuan lokasi, disain dan perawatan fasilitas air dan sanitasi.

- Jangan biarkan perempuan mengalami kesulitan.
- Memastikan bahwa semua pengguna, terutama perempuan dan anak-anak perempuan, mengetahui kebiasaan higienitas yang berbahaya, dan bahwa semua pengguna fasilitas berbagi tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah mengurangi bahaya tersebut.
- Membentuk panitia air dan/atau sanitasi yang separuh anggotanya adalah perempuan. Panitia ini bertanggung jawab untuk merawat fasilitas air dan sanitasi.

3. Menempatkan tempat air di daerah yang dapat dicapai dan aman untuk semua, dengan perhatian khusus untuk kebutuhan perempuan dan anak-anak.

- Mendiskusikan lokasi-lokasi pompa air dengan seluruh anggota komunitas.
- Sebagai acuan, letak sumber air tidak boleh berjarak lebih dari 500 meter dari rumah.

4. Merancang atau menyesuaikan pompa tangan atau tempat membawa air agar dapat digunakan oleh perempuan dan anak-anak.

5. Dalam situasi di mana air harus dijatah atau hanya dapat dipompa pada waktu-waktu tertentu, berikan hal ini dalam konsultasi dengan seluruh pengguna, terutama dengan perempuan.

- Penentuan waktu harus baik dan aman bagi perempuan dan mereka yang bertugas untuk mengumpulkan air.
- Seluruh pengguna harus tahu kapan dan dimana air tersedia.

6. Merancang fasilitas pemandian dan tempat mencuci umum dengan berkonsultasi dengan perempuan dan anak-anak perempuan untuk memastikan bahwa pengguna mendapat privacy dan tidak kehilangan harga diri.

- Menentukan jumlah, lokasi, rancangan, keselamatan, kelayakan dan kenyamanan fasilitas dalam konsultasi dengan pengguna, terutama

perempuan dan remaja (termasuk apakah fasilitas untuk perempuan dan laki-laki harus berdekatan atau berjauhan).

- Fasilitas harus terbuka untuk umum, dapat dicapai dan memiliki penerangan yang cukup demi keselamatan pengguna.
- Fasilitas mandi harus memiliki pintu dengan kunci pada bagian dalam.

7. Merancang toilet dalam konsultasi dengan perempuan dan anak-anak perempuan demi keselamatan, privacy dan harga diri.

- Pertimbangkan pilihan-pilihan dan kebiasaan budaya setempat dalam menentukan tipe toilet yang akan dibangun.
- Gunakan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin untuk merancang perbandingan antara jumlah toilet perempuan dan laki-laki. Panduan umum adalah 3:1.
- Membangun toilet berpintu dengan kunci pada bagian dalam.
- Lokasi toilet harus membuat perempuan dan anak-anak perempuan merasa – dan memang – aman menggunakannya.
- Toilet umum harus diberi alat penerangan, atau setiap keluarga dibagikan obor.

8. Bagikan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyerap dan membuang darah menstruasi perempuan dan anak-anak perempuan yang sedang menstruasi. (Lihat Lembar Tindakan 7.4, Menyediakan perlengkapan sanitasi untuk perempuan dan anak-anak perempuan).

9. Memberikan informasi kepada perempuan dan laki-laki tentang perawatan dan penggunaan fasilitas air dan sanitasi.

- Perempuan dan laki-laki harus diberitahu cara memperbaiki fasilitas tersebut dan bagaimana membuat atau di mana mendapatkan suku cadang.
- Menentukan waktu untuk pertemuan pemberian informasi dalam konsultasi dengan calon pengguna, terutama perempuan, agar tidak bentrok dengan kegiatan mereka yang lain.
- Menggunakan/menyesuaikan bahan-bahan informasi dan promosi untuk memastikan bahwa mereka secara budaya dapat diterima dan diketahui oleh semua kelompok (misalnya perempuan, anggota masyarakat yang buta huruf).
- Menggunakan metode dan bahan-bahan partisipatif yang memungkinkan semua kelompok untuk merencanakan dan memantau perbaikan higienitas mereka sendiri. Sebagai acuan kasar, dalam rencana tempat penampungan seharusnya ada dua promotor untuk kebiasaan higienis/penggerak massa, satu perempuan dan satu laki-laki, untuk setiap 1,000 orang dari populasi.

10. Menjaga agar perempuan dan laki-laki secara sadar berperan dalam kegiatan mendorong kebiasaan higienis dan memastikan keseimbangan jenis kelamin

di dalam panitia-panitia dan promotor kebiasaan higienis.

- Memastikan bahwa perempuan tidak terbebani dengan tanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menggerakkan kebiasaan higienis atau mengurus fasilitas air dan sanitasi.
- Memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengaruh yang besar dalam kegiatan menggerakkan kebiasaan higienis dan bahwa setiap keuntungan atau bonus dibagi sama rata antara perempuan dan laki-laki.

Bahan-bahan acuan utama

1. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. The Sphere Project, Geneva 2004.. Sphere, 2004. www.sphereproject.org

2. Toolkit on gender in water and sanitation. World Bank.

[http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/LHON-5TVFSP/\\$](http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/LHON-5TVFSP/$)

FILE/WorldBank_jender_1998.pdf?OpenElement

3. Gender in water and sanitation checklist. Asian Development Bank (ADB). www.adb.org/gender

4. Gender and Water Alliance. <http://www.genderandwater.org/>

5. Gender guidelines for water supply and sanitation.

AusAID. http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/jender_guidelines_water.pdf

6. Ketersediaan Makanan dan Gizi

Kegiatan-kegiatan sektor

Intervensi Pencegahan dan Penanganan Minimum

6.1 Menerapkan program-program ketersediaan makanan dan gizi

LEMBAR TINDAKAN

6.1 Menerapkan program-program ketersediaan makanan dan gizi

Sektor : Ketersediaan makanan dan gizi

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Perempuan dan anak-anak perempuan seringkali menghadapi risiko yang berbeda dengan laki-laki dan anak-anak lelaki semasa keadaan darurat; salah satunya adalah ketidakadaan makanan. Strategi efektif pengadaan makanan dan gizi mensyaratkan pemahaman tentang dimensi gender di saat terjadi krisis sehingga dapat diidentifikasi dan dinilai apa kebutuhan kaum perempuan dan kaum laki-laki. (Lihat Lembar Tindakan 2.1, Melakukan analisis situasi cepat terkoordinasi).

Keikutsertaan perempuan dalam membuat keputusan tentang cara terbaik melaksanakan program-program ketersediaan makanan dan gizi adalah hal penting untuk mengurangi risiko perempuan dan anak-anak perempuan semasa keadaan darurat. Pencegahan kekerasan seksual mensyaratkan diterapkannya prinsip-prinsip berikut dalam perencanaan dan pendistribusian makanan:

- Komunitas berhak mendapatkan bantuan makanan.
- Komunitas harus berperan aktif.
- Setiap tindakan harus dilaksanakan secara transparan, terbuka dan jelas.
- Seluruh aktor harus mempermudah akses untuk mendapatkan bantuan makanan.
- Seluruh aktor harus memastikan komunitas tidak mengalami kekerasan.

Tindakan-tindakan utama

Tindakan-tindakan berikut berlaku untuk sektor ketersediaan makanan dan gizi; yaitu, organisasi-organisasi yang melaksanakan program-program pembagian makanan dan gizi. Sektor ketersediaan makanan dan gizi menunjuk seorang focal point yang secara berkala turut serta dalam kelompok kerja GBV dan memberikan laporan tentang pencapaian dari tindakan-tindakan utama sektor ketersediaan makanan dan gizi. Focal point dari sektor ketersediaan makanan dan gizi berperan dalam fungsi-fungsi lintas sektor yang dipimpin oleh badan koordinator GBV dan kelompok kerja, sebagaimana dijelaskan di dalam Lembar Tindakan untuk Koordinasi, Penilaian dan pemantauan, Sumber Daya Manusia, dan Informasi pendidikan komunikasi.

1. Mengumpulkan data populasi menurut jenis kelamin untuk merancang dan mengevaluasi strategi-strategi ketersediaan makanan dan gizi. (Lembar Tindakan 2.1, Melakukan analisis situasi cepat terkoordinasi)

2. Memasukkan strategi-strategi untuk mencegah kekerasan seksual ke dalam program-program makanan dan gizi pada seluruh rangkaian kegiatan (termasuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan tindak lanjut), dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok di dalam komunitas yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual.

- Menargetkan keluarga yang dikepalai perempuan dan anak-anak untuk menerima bantuan makanan. Perempuan dan anak-anak yang menjadi tulang punggung keluarga seringkali menanggung risiko lebih besar mengalami diskriminasi dan kekerasan. Pada saat terjadi kekurangan bahan makanan, perempuan dan anak-anak seringkali menanggung risiko yang lebih berat mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Daftarkan kartu ransum keluarga dengan nama pihak perempuan daripada pihak laki-laki untuk membantu memastikan bahwa perempuan memegang kendali lebih besar dalam pengaturan makanan dan memastikan bahwa makanan tersebut dikonsumsi.
- Berikan perhatian khusus kepada perempuan yang sedang hamil dan ibu menyusui, sebab kebutuhan gizi mereka meningkat.
- Bagi keluarga poligami, berikan kartu ransum berbeda bagi masing-masing istri dan tanggungan mereka. Seringkali si suami hanya dianggap sebagai tanggungan dari salah satu istri-istrinya. Menurut kebiasaan tradisional, banyak pria poligami dan istri-istri mereka beranggapan bahwa sang suami berhak atas makanan dari setiap istri. Pertimbangkan secara hati-hati bagaimana menentukan jatah makanan untuk sang suami dan beri informasi yang jelas kepada seluruh anggota keluarga (semua istri).

3. Melibatkan perempuan dalam keseluruhan proses pelaksanaan strategi-strategi ketersediaan makanan dan gizi. Bina komunikasi berkala dan konsisten dengan kaum perempuan agar dapat memahami pokok-pokok persoalan yang perlu ditangani dan dicari penyelesaiannya. Perempuan harus berperan dalam:

- Proses penilaian dan penentuan sasaran, terutama dalam mengenali pihak yang paling rentan;
- Diskusi-diskusi tentang jenis dan kelayakan makanan yang diinginkan;
- Pengambilan keputusan tentang lokasi dan waktu pendistribusian makanan, termasuk distribusi ransum dan makanan tambahan;
- Memperoleh pengetahuan tentang kebutuhan memasak dan alat-alat tambahan, ketersediaan barang-barang tersebut di komunitas, dan strategi

untuk mengamankan akses mendapatkan barang-barang kebutuhan bukan makanan tersebut. Perhatian khusus harus diberikan kepada perempuan sejak tahap ini sebab perempuan bisa menjadi korban kekerasan seksual saat sedang mengumpulkan barang-barang kebutuhan tersebut (misalnya saat sedang mengumpulkan kayu bakar, mereka berada dalam posisi rawan jika mereka harus berjalan jauh atau keluar dari tempat penampungan). (Lihat Lembar Tindakan 7.3, Menerapkan strategi-strategi dalam pengumpulan bahan bakar dan Lembar Tindakan 5.1, Menerapkan program-program air/sanitasi)

4. Memperbesar kendali perempuan dalam pengaturan makanan dengan membuat perempuan sebagai pemegang kartu ransum.

- Menerbitkan kartu ransum keluarga atas nama perempuan
- Mengajukan kaum perempuan untuk mengambil makanan di pos distribusi.
- Memberikan kepada perempuan hak untuk menunjuk orang lain untuk mengambil jatah makanan.
- Mengajukan kaum perempuan untuk mengambil jatah makanan secara kolektif.
- Membagikan makanan setidaknya dua kali sebulan untuk mengurangi beban jumlah makanan yang harus dibawa oleh komunitas.
- Mengalokasikan dana dari anggaran proyek untuk menyediakan bantuan transportasi bagi anggota komunitas yang tidak mampu untuk membawa jatah makanan dari pos distribusi.

5. Menyertakan perempuan di dalam proses pemilihan lokasi pos distribusi. Aspek-aspek berikut ini sebaiknya dijadikan bahan pertimbangan:

- Jarak dari pos distribusi ke tempat keluarga tersebut sebaiknya tidak lebih jauh dari jarak mencapai sumber air atau kayu.
- Jalan menuju dan dari pos distribusi harus diberi marka, dapat dicapai oleh semua orang, dan sering digunakan oleh anggota komunitas lainnya.
- Lokasi yang dekat dengan tempat laki-laki dalam jumlah besar berkumpul harus dihindari, terutama mereka yang memiliki akses bebas untuk mendapatkan minuman beralkohol, atau tempat di sekitar orang-orang yang bersenjata.

6. Membentuk panitia pembagian makanan dengan jumlah anggota seimbang antara perempuan dan laki-laki untuk memberikan peran besar dan setara kepada perempuan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan:

- Pastikan bahwa pendistribusian makanan dilakukan oleh tim dengan jumlah anggota laki-laki dan perempuan seimbang. Sediakan kantong agar mudah untuk dibawa dan juga bisa dipergunakan kembali untuk keperluan rumah tangga.
- Pilih waktu pendistribusian sesuai dengan kegiatan-kegiatan dan kebutuhan perempuan,

sehingga dapat diatur agar mereka dapat pergi bersama-sama menuju atau dari pos distribusi.

- Pembagian makanan seharusnya dilakukan di siang hari, sehingga masih cukup waktu untuk kaum perempuan pulang ke rumah ketika hari masih terang.

7. Memberikan informasi yang cukup tentang distribusi makanan dengan menggunakan berbagai metode agar semuanya, terutama perempuan dan anak-anak perempuan mendapatkan informasi. Berikan informasi kepada komunitas tentang:

- Jumlah dan komposisi jatah makanan keluarga;
- Kriteria penerima bantuan;
- Tempat dan waktu pendistribusian;
- Fakta bahwa mereka tidak perlu menyediakan jasa atau bantuan sebagai balasan telah menerima bantuan makanan;
- Mekanisme bagi mereka untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran sehubungan dengan distribusi makanan.

8. Mengurangi risiko-risiko keamanan dalam pendistribusian makanan. Ciptakan “ruang aman” bagi perempuan di pos-pos distribusi.

- Ajak kaum lelaki dari komunitas penerima bantuan untuk melindungi kaum perempuan dan memastikan jalan yang ditempuh perempuan dari pos distribusi ke rumah mereka aman.
- Memastikan jumlah berimbang antara laki-laki dan perempuan terlibat dalam pembagian makanan.
- Bila perlu, pisahkan laki-laki penerima jatah makanan dari perempuan, bisa dengan memisahkan waktu distribusi bagi perempuan dan laki-laki, atau dengan membangun pembatas di antara mereka.
- Pastikan bahwa tim pendistribusian makanan dan semua staf badan-badan yang terkait telah mengetahui tentang perilaku pantas, tidak terlibat dalam kejahatan dan eksploitasi seksual, dan kewajiban untuk membuat laporan. (Lihat Lembar Tindakan 4.3, Menerapkan mekanisme aduan rahasia.)
- Menciptakan jadwal “jalan aman” untuk keluarga yang dikepalai anak-anak.
- Memulai dan mengakhiri pembagian makanan saat siang hari.
- Pertimbangkan untuk menempatkan dua penjaga perempuan (mengenakan rompi dan peluit) untuk mengawasi bongkar muat bahan makanan, pencatatan, pembagian dan pasca pembagian makanan. Para penjaga perempuan ini dapat memberi tanda kepada focal point keamanan (Lihat Tindakan Penting No. 9 di bawah) bila ada masalah.

9. Memantau keamanan dan terjadinya tindak kekerasan di pos distribusi begitu juga di dalam perjalanan.

- Memastikan bahwa ada staf perempuan dari

badan pelaksana yang hadir selama pembagian makanan.

- Menciptakan rencana keamanan berbasis komunitas di pos-pos distribusi dan di jalan (lihat Lembar Tindakan 3.1, Menilai tingkat keamanan dan menentukan strategi perlindungan dan 3.2, Menyediakan keamanan sesuai kebutuhan) bekerjasama dengan komunitas.
- Menunjuk seorang focal point di setiap pos distribusi.
- Memantau keamanan di jalan dan memastikan bahwa perempuan tidak menanggung risiko yang lebih besar menjadi korban kekerasan karena memiliki makanan.

Bahan-bahan acuan utama

1. International Committee of the Red Cross. Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict. 2001 – Part 1.5 – Food and Essential Household Items.

[http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0840/\\$File/ICRC_002_0840.PDF!Open](http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0840/$File/ICRC_002_0840.PDF!Open)

2. Gender Approaches in Conflict and Post-conflict Situations. Guidelines. United Nations Development Programme. January 2003. Chapter 2.3 Protection Against Sexual Violence.

[http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0840/\\$File/ICRC_002_0840.PDF?Open](http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0840/$File/ICRC_002_0840.PDF?Open)

3. United Nations World Food Programme. Gender Policy 2003-2007.

<http://www.wfp.org/eb/docs/2002/wfp010654~4.Pdf>

7. Tempat Penampungan dan Perencanaan Lokasi dan Barang-barang Kebutuhan Bukan Makanan (Non Food Items)

Kegiatan-kegiatan sektor

Intervensi Pencegahan dan Penanganan

- 7.1 Menerapkan program-program perencanaan lokasi dan tempat penampungan
- 7.2 Memastikan bahwa orang yang selamat/korban kekerasan seksual memperoleh tempat penampungan yang aman
- 7.3 Menerapkan strategi-strategi pengumpulan bahan bakar
- 7.4 Menyediakan perlengkapan sanitasi untuk perempuan dan anak-anak perempuan

LEMBAR TINDAKAN

1.1 Menerapkan program-program perencanaan tempat dan tempat penampungan

Sektor : Tempat penampungan dan Perencanaan Tempat dan Barang-barang Kebutuhan bukan Makanan

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Banyak kasus kekerasan seksual dapat dihindari bila ada perencanaan tempat yang matang di mana pengungsi tinggal, dan jika tempat penampungan aman dan dibuat menurut standar internasional yang disepakati. Tersedianya tempat penampungan yang layak dan aman membuat komunitas terlindungi secara fisik dan menyatukan kebutuhan-kebutuhan akan perlindungan dan kemampuan dasar untuk bertahan hidup bagi perempuan, anak-anak perempuan, anak-anak lelaki dan laki-laki. Harus ada kerjasama yang erat antara organisasi-organisasi dan keterlibatan aktif komunitas, terutama perempuan, untuk memastikan pengaturan tempat penampungan yang mengutamakan keamanan dan sensitifitas gender semasa keadaan darurat. Organisasi yang bertugas menyediakan tempat penampungan harus terlibat dalam penilaian, pemantauan dan koordinasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Tindakan-tindakan utama

Tindakan-tindakan berikut ini berlaku untuk sektor tempat penampungan dan perencanaan tempat dan barang-barang kebutuhan bukan makanan; yaitu organisasi-organisasi yang melaksanakan program-program perencanaan tempat dan tempat penampungan. Sektor ini menunjuk seorang focal point yang secara berkala ikut serta dalam kelompok kerja GBV dan memberikan laporan tentang pencapaian dari tindakan-tindakan utama sektor tersebut. Para focal point berperan dalam fungsi-fungsi lintas sektor yang dipimpin oleh badan koordinator GBV dan kelompok kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Lembar Tindakan untuk Koordinasi, Penilaian dan pemantauan, Sumber Daya Manusia, dan Informasi pendidikan komunikasi.

1. Menciptakan sistem berbagi informasi dan koordinasi antara organisasi yang bertugas mencatat kedatangan pengungsi baru dan mengatur tempat penampungan/perencanaan tempat.

- Ikut serta dalam analisis situasi terkoordinasi (lihat Lembar Tindakan 2.1, Melakukan analisis situasi cepat terkoordinasi) dan menggunakan informasi ini untuk program-program tempat penampungan dan perencanaan tempat.
- Semasa pendaftaran, kenali individu-individu yang membutuhkan bantuan tempat penampungan (misalnya mereka yang paling rentan terhadap kekerasan seksual, seperti

keluarga yang dipimpin perempuan lajang) dan pastikan mereka mendapat bantuan dari organisasi bertanggung jawab atas pembagian tempat penampungan dan pembangunan tempat penampungan.

2. Pilihlah tempat yang cukup untuk membangun tempat penampungan sesuai jumlah populasi dan yang tidak menambah risiko keamanan dan perlindungan. Faktor-faktor berikut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan tempat:

- Kedekatan dengan batas wilayah (untuk mengurangi risiko penyerangan melewati batas wilayah) atau area khusus berisiko tinggi lainnya, termasuk lingkungan sekitar;
- Kedekatan dengan tempat pengumpulan bahan bakar atau kegiatan lainnya dimana terjadi pergerakan manusia di luar tempat yang ditentukan. (Lihat Lembar Tindakan 7.3, Menerapkan strategi-strategi pengumpulan bahan bakar)

3. Membentuk panitia tempat penampungan dengan kesetaraan peran serta perempuan dan laki-laki; melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa perempuan turut dalam pengambilan keputusan dan kebutuhan mereka terpenuhi.

- Memudahkan partisipasi perempuan dan laki-laki dengan meninjau peran lain mereka (misalnya pengasuhan anak) dan mendukung mekanisme komunitas dalam menangani masalah atau kendala yang menghalangi kesetaraan partisipasi perempuan.
- Memberi keuntungan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk masukan mereka dan kerja mereka dalam pembangunan tempat penampungan; misalnya bila pekerjaan dibayar, pastikan bahwa baik pekerjaan yang dilakukan perempuan dan laki-laki dibayar.

4. Merancang bentuk fisik dari tempat penampungan berkolaborasi dengan panitia tempat penampungan komunitas, menggabungkan ke dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

- Merancang lokasi tempat penampungan untuk menjaga keutuhan komunitas dan mempertahankan sistem perlindungan berbasis komunitas, sementara mempertahankan privacy dari setiap unit keluarga.
- Menyediakan tempat bermain anak di mana orangtua dapat mengawasi mereka dari tempat penampungan, untuk mencegah mereka bermain di tempat yang jauh.
- Hati-hati dalam merencanakan fasilitas air dan sanitasi. (Lihat Lembar Tindakan 5.1, Menerapkan

- program-program air/sanitasi)
- Membuat pengaturan penerangan di tempat-tempat umum dan untuk pemakaian pribadi. (Lihat Lembar Tindakan 3.1, Penilaian tingkat keamanan dan menentukan strategi perlindungan dan 3.2, Menyediakan keamanan sesuai kebutuhan.) Sebagai contoh, toilet bisa menjadi tempat yang diberikan penerangan; sementara keluarga-keluarga menggunakan obor untuk penerangan di area pribadi. Libatkan perempuan, laki-laki, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan dalam perencanaan dan perawatan sistem penerangan.

5. Menetapkan tempat untuk pusat kegiatan komunitas, tempat aman untuk perempuan/anak-anak perempuan, tempat yang aman untuk anak-anak, akses rahasia untuk perawatan kekerasan seksual di pos-pos kesehatan, dan pelayanan dan fasilitas lainnya sehubungan dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang menjamin akses fisik, privacy, dan kerahasiaan/tanpa identitas. (Lihat Lembar Tindakan 8.1, Memastikan akses perempuan terhadap pelayanan dasar kesehatan dan 8.3, Menyediakan dukungan psikologis dan sosial berbasis komunitas.)

- Berkonsultasi dengan kaum perempuan dalam komunitas dalam menentukan pusat kegiatan perempuan atau fasilitas lain untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, pelayanan konsultasi, pelatihan ketrampilan dan kegiatan lainnya untuk perempuan dan anak-anak dengan tujuan untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap kekerasan seksual dan/atau menyediakan dukungan psikososial kepada orang yang selamat/korban. Pada sebagian besar tempat penampungan, pusat kegiatan perempuan menjadi tempat untuk rekreasi, pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan penyadaran tentang kekerasan seksual serta tempat memberikan counseling.
- Membuat tempat yang aman bagi anak-anak di mana mereka dapat bertemu dan berbagi pengalaman dan kesulitan mereka kepada staf dan di antara mereka.
- Mengajak perempuan dan anak-anak perempuan untuk berperan dalam pengaturan tempat-tempat tersebut dan kegiatan-kegiatannya.

6. Merancang tempat penampungan umum untuk memaksimalkan keselamatan dan mencegah kekerasan seksual. Bila tempat penampungan umum akan digunakan, walaupun sebagai langkah sementara semasa keadaan:

- Menyediakan sekat antar keluarga.
- Tempatkan perempuan lajang dan laki-laki lajang pada ruang penampungan yang terpisah.
- Terus cari masukan dari kaum perempuan untuk memastikan apakah kebutuhan dan keamanan mereka terpenuhi.
- Periksa secara berkala tempat penampungan umum untuk memantau tingkat keamanan dan perlindungan.

7. Menentukan dan membagi tempat penampungan/kapling untuk memaksimalkan keamanan dan mencegah kekerasan seksual.

- Pastikan bahwa alokasi kapling individual/tempat penampungan tidak mengabaikan perlindungan. Sebagai contoh, tempat terpisah bagi perempuan lajang dalam beberapa kasus membuat mereka aman tetapi dalam kasus lain sebaliknya menempatkan mereka dalam posisi tidak aman. Pertimbangkan risiko-risiko yang ada sesuai konteks. (Lihat Lembar Tindakan 2.1, Penilaian dan pemantauan.)
- Membangun sistem yang jelas, konsisten, dan transparan untuk pembagian tempat penampungan, distribusi kebutuhan di tempat penampungan, dan kriteria untuk mendapatkan bantuan.
- Menyediakan barang-barang kebutuhan untuk pembangunan tempat penampungan yang tidak tersedia di sekitar daerah tersebut.
- Jangan membuat perempuan dan anak-anak perempuan menjadi tergantung kepada laki-laki untuk membangun tempat penampungan atau pembagian tempat penampungan sebab hal ini seringkali menimbulkan eksploitasi seksual, dimana perempuan dipaksa untuk berhubungan seks sebagai bayaran untuk tempat penampungan.
- Secara berkala berkonsultasi dengan perempuan, anak-anak perempuan dan kelompok-kelompok dalam komunitas yang membutuhkan perlengkapan khusus untuk memastikan bahwa masalah-masalah perlindungan dapat dengan segera diketahui dan diselesaikan.

Bahan-bahan acuan utama

1. Handbook for Emergencies. UNHCR, 1999. Pp. 210, 226, 135-147, 100-106. http://www.the-ecentre.net/resources/e_library/doc/han_Em.pdf
2. Minimum standards in shelter, settlement and non-food items, Sphere Handbook, 2004 Revised Edition Pg. 207-229. <http://www.sphereproject.org/>
3. Guidelines on the Protection of Refugee Women. UNHCR, 1991. <http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/partners/opendoc.pdf?tbl=PARTNERS&id=3b9cc1c14h>
4. Refugee Children: Guidelines on Protection and Care. UNHCR, 2002. Pg. 54. <http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b84c6c67>
5. UN- Habitat Gender Policy. www.unhcr.org/unhcr
6. A Safe Space Created By and For Women: Sexual and Gender-Based Violence Programme Report. IRC Tanzania, 1998.

LEMBAR TINDAKAN

- 7.2 Memastikan bahwa orang yang selamat/korban kekerasan seksual mendapat tempat penampungan aman
- Sektor : Tempat Penampungan dan Perencanaan Lokasi dan Barang-barang kebutuhan Bukan Makanan
- Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Penanganan minimum terhadap kekerasan seksual termasuk memastikan keselamatan dan keamanan dari orang yang selamat/korban. Perempuan dan anak-anak – dan orang-orang yang menolong mereka – bisa menanggung penghinaan atau ancaman tidak saja dari si pelaku tetapi juga dari keluarga, teman-teman dan anggota komunitas lainnya. Semua aktor harus mengingat bahwa hampir semua masyarakat cenderung menyalahkan korban dan orang yang selamat/korban biasanya menderita akibat stigma sosial jika kejadian tersebut diketahui oleh komunitas. Penghinaan bisa menjadi berat dan menakutkan di mana orang yang selamat mencari bantuan (misalnya menceritakan kepada orang lain tentang kekerasan seksual) atau melapor ke polisi dan mengambil tindakan hukum, berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh keluarga dan/atau komunitas. Keselamatan dan keamanan orang yang selamat termasuk pertimbangan-pertimbangan psikososial, terlepas ada atau tidak ancaman yang mengancam keselamatan fisiknya. Prinsip-prinsip dasar kerahasiaan, privacy, dan penghormatan kepada keinginan orang yang selamat/korban adalah kunci dalam program tempat penampungan bagi orang yang selamat/korban.

Mencari penyelesaian berbasis komunitas harus diutamakan. Mungkin ada kerabat jauh atau perempuan lain atau pemimpin komunitas yang bersimpati dan menolong orang yang selamat/korban dan mereka yang bisa menyediakan “rumah aman”. Pengaturan seperti ini bisa sukses, tetapi membutuhkan upaya mobilisasi yang aktif dan harus tergabung dalam rencana-rencana untuk keselamatan dan keamanan orang-orang yang menyediakan penampungan tersebut. Kaum perempuan dan kaum laki-laki harus dimobilisasi untuk mendorong upaya-upaya, tindakan dan dukungan di dalam situasi-situasi sulit. Dalam beberapa kasus, satu-satunya pilihan realistis untuk memastikan keselamatan orang yang selamat adalah dengan menempatkan dan menyediakan tempat penampungan terpisah, untuk sementara atau jangka panjang, bisa di area tempat penampungan atau tempat yang berbeda. Bila perlu, ciptakan kriteria dan sistem yang jelas untuk mengambil tindakan cepat untuk memaksimalkan keselamatan dan keamanan.

Tindakan-tindakan utama

Tindakan-tindakan berikut berlaku untuk, setidaknya, sektor tempat penampungan dan perencanaan

tempat. Kelompok kerja GBV harus memastikan bahwa langkah-langkah tersebut terlaksana, bahwa langkah-langkah tersebut terkoordinasi dengan sektor lain, dan bahwa setiap kemajuan harus dilaporkan dan didiskusikan dalam rapat-rapat kelompok kerja GBV.

1. Ketika menolong seorang korban kekerasan seksual, semua aktor harus membahas persoalan keselamatan/keamanan dan memastikan tidak ada ancaman langsung atau bahwa si korban memiliki rencana keamanan yang realistis. Jika si orang yang selamat/korban takut akan keselamatannya dan tidak memiliki rencana realistis untuk menjamin keamanannya, dia harus dipindahkan – atas persetujuannya – ke dalam sistem untuk tempat penampungan aman.

2. Menggerakkan komunitas untuk membangun sistem dimana orang yang selamat dari kekerasan seksual memiliki akses kepada tempat penampungan aman bila tidak aman untuk kembali ke rumah mereka. Bekerjalah dengan kaum perempuan di komunitas tersebut untuk membuat kelompok kerja (sepaimana dalam Lembar Tindakan 8.3, Menyediakan dukungan psikologis dan sosial berbasis komunitas) dan/atau berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin komunitas, kaum laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa berarti menginap di tempat kerabat atau pemimpin komunitas atau ditempatkan di tempat penampungan baru (belum selesai dibangun dan kosong).

3. Bila penyelesaian berbasis keluarga atau komunitas tidak bisa menemukan tempat tinggal sementara, tempat penampungan jangka pendek mungkin pilihan satu-satunya. “Tempat penampungan aman” harus dihitung sebagai langkah terakhir karena pengaturannya sulit, terutama pada tahap awal masa darurat kemanusiaan. Dalam situasi dimana tidak ada penyelesaian berbasis komunitas, hal berikut ini harus secara hati-hati digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam konsultasi dengan komunitas, terutama perempuan dan anak-anak perempuan, sebelum membangun “tempat penampungan aman”:

- Membangun sistem pengalihan yang rahasia.
- Membuat rencana untuk keselamatan dan keamanan keluarga/individu/staf yang menyediakan atau mengurus tempat penampungan aman.
- Membuat panduan yang jelas dan peraturan-peraturan untuk mengurus tempat penampungan aman agar mencegah penyalahgunaan dan masalah keamanan. Segera sesudah si korban

dialihkan, rencana-rencana untuk pengaturan jangka panjang harus dibuat. Panduan untuk membatasi waktu tinggal di tempat penampungan aman membantu untuk menghindari situasi di mana para korban berdiam di tempat seperti itu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Sebisanya, rahasiakan lokasi tempat penampungan aman untuk menghindari timbulnya stigma dan memaksimalkan keamanan.

- Berkoordinasi dengan semua aktor kunci kekerasan seksual, terutama staf pelayanan psikososial dan keamanan/perlindungan.
- Bekerja sama dengan manajemen tempat penampungan dan/atau organisasi tempat penampungan untuk memasukkan alokasi tempat penampungan sebagai penyelesaian masalah keamanan jangka panjang. Dalam kasus dimana pelaku adalah seorang anggota keluarga, orang yang selamat/korban mungkin tidak akan aman berada di rumah keluarganya dan bila si korban sudah dewasa, dia mungkin perlu ditempatkan di tempat penampungan terpisah.
- Mengetahui peraturan nasional mengenai pembangunan atau pengurusan “tempat penampungan aman”.
- Bila memungkinkan, menggunakan tempat penampungan bagi perempuan yang mengidap gangguan jiwa oleh negara bisa menjadi pilihan untuk mengatasi masalah dana, dan untuk beberapa kasus bisa menjamin kerahasiaan tempat tersebut daripada sekadar tempat penampungan pengungsi.
- Memastikan bahwa orang yang selamat/korban memiliki akses untuk memperoleh jatah makanan dan barang-barang kebutuhan bukan makanan selama mereka tinggal di tempat penampungan.
- Memastikan bahwa orang yang selamat/korban dapat tinggal bersama anak-anak mereka di tempat penampungan bila mereka menginginkan demikian.
- Korban anak-anak harus tinggal bersama keluarga mereka. Bila mungkin, pindahkan si pelaku dari daerah tersebut. Bila tidak mungkin, pastikan bahwa si korban mendapat perhatian dan perawatan khusus di tempat penampungan aman.

3. Refugee Children: Guidelines on Protection and Care,pg. 54. UNHCR, 2002. <http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b84c6c67>

4. UN- Habitat Gender Policy. <http://www.unhabitat.org/pubs/genderpolicy/>

Bahan-bahan acuan utama

1. Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced persons. Guidelines for Prevention and Response. UNHCR, 2003. http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03.pdf

2. Guidelines on the Protection of Refugee Women. UNHCR, Geneva, 1991. <http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/partners/opendoc.pdf?tbl=PARTNERS&id=3b9cc1c14h>

LEMBAR TINDAKAN

7.3 Menerapkan strategi pengumpulan bahan bakar

Sektor : Tempat Penampungan dan Perencanaan Lokasi dan Barang-barang Kebutuhan bukan Makanan

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Dalam masa darurat dimana komunitas harus meninggalkan rumah mereka dan/atau lingkungan sekitar menjadi tidak aman, perempuan dan anak-anak perempuan menanggung risiko lebih besar mengalami kekerasan seksual ketika mereka keluar dari tempat penampungan/desa yang relative aman. Banyak alasan mengapa perempuan dan anak-anak perempuan meninggalkan tempat penampungan/desa, seperti misalnya mengumpulkan kayu bakar untuk penghangat dan/atau memasak, bekerja di ladang, mencari pekerjaan sebagai buruh harian, dan mengumpulkan makanan untuk hewan piaraan. Dalam banyak komunitas, perempuan dan anak-anak perempuan bertugas mengumpulkan bahan bakar untuk memasak dan penghangat. Seringkali mereka harus berjalan jauh ke area terpencil untuk mengumpulkan bahan bakar. Pengumpulan bahan bakar memberikan kesempatan bagi eksploitasi dan kejahatan seksual. Hal ini dapat terjadi dalam situasi dimana bahan bakar didistribusikan tanpa pemantauan dan/atau ketika perempuan dan anak-anak (misalnya keluarga yang dikepalai perempuan lajang, perempuan hamil, cacat, dlsb.) tidak mampu untuk berjalan jauh atau membawa beban berat, tidak memiliki uang untuk membeli bahan bakar, dan harus mencari cara lain untuk mendapat persediaan bahan bakar.

Pada halaman terakhir Lembar Tindakan ini terdapat beberapa contoh gagasan pengumpulan bahan bakar yang telah diterapkan di tempat-tempat penampungan. Ini termasuk skema distribusi dan pengawasan.

Pertimbangan utama distribusi dan pengumpulan bahan bakar adalah tingginya biaya dan kesulitan untuk mempertahankan satu gagasan setelah beberapa waktu.

Sebelum merancang strategi pengurangan dan pengumpulan bahan bakar dibuat, para aktor harus memahami kebutuhan, pokok-pokok persoalan dan kendala yang berhubungan dengan bahan bakar. Komunitas lokal/tuan rumah mungkin tidak ingin atau mengizinkan pengungsi untuk mengambil kayu bakar dari daerah sekitarnya, atau mungkin ada masalah lain yang berkaitan dengan rusaknya lingkungan hidup. Beberapa pengungsi perempuan mengumpulkan dan menjual kayu bakar sebagai mata pencaharian; sistem distribusi bahan bakar gratis akan berdampak buruk atas mereka.

Pengumpulan bahan bakar yang aman tetap menjadi persoalan yang menantang di setiap keadaan darurat dan membutuhkan kerjasama di antara organisasi dan anggota komunitas untuk memperoleh penyelesaian yang efektif.

Tindakan-tindakan utama

Tindakan-tindakan berikut berlaku untuk, setidaknya, sektor keamanan dan sektor lingkungan begitu juga sektor tempat penampungan/perencanaan tempat dan manajemen tempat penampungan. Kelompok kerja GBV harus memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan, dan bahwa setiap perkembangan dilaporkan dan didiskusikan dalam rapat-rapat kelompok kerja GBV. Dalam sebagian besar kasus, focal point sektor tempat penampungan/perencanaan tempat/barang-barang kebutuhan bukan makanan (lihat Lembar Tindakan 7.1, Menerapkan program-program perencanaan tempat dan tempat penampungan) membuat laporan tentang perkembangan dari pelaksanaan tindakan-tindakan utama tersebut.

1. Perhatikan dan analisis informasi mengenai lokasi, rute, peralatan dan keselamatan pribadi ketika mengumpulkan bahan bakar untuk penghangat dan memasak. Berpartisipasi dalam analisis situasi terkoordinasi sebagaimana dijelaskan dalam Lembar Tindakan 2.1, Melakukan analisis situasi cepat terkoordinasi.

- Berkonsultasi dengan perempuan dan anak-anak, pemimpin komunitas dan kelompok lain yang relevan.
- Berkonsultasi dengan komunitas lokal tentang keselamatan mereka ketika mengumpulkan bahan bakar dan meminta kesediaan mereka memberi akses kepada pengungsi untuk mengumpulkan bahan bakar.

2. Mengurangi konsumsi bahan bakar dengan mengambil langkah-langkah penghematan.

- Menyediakan tungku-tungku hemat bahan bakar untuk mengurangi jumlah bahan bakar yang dipergunakan.
 - (a) Berkonsultasi dengan perempuan untuk memilih jenis tungku hemat bahan bakar.
 - (b) Menggerakkan perempuan dan pemimpin komunitas untuk mendukung penggunaan tungku hemat bahan bakar dan untuk melatih kaum perempuan menggunakannya.
 - (c) Tambah jumlah penggilingan atau alat lain untuk mengurangi waktu memasak.

3. Menerapkan strategi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan selama mengumpulkan bahan bakar.

- Mengerahkan komunitas dalam kelompok campuran laki-laki dan perempuan untuk mengumpulkan bahan bakar dan tetap bersama-sama selama perjalanan.
- Melakukan patroli berkala bersama personal keamanan yang terpercaya, termasuk pasukan penjaga perdamaian PBB, untuk mengamankan area dimana pengungsi dapat mengatur pengambilan kayu bakar pada waktu tertentu.

4. Bila mungkin dan dalam jumlah yang pantas, mintakan dan pastikan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar pada masa awal keadaan darurat dan/atau menyediakan bahan bakar untuk anggota komunitas yang tidak mampu mengumpulkan bahan bakar mereka sendiri.

- Bahan bakar yang dibagikan harus dapat diterima oleh budaya setempat dan mudah digunakan.
- Perhatikan pokok persoalan dari pengungsi yang menjual kayu bakar sebagai mata pencaharian dan menanggung risiko menderita tindak kekerasan saat pengumpulan kayu bakar.
- Libatkan perempuan dan anak-anak perempuan dalam pendistribusian bahan bakar.
- Kenali kelompok yang harus diprioritaskan mendapat bahan bakar bila distribusi bahan bakar tidak untuk semua orang.

5. Berkoordinasi dengan kelompok kerja GBV, termasuk menyediakan informasi yang tidak mengungkap identitas kepada otoritas keamanan dan komunitas, tentang lokasi dan keadaan terjadinya kekerasan seksual selama pengumpulan bahan bakar. Pengungkapan informasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip acuan mengenai kerahasiaan dan tanpa identitas bagi orang yang selamat/korban.

- Bila orang yang selamat/korban tidak ingin mengungkap kasusnya kepada polisi/pihak keamanan, maka informasi kejadian dapat digabung secara anonim ke dalam laporan yang tidak memberi informasi mengenai identitas. (Lihat Lembar Tindakans 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberi orientasi kepada mitra dan 2.2, Kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi.)
- Gunakan informasi ini untuk memberitahu komunitas tentang risiko keamanan dan bersama-sama mengatasinya.

3. Cooking Options in Refugee Situations, UNHCR Handbook of Experiences in Energy Conservation and Alternative Fuels, 2002.

<http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=406c368f2>.

Bahan-bahan acuan utama

1. Minimum standards in shelter, settlement and non-food items, Sphere Handbook, 2004 Revised Edition Pg. 235. <http://www.sphereproject.org/>

2. Guidelines on the Protection of Refugee Women, UNHCR, Geneva, 1991. <http://www.unhcr.ch>

Contoh-contoh inisiatif pengumpulan bahan bakar

Darfur, Sudan

- Konflik bersenjata internal dengan tingkat penyerangan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak perempuan sipil yang tinggi. Penyerangan terjadi ketika perempuan/anak-anak perempuan meninggalkan desa atau tempat penampungan yang relative aman untuk beberapa alasan (mengambil makanan, air, bahan bakar, bekerja di ladang, dlsb.).
- Tentara African Union (AU) berpatroli sepanjang rute yang biasa dipakai untuk mengumpulkan kayu bakar untuk beberapa tempat penampungan orang yang berpindah (internally displaced persons, IDP). Patroli ini adalah bagian dari patroli AU, dan tidak terjadi setiap hari atau pada waktu yang sama.
- Kelompok kerja GBV melatih kaum perempuan untuk membuat dan menggunakan tungku hemat bahan bakar. Hal ini mengurangi jumlah kayu yang dibutuhkan untuk memasak, sehingga kemudian mengurangi waktu/jarak untuk mengumpulkan kayu bakar, mengurangi kemungkinan penyerangan terhadap mereka. Masalah keamanan dan akses menunda tersampainya proyek ini ke seluruh IDP.

Dadaab Refugee Camps, Kenya

- Keseluruhan jatah pembagian kayu bakar kepada semua keluarga yang tercatat menghabiskan dana US\$1.1-1.5 juta per tahun pada akhir 1990-an. Jatah yang diberikan adalah sekitar 30 persen dari konsumsi kayu bakar satu rumah tangga.
- Proyek pembagian kayu bakar bertujuan untuk 1) menurunkan kemungkinan adanya perampokan dan perkosaan saat mengumpulkan kayu bakar, dan 2) mengurangi dampaknya terhadap lingkungan hidup.
- Proyek ini menjadi sangat politis dan membutuhkan proses logistik yang rumit. Tidak ditemukan hubungan yang jelas dengan menurunnya kekerasan seksual, sebagian karena data kekerasan seksual yang tidak lengkap dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kasulu Refugee Camp, Tanzania

- Pengungsi diantar dengan truk untuk mengumpulkan kayu bakar, dikawal oleh staf LSM dan pegawai dari Departemen Sumber Daya Alam Tanzania setempat.
- Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan untuk melindungi area tertentu.

Bhutanese Refugee Camps, Nepal

- UNHCR menyediakan distribusi minyak tanah untuk setiap rumah tangga.
- Proyek ini mengurangi kebutuhan untuk mengumpulkan kayu bakar dan sebagai hasilnya mengurangi ketegangan antara pengungsi dan komunitas tuan rumah.
- Minyak tanah adalah bagian dari jatah berkala, yang jumlahnya terus berkurang seiring dengan berkurangnya dana. Para pengungsi melaporkan bahwa penjatahan tidak memenuhi kebutuhan mereka.

LEMBAR TINDAKAN

7.4 Menyediakan perlengkapan sanitasi untuk perempuan dan anak-anak perempuan

Sektor : Tempat penampungan dan Perencanaan Lokasi dan Barang-barang Kebutuhan Bukan Makanan

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Perlengkapan sanitasi dibutuhkan oleh perempuan usia produktif ketika sedang menstruasi bulanan, dan harus dimasukkan ke dalam pendistribusian domestik dan barang-barang rumah tangga pada masa keadaan darurat. Perlengkapan sanitasi yang layak menjaga harga diri perempuan dan anak-anak perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan penting setiap harinya bagi keberlangsungan hidup mereka sendiri dan juga keberlangsungan hidup dan berjalannya fungsi keluarga dan komunitas mereka.

Perlengkapan sanitasi memiliki dampak langsung terhadap harga diri, kesehatan, pendidikan, mobilitas, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, fungsi keluarga, partisipasi ekonomi dan keselamatan bagi perempuan dan anak-anak perempuan.

Rincian mengenai jenis-jenis perlengkapan sanitasi yang harus disediakan selama masa darurat harus benar-benar mempertimbangkan kelayakan menurut budaya setempat berdasarkan masukan dan pilihan dari perempuan dan anak-anak perempuan dalam komunitas tersebut. Sebagai contoh, sangat tidak pantas bagi perempuan Kosovo untuk menggunakan kain berwarna hitam, sementara perempuan/anak-anak perempuan dari daerah perkampungan Darfur kemungkinan tidak akan menggunakan pembalut kemasan, dan beberapa komunitas tidak terbiasa dengan produk-produk sekali pakai.

Tindakan-tindakan utama

Badan koordinator GBV, bersama dengan anggota kelompok kerja GBV, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan berikut ini terlaksana:

1. Menyediakan paket sanitasi pribadi untuk semua perempuan berusia setidaknya antara 13 dan 49 tahun.
 - Memperkirakan bahwa jumlah perempuan dan anak-anak perempuan yang menstruasi adalah 25 persen dari total populasi.
 - Berkonsultasi dengan perempuan dan anak-anak perempuan untuk mengenali perlengkapan bagaimana yang dianggap layak secara budaya.
 - Dalam beberapa situasi, pendistribusian pertama perlengkapan sanitasi perlu dilakukan tanpa konsultasi dengan komunitas, agar tidak terjadi penundaan. Bila hal ini terjadi, hal-hal berikut dapat digunakan sebagai panduan dalam

mempersiapkan perlengkapan sanitasi pertama, perubahan dapat dilakukan kemudian setelah berkonsultasi dengan perempuan dan anak-anak perempuan. Perlengkapan sanitasi dasar untuk satu orang selama enam bulan:

- (a) 2 meter persegi kapas penyerap untuk enam bulan atau 12 handuk sanitasi sekali pakai untuk satu bulan
 - (b) 3 celana dalam
 - (c) 250 gram sabun per bulan (di luar distribusi sabun lainnya)
 - (d) 1 ember (bisa bertahan selama 1 tahun)
- Bagikan perlengkapan sanitasi secara berkala selama masa keadaan darurat dan langsung bagikan kepada pengungsi yang baru datang.

2. Secara aktif mencari partisipasi dari kelompok yang relevan dalam pendistribusian perlengkapan sanitasi.

- Berkonsultasi dengan dan mempermudah partisipasi perempuan dan anak-anak perempuan.
- Mencari masukan dan partisipasi dari pelayanan kesehatan berbasis komunitas (misalnya orang-orang yang ditunjuk sebagai penggerak upaya-upaya kesehatan pribadi).

3. Apabila tersedia data yang akurat mengenai jumlah populasi berdasarkan jenis kelamin dan umur, gunakan data tersebut untuk membuat daftar penerima perlengkapan sanitasi. Apabila tidak ada data demikian, atau tidak pasti, tidak akurat atau tidak lengkap, berkolaborasi dengan perempuan dan anak-anak dan penyedia layanan kesehatan untuk membuat daftar distribusi. Hindari menggunakan kartu ransum keluarga atau pendaftaran kecuali ada indikasi jelas jenis kelamin dan umur.

Bahan-bahan acuan utama

1. Respect Our Rights: Partnership for Equality, Dialogue with Refugee Women. UNHCR, Geneva, 2001. http://www.womenscommission.org/pdf/unhcr_ref.pdf
2. Practical Guide to The Systematic Use of Standards and Indicators in UNHCR Operations. First Edition, January 2004. <http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/statistics/opedoc.pdf?tbl=STATISTICS&id=40eaa9804>
3. Minimum standards in shelter, settlement and non-food items, Sphere Handbook, 2004 Revised Edition. Pages 232-233. <http://www.sphereproject.org/>

8. Pelayanan Kesehatan dan Komunitas

Kegiatan-kegiatan sektor

Intervensi Pencegahan dan Penanganan Minimum

- 8.1 Memastikan akses perempuan kepada pelayanan kesehatan dasar
- 8.2 Menyediakan pelayanan kesehatan sehubungan dengan kekerasan seksual
- 8.3 Menyediakan dukungan psikologis dan sosial berbasis komunitas

LEMBAR TINDAKAN

8.1 Memastikan akses perempuan kepada pelayanan kesehatan dasar

Sektor : Pelayanan Kesehatan dan Komunitas

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Pada masa krisis, pelayanan perawatan kesehatan seringkali rusak atau tidak berfungsi. Tidak adanya koordinasi, terlalu penuh sesak, masalah keamanan dan persaingan prioritas semakin mengurangi ketersediaan pelayanan kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Pelayanan kesehatan yang berfungsi dengan baik dan terjangkau memberi perbedaan kepada kemampuan perempuan untuk mengurangi risiko kesehatan mereka dan anak-anak mereka. Kemampuan untuk melindungi kesehatan mereka dan kesehatan keluarga tidak hanya mendukung keberadaan perempuan, tetapi juga membuka jalan kepada pembagian informasi dan kesadaran komunitas mengenai kesehatan reproduksi, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Walaupun sebagian besar orang yang selamat/korban kekerasan seksual tidak mengungkapkan kejadian tersebut kepada semua orang, beberapa dari mereka berbicara dengan penyedia layanan kesehatan bila pelayanan kesehatan tersebut dapat dijangkau secara geografis, menjaga kerahasiaan, peka, terbuka untuk konsultasi pribadi, dan berkualitas baik. Pos-pos kesehatan dapat menjadi lokasi “netral” pertama untuk menyampaikan informasi dan kounseling mengenai kesehatan reproduksi perempuan dan anak-anak perempuan.

Perempuan lebih bisa mengakses informasi seperti ini bila disampaikan dalam konteks perawatan kesehatan dasar, dan bukan melalui program-program khusus atau terpisah. Pelayanan kesehatan juga harus tersedia untuk bantuan langsung kepada orang yang selamat/korban (lihat juga Lembar Tindakan 8.2, Menyediakan pelayanan kesehatan sehubungan dengan kekerasan seksual) untuk memperkecil konsekuensi berbahaya dari kekerasan seksual. Konsekuensi tersebut termasuk trauma emosi dan fisik yang parah; kehamilan yang tidak diinginkan; komplikasi akibat pengguguran kandungan; komplikasi kehamilan akibat trauma atau infeksi; komplikasi waktu melahirkan dan masalah-masalah bayi seperti berat badan rendah, yang mana pelayanan perawatan darurat kandungan harus tersedia.

Tindakan-tindakan utama

Tindakan-tindakan berikut berlaku untuk sektor kesehatan; yaitu organisasi yang melaksanakan program-program kesehatan, termasuk Perawatan Kesehatan Utama (PHC). Sektor kesehatan menunjuk

focal point yang secara berkala ikut serta dalam kelompok kerja GBV dan membuat laporan mengenai kemajuan sektor kesehatan dalam melaksanakan tindakan-tindakan kunci. Focal point berperan dalam fungsi lintas sektor dipimpin oleh badan koordinator GBV dan kelompok kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Lembar Tindakan untuk Koordinasi, Penilaian dan pemantauan, Sumber Daya Manusia, dan Informasi edukasi komunikasi.

1. Menerapkan Paket Pelayanan Awal Minimum (MISP) untuk kesehatan reproduksi dalam masa darurat. MISP adalah serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk mencegah kecacatan bahkan kematian akibat masalah kesehatan reproduksi dalam tahap awal masa keadaan darurat. Lihat Lembar Tindakan 1.3, Memastikan standar Sphere disebarluaskan dan dipatuhi dan IAWG Inter-Agency Field Manual for Reproductive Health in Refugee Situations, bab

2. Tujuan dan kegiatan-kegiatan MISP adalah:

- Menunjuk organisasi dan individu untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan MISP
- Mencegah dan menangani konsekuensi kekerasan seksual
- Mengurangi penularan HIV melalui:
 - (a) Memastikan penerapan pencegahan HIV/AIDS universal
 - (b) Menjamin ketersediaan kondom gratis.
- Mencegah eksese kelahiran dan kecacatan maternal dan kematian dengan cara:
 - (a) Menyediakan alat bantu kelahiran yang bersih untuk digunakan oleh ibu-ibu atau orang yang menolong kelahiran untuk mengenalkan proses yang bersih melahirkan di rumah.
 - (b) Menyediakan untuk bidan alat kelahiran untuk mempermudah proses kelahiran yang bersih dan aman di fasilitas kesehatan.
 - (c) Memulai pembentukan sistem pengalihan untuk menangani kasus kandungan yang berbahaya.
- Membuat rencana pengadaan pelayanan kesehatan reproduksi yang lengkap, terintegrasi di dalam perawatan kesehatan utama bila situasi mengijinkan.

2. Melakukan atau berpartisipasi dalam analisis situasi cepat. (Lihat Lembar Tindakan 2.1, Melakukan analisis situasi cepat terkoordinasi.) Analisis cepat pelayanan kesehatan harus dilakukan untuk melihat seberapa besar akses perempuan dan ketersediaan juga kapasitas dari pelayanan kesehatan untuk menangani kebutuhan perempuan. Analisis ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan:

- Jumlah, lokasi dan tingkat perawatan kesehatan

- di fasilitas kesehatan yang berfungsi
 - Jumlah staf kesehatan pada tingkatan yang berbeda, didata berdasarkan jenis kelamin
 - Banyaknya pelayanan yang tersedia untuk kesehatan reproduksi
 - Kendala sulitnya akses perempuan dan anak-anak perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, misalnya karena diskriminasi, masalah keamanan, biaya, privasi, bahasa, budaya (misalnya harus mendapat izin atau ditemani oleh kerabat laki-laki)
 - Indikator kesehatan reproduksi yang diketahui dan tantangan-tantangan yang ada bagi kesehatan
3. Memastikan pelayanan kesehatan menjangkau perempuan dan anak-anak perempuan
- Upayakan pelayanan kesehatan dasar tersedia untuk semua populasi yang terkena bencana, termasuk pengungsi, IDP, dan populasi tuan rumah.
 - Menempatkan pos kesehatan di tempat yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki oleh komunitas dan melalui rute yang aman. (Lihat Lembar Tindakan 7.1, Menerapkan program-program perencanaan lokasi dan tempat penampungan.)
 - Jam buka harus sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak-anak (waktu untuk tugas-tugas rumah tangga, mengumpulkan air dan kayu, dan waktu sekolah).
 - Membangun ruangan konsultasi pribadi/ruang pemeriksaan untuk perempuan dan anak-anak perempuan.
 - Merekrut staf perempuan bila mungkin.
 - Menyediakan akses 24-jam untuk pelayanan komplikasi kehamilan dan kekerasan seksual.
 - Memastikan bahwa penyedia kesehatan dapat berkomunikasi dalam bahasa-bahasa sub-kelompok etnis atau menyediakan penerjemah untuk setiap sub-kelompok etnis.
 - Membuat rencana-rencana evakuasi untuk alasan-alasan medis, atau pelayanan kesehatan yang dapat berpindah-pindah dimana pelayanan kesehatan setempat tidak dapat menangani pelayanan-pelayanan klinis.
 - Secara hati-hati mempertimbangkan akses untuk anak-anak perempuan, dengan memperhatikan masalah budaya setempat. Sebagai contoh, anak-anak perempuan pada usia tertentu, atau yang belum menikah, tidak akan diijinkan untuk berperan dalam pelayanan kesehatan reproduksi, sehingga kehadiran anak-anak perempuan di pos-pos kesehatan akan dipertanyakan, sehingga penanganan kasus secara anonim, kerahasiaan dan akses menjadi tidak mungkin.
4. Memotivasi dan mendukung para staf.
- Memastikan bahwa semua staf mengetahui dan mematuhi kerahasiaan medis. (Lihat Lembar Tindakan 4.2, Menyebarkan dan memberitahu semua mitra tentang kode etik.)
 - Melengkapi para staf di pos-pos kesehatan dan

rumah sakit dengan protokol yang jelas dan persediaan dan peralatan yang cukup.

- Memberikan informasi kepada staf kesehatan mengenai mutilasi alat kelamin perempuan, yang dapat mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak perempuan, dan membuat protokol-protokol tentang bagaimana menangani konsekuensi kesehatannya.
 - Menerapkan sistem pengawasan yang efisien dan mendukung.
5. Libatkan dan beri informasi kepada komunitas.
- Libatkan perempuan dalam pengambilan keputusan tentang ketersediaan dan memberikan nama yang layak, tidak menyerang dan tidak menjatuhkan stigma untuk pelayanan kekerasan seksual.
 - Membuat komunitas mengetahui pelayanan-pelayanan yang tersedia di pos kesehatan. (Lihat Lembar Tindakan 10.1, Memberikan informasi kepada komunitas tentang kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan.)
 - Memastikan akses laki-laki untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan kounseling, dan memberikan informasi kepada mereka mengenai kesehatan reproduksi perempuan dan mengenai risiko kesehatan dari kekerasan seksual kepada komunitas.

Bahan-bahan acuan utama

1. IAWG Inter-Agency Field Manual for Reproductive Health in Refugee Situations. UNHCR/UNFPA/WHO, 1999.
http://www.rhrc.org/resources/general%5Ffieldtools/iafm_menu.htm
2. Sphere Handbook, chapter on Health Services.
http://www.sphereproject.org/handbook/hdbkpdf/hdbk_c5.pdf
3. Clinical Management of Rape Survivors. Developing protocols for use with refugees and internally displaced persons, revised edition, WHO, UNHCR, 2005.
http://www.who.int/reproductive-health/publications/rhr_02_8_clinical_management_survivors_of_rape/clinical_mngt_survivors_of_rape.pdf
4. Guidelines for HIV/AIDS Interventions in Emergency Settings, IASC, 2004.
<http://www.humanitarianinfo.org/iasc/IASC%20products/FinalGuidelines17Nov2003.pdf>
5. A Practical Approach to Gender-Based Violence, A Programme Guide for Health Care Providers and Managers. UNFPA, 2001.
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/99_file-name_

genderbased.pdf
guidelines for Gender-based Violence Interventions
in Humanitarian Settings

6. MISP fact sheet. Women's Commission for
Refugee Women and Children, 2003.
http://www.rhrc.org/pdf/fs_misp.pdf and check
list.

LEMBAR TINDAKAN

8.2 Menyediakan pelayanan kesehatan sehubungan dengan kekerasan seksual

Sektor : Pelayanan Kesehatan dan Komunitas

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Tanggung jawab penyedia perawatan kesehatan adalah menyediakan perawatan yang layak untuk orang yang selamat/korban kekerasan seksual, untuk mencatat rincian kejadian, pemeriksaan kesehatan dan informasi relevan lainnya, dan, dengan persetujuan orang tersebut, mengumpulkan bukti-bukti forensik yang dapat digunakan dalam penyelidikan selanjutnya. Bukan bagian dari tanggung jawab penyedia perawatan kesehatan untuk menentukan apakah seseorang telah mengalami perkosaan atau tidak. Hal itu adalah masalah hukum. Pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan harus bersungguh-sungguh menangani orang yang selamat/korban kekerasan seksual.

Koordinator kesehatan harus memastikan bahwa semua staf peka terhadap kekerasan seksual dan mengetahui dan mematuhi kerahasiaan medis. Penyedia perawatan kesehatan (dokter, mantri, perawat, dlsb.) harus menciptakan protokol yang disepakati bagi perawatan orang yang selamat/korban perkosaan, dan protokol ini harus sejalan dengan protokol-protokol nasional terkait dan standar internasional yang berlaku (lihat bahan-bahan acuan utama di bawah). Penyedia perawatan kesehatan harus mengetahui cara menyediakan perawatan sesuai dengan protokol yang ada dan memiliki peralatan dan persediaan yang dibutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut dan acuan rinci tentang tindakan-tindakan dalam Lembar Tindakan ini, lihat Penanganan Klinis untuk Korban Perkosaan, Membuat protokol untuk diterapkan kepada pengungsi dan IDP. (Lihat acuan utama di bawah.)

Mengutamakan merekrut penyedia perawatan kesehatan perempuan, tetapi kurangnya pekerja kesehatan perempuan yang terlatih seharusnya tidak menghalangi penyediaan kesehatan bagi korban perkosaan.

Seluruh penyedia perawatan kesehatan harus mengetahui tentang hukum dan kebijakan yang relevan yang mengatur tentang penyedia perawatan kesehatan dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Sebagai contoh, mungkin ada undang-undang yang melegalkan pengguguran kandungan dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Sebagai tambahan, penyedia perawatan akan bekerja sama dengan polisi dalam kasus dimana orang yang selamat/korban (atau dalam kasus anak, oleh keluarganya) menginginkan keadilan hukum. Di banyak negara, ada formulir polisi yang harus diisi oleh penyedia perawatan kesehatan. Para

penyedia perlu mengetahui cara mengisi formulir ini. Beberapa negara memiliki undang-undang yang memberikan mandat kepada penyedia perawatan kesehatan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual kepada polisi atau badan pemerintahan lain. Adanya undang-undang sedemikian menyulitkan penyedia perawatan kesehatan dalam menjaga kerahasiaan medis dan pilihan orang yang selamat/korban jika dia tidak ingin menempuh jalan hukum dan tidak menginginkan orang lain mengetahui peristiwa tersebut. Dengan adanya undang-undang tentang kewajiban melapor ini, banyak orang yang selamat tidak mengungkapkan kasus kekerasan seksual mereka kepada penyedia perawatan kesehatan karena takut akan pendapat publik. Pertimbangan lain yang berkaitan dengan tindakan hukum adalah bahwa penyedia perawatan kesehatan bisa saja diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan tentang temuan-temuan medis yang diperoleh saat pemeriksaan. Mengingat hal ini, lebih baik untuk memiliki penyedia perawatan kesehatan nasional untuk melakukan pemeriksaan sebab dia lebih mungkin untuk hadir di ruang pengadilan (staf internasional cepat berpindah-pindah).

Tindakan-tindakan utama

Aktor dalam sektor kesehatan harus membuat protokol yang disepakati untuk perawatan orang yang selamat/korban kekerasan seksual. Penyedia perawatan kesehatan di setiap pos kesehatan harus dilatih cara menggunakan protokol. Kegiatan-kegiatan protokol harus dimasukkan ke dalam tindakan-tindakan utama berikut:

1. Mempersiapkan korban
 - Sebelum memulai pemeriksaan fisik, persiapkan orang yang selamat/korban. Pemeriksaan yang tidak sensitif akan kebutuhan mereka akan mengakibatkan tekanan emosi kepada orang yang selamat/korban.
 - Perkenalkan diri dan terangkan mengenai prosedur-prosedur utama (misalnya pemeriksaan panggul).
 - Tanyakan apakah dia menginginkan kehadiran orang tertentu untuk memberi dukungan.
 - Dapatkan persetujuan dari korban/orang yang selamat atau orangtua bila korban masih di bawah umur.
 - Yakinkan korban/orang yang selamat bahwa dialah yang mengendalikan pemeriksaan dan bahwa dia memiliki hak untuk menolak aspek apapun dari pemeriksaan yang tidak ingin dijalani.
 - Jelaskan bahwa temuan-temuan bersifat rahasia.

2. Melakukan pemeriksaan
 - Pada saat pemeriksaan fisik, normalkan terlebih dahulu gejala-gejala somatis kepanikan atau kecemasan, seperti pusing, sesak napas, perasaan berdebar-debar dan tercekik yang tidak dapat dijelaskan secara medis (tidak ada kelainan pada organ tubuh). Caranya adalah dengan menjelaskan menggunakan bahasa sederhana bahwa sensasi tubuh seperti itu umum ditemukan pada orang yang sangat ketakutan setelah mengalami hal yang sangat menakutkan, dan bukan karena penyakit atau luka-luka fisik; daripada bahwa sensasi tubuh tersebut adalah bagian dari mengalami hal yang mengguncang emosi, dan akan berangsur-angsur menghilang ketika emosi berkurang.
 - Melakukan pemeriksaan medis hanya bila korban setuju, Pemeriksaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, rahasia, sistematis, dan lengkap, sesuai dengan protokol yang disepakati.

3. Menyediakan perawatan yang sungguh-sungguh dan rahasia sebagai berikut

- Perawatan komplikasi yang dapat menimbulkan kematian dan pindahkan bila perlu
- Perawatan atau perawatan awal STI
- Pencegahan pasca kejadian untuk HIV (PEP), bila perlu
- Memasang kontrasepsi
- Merawat luka-luka luar
- Kounseling dukungan (lihat Lembar Tindakan 8.3, Menyediakan dukungan psikologis dan sosial berbasis komunitas untuk orang yang selamat/korban)
- Mendiskusikan pokok-pokok persoalan keamanan dan membuat rencana keselamatan
- Membuat pengalihan, dengan persetujuan korban, ke pelayanan lain seperti dukungan sosial dan emosi, keamanan, tempat penampungan, dlsb. (Lihat Lembar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra; 7.2, Memastikan bahwa orang yang selamat/korban kekerasan seksual memiliki tempat penampungan aman; 8.3, Menyediakan dukungan psikologis dan sosial berbasis komunitas untuk orang yang selamat/korban.)

4. Mengumpulkan bukti forensik minimum

- Persyaratan hukum setempat dan fasilitas laboratorium menentukan apakah perlu dan bukti apa yang harus dikumpulkan. Pekerja kesehatan tidak boleh mengumpulkan bukti yang tidak dapat diproses atau yang tidak akan digunakan.
- Beri pemahaman kepada korban tentang pengambilan bukti bila pada akhirnya mau membawa kasus tersebut ke pengadilan. Yakinkan dia bahwa informasi tersebut hanya akan diberikan kepada pihak yang berwenang dengan persetujuannya.
- Untuk semua kasus kekerasan seksual, semua temuan-temuan dari pemeriksaan medis yang

dapat mendukung cerita korban harus tercatat rapi, termasuk keadaan pakaiannya. Catatan medis adalah bagian dari dokumen hukum dan dapat dimasukkan sebagai bukti bila korban memutuskan untuk membawa kasusnya ke pengadilan.

- Simpan pakaian yang rusak (bila Anda dapat memberikan baju ganti untuk korban) dan serpihan-serpihan tidak dikenali pada pakaiannya atau tubuhnya, yang dapat mendukung ceritanya.
- Bila ada mikroskop, penyedia perawatan kesehatan yang terlatih atau pekerja laboratorium dapat memeriksa sampel cairan untuk memeriksa adanya sperma, yang mana bisa membuktikan terjadinya penetrasi.

5. Daftar persediaan

Lihat halaman 68.

Bahan-bahan acuan utama

1. Clinical Management of Rape Survivors. Developing protocols for use with refugees and internally displaced persons, revised edition. WHO/UNHCR, 2005.

http://www.who.int/reproductive-health/publications/rhr_02_8_clinical_management_survivors_of_rape/clinical_mngt_survivors_of_rape.pdf

2. Reproductive Health Kits for Crisis Situations, 3rd edition. UNFPA, 2004, page 13, RH kit 3. www.aidsandemergencies.org/RHKit_manual_en.pdf

3. IAWG Inter-Agency Field Manual for Reproductive Health in Refugee Situations. UNHCR/UNFPA/WHO, 1999. Chapter 4. <http://www.rhrc.org/pdf/iafm-ch4.pdf>

4. Guidelines for HIV/AIDS Interventions in Emergency Settings, IASC, 2004. <http://www.humanitarianinfo.org/iasc/IASC%20products/FinalGuidelines17Nov2003.pdf>

5. MISIP fact sheet, Women's Commission for Refugee Women and Children, 2003. http://www.rhrc.org/pdf/fs_misp.pdf and checklist

Daftar Persediaan

1. Protokol	Ada
• Protokol medis tertulis dalam bahasa penyedia	
2. Personel	Ada
• Profesional perawat kesehatan (lokal) terlatih (dapat dipanggil sewaktu-waktu 24 jam per hari)	
• “Bahasa yang sama” pekerja kesehatan perempuan atau pendamping di dalam ruangan selama pemeriksaan	
3. Perabotan/Suasana	Ada
• Ruangan (pribadi, tenang, dapat dicapai, memiliki akses ke toilet)	
• Meja pemeriksaan	
• Lampu, disarankan yang terpasang (obor dapat menakutkan bagi anak-anak)	
• Akses ke tempat pembersihan untuk mensterilkan alat-alat	
4. Persediaan	Ada
• “Kotak Perkosaan” untuk mengumpulkan bukti forensik, termasuk:	
✓. Speculum	
✓. Pita pengukur untuk mengukur luka memar, luka goresan, dlsb.	
✓. Kantong-kantong kertas untuk tempat bukti yang dikumpulkan	
✓. Kertas pelekut untuk menyegel dan memberi label	
• Seperangkat pakaian ganti	
• Alat bantu pernapasan untuk kasus sesak napas	
• Alat-alat medis yang steril untuk menjahit luka, dan bahan-bahan untuk menjahit luka	
• Jarum, alat suntik	
• Penutup (gaun, kain penutup, seprei) untuk menutup korban selama pemeriksaan	
• Perlengkapan sanitasi (pembalut atau kain)	
5. Obat-obatan	Ada
• Untuk perawatan STI sesuai protokol suatu negara	
• Obat-obatan PEP, bila perlu	
• Pil kontrasepsi dan/atau IUD	
• Penghilang rasa sakit (misalnya parasetamol)	
• Bius lokal untuk menjahit luka	
• Antibiotik untuk perawatan luka luar	
6. Perlengkapan Administratif	Ada
• Tabel medis dilengkapi pictogram	
• Formulir pernyataan persetujuan	
• Brosur berisi informasi untuk perawatan pasca perkosaan (bagi korban)	
• Tempat penyimpanan yang aman, terkunci untuk menyimpan catatan-catatan rahasia	

LEMBAR TINDAKAN

8.3 Menyediakan dukungan psikologis dan sosial berbasis komunitas

Sektor : Pelayanan Kesehatan dan Komunitas

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Kekerasan seksual menyebabkan trauma fisik dan psikologis. Orang yang selamat/korban dapat mengalami sederetan konsekuensi psikologis, seperti rasa sedih dan depresi; menyalahkan diri sendiri; stress somatis; masalah-masalah seksual; perubahan suasana hati dengan cepat; masalah-masalah disebabkan kemarahan dan kegelisahan (tidak bisa tidur, selalu takut, stress, dan takut “menjadi gila”). Bagi kebanyakan orang yang selamat, pengalaman tersebut merupakan reaksi emosi yang normal terhadap trauma.

Setelah memperoleh dukungan sosial dan emosi, banyak orang yang selamat belajar untuk menghadapinya dan rasa tertekan pun menurun berangsur-angsur. Dalam beberapa kasus, orang yang selamat/korban dapat menderita tekanan psikologis yang tinggi dan disfungsi yang mengarah kepada gangguan jiwa. Mereka harus dialihkan ke penyedia kesehatan untuk evaluasi dan perawatan.

Ada juga konsekuensi sosial. Sebagian besar masyarakat cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual. Stigma sosial, pengasingan dan penolakan – termasuk oleh suami dan keluarga – adalah konsekuensi terberat, seringkali membuat upaya pemulihan emosi sulit dilakukan karena mereka keluar dari kegiatan setiap hari dan dari dukungan sosial. Dukungan emosional dan/atau kounseling termasuk menjaga kerahasiaan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh; dengan lembut membuat korban yakin bahwa kejadian itu bukan kesalahan mereka dan bahwa emosi yang timbul adalah reaksi normal dalam keadaan yang ekstrim. Dukungan seperti ini dapat dilakukan di tengah-tengah komunitas melalui penolong-penolong alami seperti TBA, bidan, dan anggota keluarga (misalnya saudara perempuan atau bibi). Terkadang pemimpin agama dapat memainkan peran penting dalam memberi dukungan komunitas kepada korban. Tidak semua orang yang selamat/korban membutuhkan atau menginginkan dukungan emosional, kounseling atau bantuan dari komunitas. Walau demikian, akses untuk dukungan psikologis dan sosial harus tersedia, bahkan pada tahap awal masa darurat. Hal ini mensyaratkan:

- Sistem pengalihan antara pelayanan kesehatan dan individu/organisasi yang menyediakan dukungan psikologis dan sosial dalam komunitas.
- Ketersediaan perawatan kesehatan mental dasar di semua pelayanan kesehatan umum dan reproduksi
- Berkolaborasi dengan keluarga, komunitas dan sistem dukungan keagamaan

Tindakan-tindakan utama

Tindakan-tindakan berikut berlaku untuk sektor pelayanan kesehatan dan komunitas, yaitu semua organisasi yang menyediakan pelayanan-pelayanan kesehatan, psikologis, dan/atau pelayanan sosial. Setiap sektor menunjuk focal point yang secara berkala berperan dalam kelompok kerja GBV dan memberikan laporan tentang pencapaian sektor pelayanan kesehatan/komunitas dalam melaksanakan tindakan-tindakan utama dalam Lembar Tindakan ini. Para focal point juga berperan dalam fungsi lintas sektor yang dipimpin oleh badan koordinator GBV dan kelompok kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Lembar Tindakan untuk Koordinasi, Penilaian dan pemantauan, Sumber Daya Manusia, dan Informasi pendidikan komunikasi.

1. Menunjuk dan menggerakkan sumber-sumber layak yang ada dalam komunitas, seperti TBA, kelompok perempuan, pemimpin agama, dan program-program pelayanan komunitas.
 - Mendiskusikan pokok-pokok persoalan kekerasan seksual, kebutuhan korban akan dukungan emosional, dan mengevaluasi individu, kelompok dan organisasi yang ada dalam komunitas untuk memastikan bahwa mereka bersifat mendukung, bersungguh-sungguh, tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan, dan menghormati korban.
 - Menciptakan sistem untuk pengalihan secara rahasia inter dan antara sumber-sumber pemberi dukungan secara psikologis dan sosial, pelayanan kesehatan dan komunitas, begitu juga sektor keamanan dan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Lembar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra.
2. Pada setiap pelayanan kesehatan dan komunitas, dengarkan dan beri dukungan emosional ketika si korban mengungkapkan atau menyatakan secara tidak langsung bahwa dia telah mengalami kekerasan seksual. Berikan informasi, dan alihkan untuk mendapat penanganan lanjutan sebagaimana dibutuhkan dan disetujui oleh korban.
 - Dengarkan korban dan tanyakan hanya pertanyaan yang tidak bersifat menyerang, relevan, dan tidak menghakimi hanya untuk mendapatkan klarifikasi. Jangan menekan dia untuk mendapat informasi lebih banyak dari yang dia sanggup berikan (jangan mengadakan wawancara psikologis satu sesi). Ingat bahwa dia mungkin membeberkan peristiwa tidak secara berurutan, dan rincian peristiwa dapat berubah seiring

- dengan perubahan emosionalnya. Ini bukan indikasi bahwa dia sedang berbohong, tapi lebih karena secara emosional sedang kecewa.
- Bila orang yang selamat/korban menyalahkan diri sendiri, penyedia perawatan perlu dengan lembut meyakinkan dia bahwa kekerasan seksual adalah kesalahan pelaku dan tidak pernah menjadi kesalahan korban/orang yang selamat.
 - Cari tahu kebutuhan dan masalah-masalahnya, memberikan perhatian kepada masalah keamanannya; pastikan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi; anjurkan tetapi jangan memaksakan adanya pendamping yang dapat dipercaya; dan melindungi dia dari gangguan. (Lihat Lembar Tindakan 3.2, Menyediakan keamanan sesuai kebutuhan dan 8.2, Menyediakan pelayanan kesehatan untuk kekerasan seksual.)
 - Memastikan keselamatan, membantu dia untuk membuat rencana keselamatan yang realistis, bila perlu. (Lihat Lembar Tindakan 7.2, Memastikan bahwa orang yang selamat/korban mendapatkan tempat penampungan aman.)
 - Berikan informasi secara jujur dan lengkap tentang pelayanan dan fasilitas yang tersedia.
 - Jangan memberitahukan korban tentang apa yang harus dia lakukan, atau pilihan yang harus diambil. Sebaiknya, berdayakan dia dengan menolungnya menyelesaikan masalah dengan mengklarifikasikan masalah, membantunya mengenali cara-cara untuk menghadapi masalah dengan baik, mengetahui pilihan-pilihan yang dia miliki, dan menilai kebaikan dan keburukan dari pilihan-pilihan tersebut. Hormati pilihannya dan keinginannya untuk dipindahkan dan mencari pelayanan tambahan.
 - Mendiskusikan dan menganjurkan cara-cara positif yang dapat diambil untuk mengatasi masalah, yang bervariasi tergantung individu dan budaya. Ajak untuk memulai kembali kegiatannya sehari-hari. Anjurkan peran serta aktif dalam kegiatan keluarga orang yang selamat/korban dan komunitas. Ajarkan teknik relaksasi. Halangi pengambilan cara negatif untuk mengatasi masalah; secara khusus halangi penggunaan alkohol dan obat-obatan, karena korban trauma berada di bawah risiko besar timbulnya masalah penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan.
 - Bila mungkin, tumbuhkan dukungan dari anggota keluarga. Keluarga (mereka yang bukan pelaku) dapat memegang peranan penting dalam memberi dukungan kepada korban/orang yang selamat secara emosional dan praktikal. Sebagai contoh, mereka dapat menolong korban/orang yang selamat untuk kembali kepada kegiatan sehari-hari seperti biasa (misalnya mengurus anak, bekerja, kerja-kerja rumah tangga, sekolah) sesudah pemulihan fisik akibat kekerasan seksual. Sebaliknya, keluarga dapat memperbesar trauma emosional jika mereka menyalahkan korban atas kejadian tersebut, menolaknya, atau marah karena dia berbicara tentang kekerasan seksual.
3. Menangani kebutuhan khusus anak-anak.
 - Orang-orang yang mewawancarai dan membantu korban anak/remaja harus memiliki pengetahuan dasar mengenai perkembangan anak dan kekerasan seksual.
 - Menggunakan metode yang kreatif (misalnya permainan, dongeng, dan menggambar) untuk membuat anak-anak kecil merasa santai dan mudah berkomunikasi.
 - Gunakan bahasa dan istilah yang sesuai dengan umurnya.
 - Bila dianggap layak, sertakan anggota keluarga yang terpercaya untuk meyakinkan anak/remaja dipercayai, didukung, dan dibantu agar bisa kembali ke kehidupan normal.
 - Jangan keluarkan anak dari tengah-tengah keluarga untuk memberikan perawatan (kecuali dilakukan untuk melindungi anak dari penganiayaan atau penelantaran).
 - Jangan pernah memaksa, menipu atau menahan seorang anak yang Anda yakini telah mengalami kekerasan seksual. Pemaksaan, penipuan, dan kekuasaan seringkali menjadi ciri-ciri dari penganiayaan, dan “penolong” yang menggunakan teknik tersebut hanya akan lebih melukai si anak.
 - Selalu menjadikan kepentingan-kepentingan si anak sebagai acuan.
 4. [Hanya untuk penyedia perawatan kesehatan] Menyangkut terapi psikotropis bagi korban/orang yang selamat dewasa, sediakan pengobatan hanya untuk kasus-kasus luar biasa. Lihat Bab 6 mengenai Manajemen Klinis bagi Korban Perkosaan sebagai panduan. Sebagai catatan, benzodiazepines – yang dapat secara cepat menimbulkan ketergantungan pada korban trauma – seringkali terlalu banyak diberikan. Perlu berhati-hati.
 5. Menggalang dukungan psikologis dan sosial, termasuk kegiatan-kegiatan reintegrasi sosial.
 - Selalu mematuhi prinsip-prinsip acuan dalam mengambil tindakan:
 - (a) Memastikan keselamatan dan keamanan.
 - (b) Menjamin kerahasiaan.
 - (c) Menghormati keinginan, pilihan dan harga diri orang yang selamat/korban.
 - (d) Memastikan tidak adanya diskriminasi.
 - (e) Pelatihan untuk dukungan psikologis/konseling harus diikuti oleh adanya pengawasan.
 - Memberikan advokasi tentang korban/orang yang selamat dengan badan-badan kesehatan, sosial, hukum dan keamanan yang relevan bila korban/orang yang selamat telah memberikan persetujuan. Bila perlu, mengatur pengawasan rahasia menuju tempat-tempat pelayanan yang dibutuhkan.
 - Memulai dialog komunitas untuk meningkatkan kesadaran bahwa kekerasan seksual bukanlah

kesalahan korban/orang yang selamat dan untuk menemukan penyelesaian terjadinya pembunuhan balas dendam, penolakan komunal dan pengasingan. Berkolaborasi dengan upaya-upaya BCC/IEC dalam Lembar Tindakan 10.1, Memberikan informasi kepada komunitas mengenai kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan.

- Menyediakan dukungan materi yang dibutuhkan melalui pelayanan kesehatan atau pelayanan komunitas lainnya.
- Memudahkan partisipasi dan integrasi para korban ke dalam komunitas. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang konkret, memiliki tujuan dan berdasarkan kepentingan umum (misalnya proyek-proyek bantuan, mengajar anak-anak) dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan kemandirian.
- Anjurkan penggunaan sumber-sumber tradisional yang baik. Bila mungkin, berkolaborasi dengan dukun tradisional atau pendeta, yang, masing-masing, dapat melakukan upacara penyucian yang penuh makna atau berdoa untuk orang yang selamat/korban kekerasan seksual. Banyak dari kebiasaan tersebut bisa sangat menguntungkan; tetapi, pastikan bahwa mereka tidak melanggengkan penyalahan terhadap korban sebab, kalau tidak, akan lebih melukai orang yang selamat/korban.
- Bekerja sama dengan sektor lain. Tindakan-tindakan utama dukungan sosial tambahan terdapat pada Lembar Tindakan untuk Koordinasi, Perlindungan; Tempat Penampungan, Perencanaan Tempat dan Barang-barang Kebutuhan Bukan Makanan; dan Perubahan Prilaku komunikasi/informasi, pendidikan dan komunikasi.

5. Clinical Management of Survivors of Rape. WHO/UNHCR/UNFPA, Geneva, 2004.

http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/373_filename_clinical-mgt-2005rev1.pdf

Bahan-bahan acuan utama

1. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Sphere Project, Geneva, 2004, pp 291-293. <http://www.sphereproject.org/hand-book/index.htm>

2. Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response. UNHCR, Geneva, 2003. http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03.pdf

3. Gender-Based Violence: Emerging Issues in Programs Serving Displaced Populations. Vann B., RHRC, 2002. http://www.rhrc.org/pdf/gbv_vann.pdf

4. Mental Health in Emergencies: Psychological and Social Aspects of Health of Populations Exposed to Extreme Stressors. WHO: Geneva, 2003. http://www.who.int/mental_health/media/en/640.pdf

9. Pendidikan

Kegiatan-kegiatan sektor

Intervensi Pencegahan dan Penanganan Minimum

9.1 Memastikan akses anak-anak perempuan dan anak-anak lelaki untuk mendapatkan pendidikan

LEMBAR TINDAKAN

9.1 Memastikan akses anak-anak perempuan dan anak-anak lelaki untuk mendapatkan pendidikan

Sektor : Pendidikan

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Perempuan dan anak-anak, terutama anak-anak perempuan, dalam masa keadaan darurat menghadapi ancaman kekerasan seksual, termasuk perkosaan, eksploitasi dan kejahatan seksual, pelacuran, penjualan manusia, dan kehamilan yang dipaksakan. Memastikan bahwa anak-anak perempuan dapat bersekolah dalam lingkungan belajar yang aman semasa situasi darurat dapat melindungi mereka dari kekerasan seksual dan bentuk penganiayaan lainnya. Sangat penting untuk mengadakan kegiatan belajar berkualitas mengenai ketrampilan hidup, dengan mengajarkan soal pencegahan kekerasan seksual. Sekolah dapat dan harus menyediakan lingkungan aman bagi anak-anak perempuan dan lelaki. Kondisi normal dan rutin dengan bersekolah setiap hari adalah faktor yang menstabilkan dan penting bagi perkembangan anak. Anak-anak dan orang muda yang bersekolah lebih mungkin menunda usia untuk seks pertama – terlebih bila mereka mendapatkan dukungan dan mempelajari ketrampilan-ketrampilan untuk menunda memulai kegiatan seksual. Sekolah adalah tempat bukan hanya untuk mengajarkan mata pelajaran tradisional, tetapi juga untuk menyebarkan pesan-pesan tentang keselamatan hidup dan keberlanjutan hidup. Sekolah adalah tempat efektif untuk pendidikan masalah-masalah seperti HIV/AIDS, ranjau, hak asasi manusia, toleransi, dan resolusi konflik tanpa kekerasan, begitu pun masalah-masalah lain. Kecil kemungkinan anak-anak yang bersekolah bergabung dengan militer dan kelompok-kelompok bersenjata.

Tindakan-tindakan utama

Tindakan-tindakan berikut berlaku bagi sektor pendidikan. Sektor pendidikan menunjuk seorang focal point yang secara berkala berperan dalam kelompok kerja GBV dan membuat laporan tentang pencapaian sektor tersebut dalam pelaksanaan tindakan-tindakan utama. Focal point berperan dalam fungsi-fungsi lintas sektor yang dipimpin oleh badan koordinator GBV dan kelompok kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Lembar Tindakan untuk Koordinasi, Penilaian dan pemantauan, Sumber Daya Manusia, dan Informasi edukasi komunikasi.

1. Merancang program-program pendidikan menggunakan panduan dari Standar Minimum untuk Pendidikan di Masa Keadaan Darurat.

2. Mempertahankan anak-anak, terutama yang berada di sekolah dasar, untuk tetap bersekolah atau menciptakan tempat belajar yang baru bila bangunan sekolah tidak ada. Beberapa strategi efektif dapat diterapkan, tergantung situasi, seperti:

- Menghubungkan pelayanan-pelayanan kemanusiaan (seperti paket makanan khusus untuk keluarga murid) dengan sekolah.
- Memantau anak-anak yang putus sekolah melalui daftar bantuan untuk mengetahui apakah dan mengapa anak-anak tidak lagi bersekolah.
- Bila anak-anak tidak lagi bersekolah karena kekurangan makanan, sediakan makanan di sekolah.
- Sediakan bantuan berupa uang sekolah, barang-barang keperluan sekolah dan seragam.
- Tawarkan jam sekolah yang fleksibel agar anak-anak yang tidak dapat hadir di sekolah sepanjang hari karena tugas-tugasnya, seperti anak yang merawat orangtua yang sakit atau anak yatim piatu.

3. Mencegah kekerasan seksual dan memperbesar akses korban anak untuk mendapatkan pelayanan bantuan dengan meningkatkan kesadaran murid dan guru mengenai kekerasan seksual dan menerapkan strategi pencegahan di sekolah.

- Memberitahukan guru soal kekerasan seksual, strategi pencegahan, potensi efek sesudahnya terhadap anak-anak, dan cara untuk mendapatkan pertolongan dan pelayanan kekerasan seksual dalam komunitas.
- Secara aktif merekrut guru-guru perempuan.
- Menyertakan diskusi mengenai kekerasan seksual dalam pelatihan ketrampilan hidup untuk guru, anak-anak perempuan dan lelaki dalam seluruh kondisi belajar-mengajar.
- Memastikan semua guru menandatangani kode etik yang melarang hubungan seks dengan anak-anak dan orang muda.
- Membangun sistem pencegahan dan pemantauan untuk mengenali risiko di sekolah dan menghindari kemungkinan guru untuk mengeksploitasi atau menganiaya murid-murid secara seksual.
- Menyediakan bahan-bahan mengajar untuk guru (sebagai contoh, “Sekolah di dalam kotak” dan perlengkapan rekreasi yang menyertakan informasi mengenai kekerasan berdasarkan gender dan perawatan bagi korban).
- Menyediakan dukungan psikososial untuk guru-guru yang sedang mengatasi masalah psikososial mereka sendiri berikut murid-murid mereka. Dukungan tersebut akan mengurangi perilaku

negatif atau merusak yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

4. Membangun kegiatan dan mekanisme perlindungan berbasis komunitas di tempat-tempat dimana anak-anak berkumpul untuk belajar dengan tujuan mencegah kekerasan seperti kekerasan seksual dan/atau perekrutan oleh kelompok-kelompok bersenjata.

- Menyediakan fasilitas rekreasi, permainan dan olahraga di sekolah dan pastikan akses dan penggunaan oleh baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Perhatikan kebiasaan dan kecenderungan dari budaya komunitas mengenai gender.
- Mendapatkan dukungan komunitas untuk melaksanakan program kekerasan seksual di sekolah dengan cara menyampaikan pada kelompok orangtua dan komunitas mengenai kekerasan seksual. (lihat Lembar Tindakan 10.1, Memberikan informasi kepada komunitas tentang kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan) dan risiko yang dihadapi anak-anak perempuan dalam masa darurat.
- Memastikan orangtua dan komunitas mengetahui tentang kode etik para guru.

Bahan-bahan acuan utama

1. Minimum Standards for Education in Emergencies, Interagency Network on Education in Emergencies (INEE).

<http://www.ineesite.org/standards/default.asp>

2. Global Information Networks in Education:
www.ginie.org

3. UNICEF Life skills website: www.unicef.org/programme

4. UNICEF School in a box and Recreation in a box. To order:

10. Informasi, Pendidikan, Komunikasi

Fungsi-fungsi pendukung

Intervensi Pencegahan dan Penanganan Minimum

- 10.1 Memberikan informasi kepada komunitas tentang kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan
- 10.2 Menyebarluaskan informasi tentang IHL kepada orang-orang bersenjata

LEMBAR TINDAKAN

10.1 Memberikan informasi kepada komunitas tentang kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan

Fungsi : Informasi Pendidikan Komunikasi

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Di seluruh dunia, sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan dan mayoritas orang yang selamat/korban tidak mendapat pertolongan yang seharusnya. Tentunya ada konsekuensi serius dan membahayakan jiwa bagi orang yang selamat/korban yang tidak menerima perawatan kesehatan yang layak dan pelayanan lain. Tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual secara langsung berhubungan dengan tiga faktor: 1) stigma sosial – atau ketakutan korban akan stigma sosial – yang biasanya muncul di hampir semua masyarakat; 2) tidak adanya kesadaran mengenai potensi berbahaya konsekuensi psikososial dan kesehatan bila tidak ditangani; dan 3) kurangnya pengetahuan mengenai pelayanan yang tersedia dan/atau kepercayaan bahwa pelayanan tersebut menjamin kerahasiaan dan terpercaya. Pada tahap awal masa keadaan darurat, dengan keterbatasan sumber-sumber dan berlanjutnya perpindahan populasi, peningkatan kesadaran mengenai kekerasan seksual memerlukan informasi, pendidikan dan komunikasi (IEC). Tujuan adalah sebagai berikut:

- * Untuk memberikan informasi kepada orang yang selamat/korban akan potensi konsekuensi berbahaya dan mengancam jiwa dari kekerasan seksual.
- * Untuk memberikan informasi kepada komunitas tentang ketersediaan pelayanan kekerasan seksual, bagaimana mendapatkan akses, dan bahwa pelayanan tersebut akan menolong orang yang selamat/korban dan keluarga mereka.
- * Untuk memberikan informasi dan membangun kepercayaan dalam komunitas bahwa pelayanan-pelayanan tersebut menghormati dan menjaga kerahasiaan dan harga diri dari orang yang selamat/korban dan keluarganya.
- * Untuk memberikan informasi kepada komunitas mengenai perlunya melindungi dan merawat korban kekerasan dan tidak mendiskriminasikan mereka.

Patut diingat bahwa memberikan informasi kepada komunitas mengenai ketersediaan pelayanan untuk orang yang selamat/korban kekerasan seksual dapat dilakukan hanya bila pelayanan-pelayanan yang layak, dapat dijangkau dan menjamin kerahasiaan sebagaimana dijelaskan dalam panduan ini telah benar-benar tersedia. Mengiklankan tetapi tidak menyampaikan pelayanan yang seharusnya akan menimbulkan ketidakpercayaan komunitas dan bahkan lebih sedikit korban yang datang untuk mencari bantuan.

Tindakan-tindakan utama

Kelompok kerja GBV, ditunjuk oleh badan koordinator, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan utama yang disebutkan berikut ini telah dilaksanakan. Dalam banyak situasi, sektor pelayanan kesehatan dan/atau komunitas akan memimpin kegiatan-kegiatan IEC; walau demikian, sebagai fungsi lintas sektor, IEC harus melibatkan banyak aktor/sektor.

1. Mengenali sumber-sumber yang ada dan potensi saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada komunitas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. (Lihat Lembar Tindakan 2.1, Kegiatan pemantauan dan evaluasi.) Hal-hal yang harus dipertimbangkan:

- Pekerja/penggerak berbasis komunitas dalam program-program kesehatan, gizi, air/sanitasi, pelayanan komunitas, program-program anak, bidan, dukun beranak, dlsb.
- Pemimpin kaum wanita, guru-guru, pemimpin agama dan adat.
- Tempat-tempat berkumpulnya anggota komunitas, di mana poster atau bahan-bahan informasi lainnya tersedia, seperti pos distribusi, pos kesehatan, pos registrasi, tempat penampungan umum bagi pengungsi baru.
- Program radio yang populer

2. Menyatukan daftar organisasi dan pelayanan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Lembar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra dan bagian secara meluas kepada komunitas dan organisasi kemanusiaan dan organisasi pemerintah yang terkait.

3. Menentukan pesan-pesan utama yang akan disebarluaskan berdasarkan analisis situasi terkoordinasi di lokasi. Beberapa atau semua pesan berikut ini bisa digunakan:

- Potensi konsekuensi kesehatan akibat kekerasan seksual (kehamilan yang tidak diinginkan, luka-luka, masalah kesehatan reproduksi, infeksi, STI, termasuk infeksi HIV)
- Konsekuensi emosi dan sosial akibat kekerasan seksual (rasa takut, cemas, panik, menarik diri, depresi, merasa tidak berdaya, pengasingan sosial)
- Siapa yang membutuhkan bantuan (anak-anak lelaki, anak perempuan, remaja, perempuan, anggota keluarga korban)
- Bagaimana mendapatkan pertolongan — secara pasti di mana tempatnya, organisasi apa, lewat pintu mana, waktu beroperasi (sebaiknya 24 jam), dlsb.

- Pertolongan seperti apa yang tersedia (misalnya jaminan kerahasiaan dan privacy, bidan terlatih, kounselor terlatih, perawatan rahasia, obat-obatan, bentuk pertolongan yang diinginkan untuk tetap aman)
 - Pentingnya perlindungan dan keselamatan bagi orang yang selamat/korban
 - Tanggung jawab komunitas untuk melindungi dan merawat korban (lihat Lembar Tindakan 7.2, Memastikan bahwa orang yang selamat/korban mendapat tempat penampungan aman), tidak mempersalahkan mereka dan tidak menolak mereka
 - Prilaku standar bagi staf kemanusiaan dan mekanisme pelaporan seperti dijelaskan dalam Lembar Tindakan 4.3, Menerapkan mekanisme pengaduan rahasia dan 4.4, Membentuk jaringan kerja kelompok focal point SEA
4. Menyesuaikan atau mengembangkan metode dan bahan-bahan sederhana untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tersebut.
- Berkonsultasi dengan perempuan dan anak-anak perempuan untuk melakukan verifikasi bahwa informasi yang disampaikan tidak melanggar adat istiadat, jelas dan menyampaikan pesan dengan baik.
 - Memberikan informasi kepada pemimpin komunitas mengenai perlunya menyebarluaskan informasi dan berkonsultasi dengan mereka untuk memastikan bahwa bahan-bahan dan pesan yang disampaikan tidak melanggar adat-istiadat.
 - Pastikan untuk menekankan pada pesan bahwa pelayanan kekerasan seksual terjamin kerahasiaannya.
 - Siapkan bahan-bahan menggunakan berbagai metode untuk memastikan terjadinya komunikasi dengan orang yang buta huruf. Beberapa contoh adalah sebagai berikut: poster dan selebaran dengan huruf dan gambar; siaran radio; dan bertemu atau bergabung dengan perempuan/anak-anak perempuan, seperti ketika berbicara masalah kesehatan dan program-program sesudah waktu sekolah.
5. Membuat rencana untuk penyebarluasan informasi dalam komunitas sebagai bagian dari perencanaan tindakan dan koordinasi sebagaimana dijelaskan dalam Lembar Tindakan 1.1, Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra. Rencana ini harus memasukkan:
- Siapa (organisasi apa) yang akan menyebarluaskan bahan-bahan tersebut
 - Dimana/kepada siapa mereka menyebarluaskan informasi tersebut
 - Metode apa yang akan mereka gunakan dalam penyebaran informasi kepada kelompok tertentu dalam komunitas
 - Seberapa sering mereka mengulangi kegiatan penyebaran informasi tersebut

Bahan-bahan acuan utama

1. Samples of information materials can be downloaded at
 - Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs. Media/Materials Clearinghouse http://www.hcpartnership.org/mmc/mmc_search.php and End VAW website <http://www.endvaw.org/about.htm>
 - The National Center for Victims of Crime (USA), Get Help Series, Sexual Assault. <http://www.ncvc.org/ncvc/main.aspx?dbName=DocumentViewer&DocumentID=32369>
2. Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons. UNHCR, 2003. http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03.pdf
3. Gender-based Violence Web-based Annotated Bibliography. RHRC. www.rhrc.org/resources/gbv
4. Gender-based Violence Tools Manual for Assessment and Program Design, Monitoring and Evaluation. RHRC, 2004, pages 167-168.

LEMBAR TINDAKAN

10.2 Menyebarluaskan informasi mengenai IHL kepada orang-orang bersenjata

Fungsi : Informasi Pendidikan Komunikasi

Tahap : Pencegahan dan Penanganan Minimum

Latar belakang

Pencegahan kekerasan seksual harus meliputi tindakan yang secara khusus menargetkan orang-orang bersenjata dan pasukan keamanan/polisi. Sepanjang sejarah sampai saat ini, kekerasan seksual selama terjadinya konflik bersenjata seringkali dilakukan oleh atau dibiarkan oleh pihak bersenjata. Selama konflik senjata berlangsung begitu juga masa damai, polisi dan pasukan keamanan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi komunitas dari kekerasan seksual.

Hukum Kemanusiaan Internasional (IHL) – secara prinsip Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol-Protokol Tambahnya

— adalah isi undang-undang yang melindungi mereka yang tidak – atau tidak lagi – mengambil peran aktif dalam tindak kekerasan, dan mengatur cara-cara dan metode perang. IHL berlaku untuk konflik senjata internal dan internasional dan mengikat pada kedua negara dan kelompok bersenjata yang bertikai. Ia juga mengikat para pasukan yang ikut serta dalam operasi perdamaian multinasional bila mereka melakukan tindak kekerasan. * Kekerasan seksual secara jelas dilarang dalam hukum kemanusiaan internasional.**

Hukum hak asasi internasional (“hak asasi manusia”) dirancang untuk masa damai dan berlaku untuk semua orang. Tujuan utama dari hak asasi manusia adalah untuk melindungi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah mereka sendiri. Hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional saling melengkapi. Keduanya berupaya untuk melindungi jiwa, kesehatan dan harga diri setiap individu, masing-masing melihat dari sudut yang berbeda. Hukum kemanusiaan berlaku untuk situasi konflik bersenjata, sementara hak asasi manusia (atau setidaknya beberapa dari itu) melindungi setiap individu setiap waktu, baik semasa perang maupun damai. Tujuan untuk

menyebarkan IHL adalah untuk mempengaruhi mereka yang, atau bisa saja, terlibat dalam konflik atau kekerasan bersenjata untuk menghormati hukum. Ketika melakukan fungsi penegakan hukum, polisi, pasukan bersenjata, dan terkadang militer harus mengabdikan pada komunitas dengan melindungi mereka dari tindakan-tindakan ilegal – termasuk kekerasan seksual – dan karena itu harus tahu, mengerti, menghormati dan tunduk kepada hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional yang relevan dengan tugas mereka.

Tujuan utama dari kegiatan penyebaran IHL adalah untuk mencegah kekerasan. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan IHL diharapkan memberi dampak nyata atas perilaku pihak bersenjata. Pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak bersenjata harus berkonsentrasi pada tiga langkah:

- Pelarangan perkosaan dan bentuk lain kekerasan seksual harus masuk ke dalam sistem hukum pasukan-pasukan yang berbeda, atau ke dalam peraturan internal kelompok bersenjata bukan Negara
- Pelaksanaan melalui doktrin atau prosedur, pendidikan dan pelatihan (atau yang sejenis) sehingga orang-orang bersenjata menerima perintah tegas mengenai perilaku mereka dalam hal ini
- Pemberian sanksi yang efektif bila ada kasus kekerasan

Tindakan-tindakan utama

Tindakan-tindakan berikut berlaku untuk sektor perlindungan, yaitu, organisasi yang melaksanakan program-program perlindungan. Focal point dari sektor perlindungan (lihat Lembar Tindakan 3.3, Memberikan advokasi bagi kepatuhan dan penerapan instrumen internasional) membuat laporan kepada kelompok kerja GBV mengenai kemajuan dari tindakan-tindakan utama ini.

1. Memberikan informasi kepada pucuk pimpinan komando, termasuk pimpinan politik, bahwa mereka bertanggung jawab untuk memastikan adanya persiapan hukum yang diterjemahkan ke dalam instruksi-instruksi yang berbobot dan jelas yang memuat pesan pelarangan kekerasan seksual.

* Buletin Sekretaris Jendral(ST/SGB/ /1999/13, 6 August 1999) mengenai observasi oleh pasukan PBB dan pengamat hukum kemanusiaan juga signifikan, mewajibkan PBB untuk memastikan bahwa anggota pasukan PBB dan pengamat militer “terikat penuh” dengan prinsip-prinsip dan aturan terkait.

** Sebagai contoh, pasal umum 3 dari empat Konvensi Jenewa, Pasal 27, Konvensi Jenewa IV, Pasal 75,76 dan 77 (1) Protokol Tambahan I, Pasal 4 (2) Protokol Tambahan II, dan dirangkum dalam kalimat “Secara sengaja mengakibatkan penderitaan hebat atau luka serius pada tubuh atau kesehatan” dalam pasal 147, Konvensi Jenewa IV.

2. Mengupayakan penerapan hukum kemanusiaan dan traktat relevan lainnya pada pasukan bersenjata atau pasukan keamanan, polisi atau kelompok bersenjata bukan negara.

3. Memberikan informasi kepada populasi sipil mengenai hukum kemanusiaan dan traktat relevan lainnya. Hubungkan ini dengan kegiatan penyebaran informasi kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan pada Lembar Tindakan 10.1, Memberikan informasi kepada komunitas tentang kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan.

4. Memberikan informasi kepada pejabat publik dari departemen yang berbeda, pimpinan politik, dan para pengambil keputusan tentang hukum kemanusiaan dan traktat relevan lainnya, termasuk peraturan-peraturan mengenai kekerasan seksual.

5. Memberikan informasi kepada pihak penegakan hukum bahwa:

- perkosaan, pelacuran karena terpaksa, kekerasan seksual, dan bentuk lain kekerasan berbasis gender adalah kejahatan perang, baik yang dilakukan sewaktu konflik bersenjata internasional atau internal;
- mereka wajib mengambil tindakan ketika terjadi kekerasan berbasis gender, sama seperti ketika bentuk kejahatan lain terjadi di wilayah tugas mereka;
- ketika menahan perempuan, mereka (kaum perempuan) harus berurusan dan diawasi oleh pejabat penegak hukum perempuan dan ketika ditahan, harus terpisah dari laki-laki;
- mereka harus selalu menghormati hak dan harga diri korban kejahatan perempuan dan pelaku perempuan;
- mereka harus memperlakukan orang yang selamat/korban kekerasan seksual dengan sungguh-sungguh dan menghormati harga diri mereka, dan menyadari bahwa mereka membutuhkan perlindungan dan keselamatan pribadi juga keluarga mereka, dari ancaman dan pembalasan dendam;
- mereka harus memberikan informasi kepada orang yang selamat/korban tentang proses hukum dan akses kepada sistem peradilan.

6. Persiapan-persiapan untuk operasi perdamaian harus mencakup kursus penyegaran mengenai IHL dan secara khusus pelarangan perkosaan dan bentuk lain kekerasan seksual. (Lihat Lembar Tindakan 4.3, Menerapkan mekanisme pengaduan rahasia dan 4.4, Menerapkan jaringan kerja kelompok focal SEA.)

relevan dengan kebiasaan profesional penegakan hukum dalam situasi berkisar dari perdamaian ke konflik bersenjata internasional.
[http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0698/\\$File/ICRC_002_0698.PDF!Open](http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0698/$File/ICRC_002_0698.PDF!Open)

2. The law of armed conflict. Teaching file.
<http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwplList571/2437B7A5BFC8EE31C1256D5C00393846>

3. Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict: An ICRC Guidance Document.
<http://www.gva.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwplList138/888F718CF7575CB4C1256E4B004D0576>

4. Secretary-General's Bulletin: Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law, ST/SGB/1999/13, 6 August 1999.
www.un.org/peace/st_sgb_1999_13.pdf

5. The Special Needs of Women and Children in and after Conflict: a Training Programme for Civilian Personnel in UN Peacekeeping Operations.
<http://www.unitar.org/wcc/>

Bahan-bahan acuan utama

1. To serve and to protect. Manual ini memuat aturan-aturan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia

Lampiran

Lampiran 1

Tindakan untuk menangani kekerasan berdasarkan gender dalam masa keadaan darurat: IASC

Pernyataan Komitmen

13 January 2005

Kami, anggota dari Panitia Kerja Antaragensi (the Inter-Agency Standing Committee, IASC), sangat prihatin akan meluasnya kekerasan berdasarkan gender semasa keadaan darurat. Secara khusus kami prihatin atas penggunaan secara sistematis kekerasan seksual dalam situasi konflik sebagai metode perang untuk merusak dan menanamkan rasa takut di antara masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak perempuan.

Kami kemudian dicengangkan oleh laporan-laporan akhir-akhir ini mengenai eksploitasi seksual dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB dan staf sipil PBB.

Kami, karena itu, menegaskan kembali tanggung jawab pribadi dan bersama untuk menghormati standar tertinggi hukum dan secara penuh menerapkan Buletin mengenai Langkah-langkah Khusus untuk Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dan Penganiayaan Seksual oleh Sekretaris Jendral PBB (ST/SGB/2003/13).*

Kami lebih jauh berkomitmen kepada tindakan mendesak dan bersama-sama bertujuan untuk mencegah kekerasan berbasis gender, termasuk khususnya kekerasan seksual, memastikan perawatan layak dan tindak lanjut bagi korban/orang yang selamat dan bekerja untuk memastikan para pelaku bertanggung jawab. Secara khusus, kami membuat komitmen untuk:

1. Memperkuat langkah-langkah pencegahan: Efek merusak konflik, seperti perpindahan tempat penduduk, kerusakan struktur komunitas, kemiskinan dan kurangnya sumber-sumber menambah risiko terjadinya kekerasan berbasis gender. Kami harus berupaya untuk menyediakan bantuan tepat pada waktunya dan menyeluruh dan perlindungan dengan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, untuk melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual. Langkah-langkah pencegahan harus meliputi:

- Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional kami mencegah populasi yang terkena bencana, khususnya anak-anak perempuan dan perempuan, berada dalam risiko kekerasan berbasis gender;
- Mendukung kewenangan nasional untuk memastikan keamanan efektif bagi populasi sipil, terutama perempuan dan anak-anak, termasuk melalui tindakan pengawasan dan langkah-langkah penangkalan;
- Menegakkan administrasi efektif dari keadilan untuk memperkuat kewenangan, termasuk dengan menyediakan kounseling hukum dan membantu akses korban/orang yang selamat kepada keadilan;
- Menyediakan program-program pelatihan bagi pasukan penjaga perdamaian, polisi, dan orang-orang bersenjata mengenai pelanggaran kekerasan seksual di dalam instrumen hukum internasional, dan mendukung lebih banyaknya jumlah perempuan dalam operasi pasukan penjaga perdamaian, polisi dan pasukan bersenjata;
- Mendukung kapasitas pembangunan dan pelatihan pemerintah nasional, LSM nasional, dan komunitas lokal dalam pengambilan langkah-langkah pencegahan.

2. Memastikan pelaksanaan kebijakan IASC mengenai pengarusutamaan gender dalam bantuan kemanusiaan: Ketidaksetaraan gender secara langsung berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. Menangani diskriminasi gender, termasuk dengan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan menjadi partisipan penuh dalam proses pengambilan keputusan, adalah langkah penting untuk mengakhiri bentuk kekerasan ini.

3. Mengupayakan kepatuhan kepada hukum internasional dan memperkuat upaya untuk menangani kekebalan hukum: Dalam situasi konflik bersenjata, kekerasan berbasis gender, termasuk khususnya kekerasan seksual, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai kekerasan terhadap masyarakat sipil. Kami karena itu harus mengajak Pemerintah-pemerintah untuk mematuhi hukum internasional selama dan

*ochaonline.un.org/GetBin.asp?DocID=1083

sesudah konflik bersenjata. Karena pelaku kekerasan seksual tetap menikmati kekebalan hukum, kami juga harus mendukung tindakan-tindakan lebih tegas dari pihak Pemerintah untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman. Kami juga menyambut peran Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan mendukung upayanya untuk memastikan pertanggungjawaban atas kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak bila pemerintahan nasional gagal.

4. Meningkatkan pelaporan dan pengumpulan data: Meningkatkan kapasitas untuk memantau dan melaporkan tindakan kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual, berdasarkan hukum internasional, dan mendukung mekanisme untuk mencari ganti rugi hukum. Hal ini akan mencakup meningkatkan kerjasama dengan mekanisme hak asasi manusia (traktat dan prosedur khusus), termasuk khususnya Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan, mekanisme hak asasi manusia regional, dan LSM hak asasi manusia. Melakukan pengumpulan data berdasarkan jenis kelamin dan umur secara sistematis dan analisis sebagai dasar untuk pengembangan program secara efektif sebagaimana juga pemantauan dan evaluasi.

5. Menyediakan perawatan dan tindak lanjut untuk korban/orang yang selamat: Membangun dan memperkuat program dan pelayanan untuk menangani konsekuensi psikologis, sosial dan fisik akibat kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual, bagi korban/orang yang selamat dan membantu reintegrasi mereka ke dalam komunitas yang lebih besar, termasuk melalui:

- Menyediakan dukungan psikologis dan sosial yang layak untuk korban/orang yang selamat dan untuk komunitas di mana mereka tinggal;
- Menyediakan perawatan medis yang menyeluruh dan peka untuk korban/orang yang selamat, termasuk, jika perlu, pencegahan pasca terinfeksi HIV (PEP) bersama-sama konseling sukarela dan pemeriksaan dan perawatan kesehatan reproduksi menyeluruh bagi korban/orang yang selamat dari perkosaan.

6. Mengatasi masalah berlanjut dari penganiayaan dan eksploitasi seksual oleh personel bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan dan perlindungan bagi populasi yang terkena bencana: Kami menegaskan kembali komitmen kami kepada prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang tercantum pada Buletin Sekretaris Jendral PBB, termasuk dengan memastikan bahwa semua Tim Negara PBB membangun mekanisme pelaporan yang dapat dicapai dan menjamin kerahasiaan untuk menerima dan menyelidiki seluruh tuduhan perbuatan tidak senonoh dan semua langkah yang diperlukan telah diambil untuk menghukum pelaku dan mencegah bertambahnya jumlah eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Kami mengimbau komunitas penjaga perdamaian untuk bertindak sesuai dengan Buletin dan untuk memastikan para pelaku bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, kami melihat kebutuhan untuk melengkapi Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral, Warga PBB, dan/atau Koordinator Kemanusiaan dan Tim Negara yang ada di lapangan dengan bantuan teknis dan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan tugas mereka melaksanakan Buletin. Selanjutnya, kami menegaskan kembali pentingnya memastikan bahwa unit kerja bukan PBB dan individu-individu memiliki pengetahuan tentang standar perilaku yang ditentukan dalam Buletin.

7. Menentang kekerasan berbasis gender pada masa keadaan darurat: Kami harus mengupayakan advokasi mewakili kepentingan korban/orang yang selamat dan agar supaya pelaku bertanggung jawab.

8. Mengembangkan kebijakan IASC dan rencana tindakan dan memperkuat pembangunan kapasitas untuk penanganan kekerasan berbasis gender: Berdasarkan kebijakan dan panduan yang ada, termasuk Matriks IASC untuk Intervensi Kekerasan Berbasis Gender dalam Kondisi Kemanusiaan, kami harus memperjuangkan pendekatan melekat, partisipatif, dan multisektoral untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender.

Lampiran 2

(untuk melengkapi Lembar Tindakan 2.2, Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi)

CONTOH Formulir Pemantauan, Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Minimum

Situasi/Negara: _____ Tanggal: _____ Disusun oleh: _____

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA	STATUS PELAKSANAAN
Koordinasi	
1.1 Membangun mekanisme koordinasi dan memberikan orientasi kepada mitra	
1.2 Memberikan advokasi dan menggalang dana	
1.3 Memastikan standar Sphere disebarluaskan dan dipatuhi	
Penilaian dan Pemantauan	
2.1 Melakukan analisis situasi terkoordinasi	
2.2 Kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi	
Perlindungan	
3.1 Memantau keamanan dan strategi perlindungan	
3.2 Menyediakan keamanan sesuai kebutuhan	
3.3 Memberikan advokasi untuk pelaksanaan dan kepatuhan kepada instrumen internasional	
Sumber Daya Manusia	
4.1 Merekrut staf dengan cara yang mencegah SEA	
4.2 Menyebarkan dan memberi informasi kepada semua mitra tentang kode etik	
4.3 Menerapkan mekanisme pengaduan rahasia	
4.4 Menerapkan jaringan kerja focal SEA	
Air dan Sanitasi	
5.1 Menerapkan program-program air/sanitasi	
Ketersediaan Makanan dan Gizi	
6.1 Menerapkan program-program ketersediaan makanan dan gizi	
* Perencanaan Tempat Penampungan dan Lokasi dan Barang-barang Kebutuhan bukan Makanan	
7.1 Menerapkan program-program perencanaan lokasi dan tempat penampungan	
7.2 Memastikan bahwa orang yang selamat/korban memiliki tempat penampungan aman	
7.3 Menerapkan strategi pengumpulan bahan bakar	
7.4 Menyediakan perlengkapan sanitasi untuk perempuan dan anak-anak perempuan	
Pelayanan Kesehatan dan Komunitas	
8.1 Memastikan akses perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	
8.2 Menyediakan pelayanan kesehatan kekerasan seksual	
8.3 Menyediakan dukungan psikologis dan sosial berbasis komunitas	
Pendidikan	
9.1 Memastikan akses anak perempuan dan lelaki mendapatkan pendidikan	
Informasi, Pendidikan, Komunikasi	
10.1 Memberikan informasi kepada komunitas mengenai kekerasan seksual dan ketersediaan pelayanan	
10.2 Menyebarkan informasi mengenai IHL kepada orang-orang bersenjata	

Lampiran 3

Contoh Formulir Pelaporan Kasus

(diambil dari Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons. UNHCR, 2003)

CATATAN : Staff yang mengisi formulir ini harus dilatih dengan baik dalam mewawancarai korban/orang yang selamat dan bagaimana mengisi formulir ini dengan benar. Formulir ini bukanlah suatu pedoman wawancara atau pemeriksaan. Tersedia pedoman-pedoman dan formulir-formulir lain yang digunakan untuk konseling dan pemeriksaan/perawatan kesehatan.

JENIS KASUS		Secondary incident type	
No. Kasus	Nama kamp/area dari kota	Tanggal dan waktu wawancara	
Nomor-nomor kasus sebelumnya untuk Klien ini (jika ada)			
INFORMASI KORBAN/ORANG YANG SELAMAT			
Nama: (pilihan)	Umur:	Tahun lahir :	Jenis Kelamin
Alamat :	Latar belakang suku/etnik:	Status Perkawinan:	Pekerjaan:
Jumlah anak :	Umur:	Kepala Keluarga (diri sendiri atau nama, hubungan dengan orang yang selamat)	
Jika korban/orang yang selamat adalah seorang anak:			Hubungan:
KASUS			
Lokasi:	Tanggal:	Waktu:	
Deskripsi Kasus (secara singkat kondisi, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi setelah itu):			

Contoh Formulir Pelaporan Insiden - hal 2 (dapat dicetak di satu halaman agar mudah digunakan di lapangan)

INFORMASI PELAKU		
Nama:	Jumlah Pelaku:	Jenis Kelamin:
Alamat:	Warga negara: Umur:	Suku/Etnik:
Hubungan dengan korban /orang yang selamat:	Status Perkawinan:	Pekerjaan:
Bila pelaku tidak diketahui, gambarkan dia, termasuk tanda-tanda yang dapat dikenali:		
Lokasi pelaku saat ini bila diketahui: Apakah pelaku merupakan ancaman terus-menerus?		
Apakah pelaku seorang anak: Nama orang yang mengasuh:		Hubungan:
SAKSI-SAKSI		
Sebutkan ada/tidaknya saksi (termasuk anak-anak):		
Nama-nama dan alamat-alamat mereka:		
LANGKAH YANG DIAMBIL - semua langkah-langkah yang sudah diambil hingga tanggal pengisian formulir ini		
Langkah yang diambil hingga hari ini		
POLISI Nama		
SECURITY Nama		
UNHCR Nama		
PEMUKA-PEMUKA MASYARAKAT SETEMPAT Nama		
LAYANAN KESEHATAN Nama/nfo.		
LAIN-LAIN Nama		
LANGKAH-LANGKAH YANG DIBUTUHKAN DAN LANGKAH YANG DIRENCANAKAN - sampai tanggal formulir ini diisi		
Penilaian kebutuhan keamanan fisik dan perencanaan pengamanan segera:		
Sudahkah korban/orang yang selamat menerima konseling – jika ya, berbentuk apa?		
Apa korban/orang yang selamat akan melapor ke Polisi? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
Apakah ia mencari bantuan dari peradilan tradisional? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
Apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pekerja-pekerja pembangunan komunitas/kekerasan seksual dan berbasis gender (SGBV)?		
Apa langkah berikutnya yang dibutuhkan ?		
Formulir diisi oleh (Tulis Nama):		Tanda tangan:

Lampiran 4

Singkatan

ARC	Action for the Rights of the Child
AS	action sheet
BCC	behaviour change communication
CAP	consolidated appeal process
CBO	community-based organisation
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
DPKO	Department of Peacekeeping Operations
GBV	gender-based violence
HC	Humanitarian Coordinator
IASC	Inter-Agency Standing Committee
ICRC	International Committee of the Red Cross
IEC	information, education, communication
M & E	monitoring and evaluation
MISP	Minimum Initial Service Package
NGO	non-governmental organisation
OHCHR	Office of the High Commissioner for Human Rights
RC	Resident Coordinator
RHRC	Reproductive Health Response in Conflict Consortium
SEA	sexual exploitation and abuse
SG	Secretary-General of the United Nations
SGB	Secretary-General's Bulletin
SGBV	sexual and gender-based violence
SMSG	Special Representative of the Secretary General
STI/STD	sexually transmitted infection/disease
TBA	traditional birth attendant
TOR	terms of reference
UN	United Nations
UNFPA	United Nations Population Fund
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNOCHA	United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
VAW	violence against women
WFP	World Food Programme
WHO	World Health Organisation

